

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah secara makro berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang berasal dari pungutan pajak, pungutan retribusi dan dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Menyediakan informasi mengenai ketersediaan penerimaan periode berjalan, cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, baik yang mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- g. Menyediakan informasi mengenai nilai suatu asset tetap yang disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- h. Menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, surplus/defisit-LO dan informasi mengenai nilai penyusutan untuk masing-masing periode.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara (pasal 23 ayat 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- t. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- v. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 Tentang perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- w. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- x. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
- y. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Bab I	Pendahuluan
	1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
	1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II	Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1 Ekonomi Makro
	2.2 Indikator Makro Pembangunan Daerah
	2.3 Kebijakan Keuangan
	2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah
	2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah
	2.3.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan
	2.3.4 Pembiayaan Daerah
Bab III	Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1 Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Bab IV	Kebijakan Akuntansi
	4.1 Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
	4.4.1 Pendapatan LRA
	4.4.2 Belanja
	4.4.3 Pendapatan LO
	4.4.4 Beban
	4.4.5 Aset
	4.4.5 Kewajiban
	4.4.7 Ekuitas
	4.4.8 Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali
Bab V	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran
	5.1 Pendapatan
	5.1.1 Pendapatan Asli Daerah
	5.1.2 Pendapatan Transfer
	5.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah

- 5.2 Belanja
 - 5.2.1 Belanja Operasi
 - 5.2.2 Belanja Modal
 - 5.2.3 Belanja Tidak Terduga
 - 5.2.4 Belanja Transfer
- 5.3 Pembiayaan Daerah
 - 5.3.1 Penerimaan Pembiayaan
 - 5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan
 - 5.3.3 Perhitungan Anggaran
- Bab VI Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Operasional
 - 6.1 Pendapatan
 - 6.1.1 Pendapatan Asli Daerah
 - 6.1.2 Pendapatan Transfer
 - 6.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah
 - 6.2 Beban
 - 6.2.1 Beban Pegawai
 - 6.2.2 Beban Persediaan
 - 6.2.3 Beban Jasa
 - 6.2.4 Beban Pemeliharaan
 - 6.2.5 Beban Perjalanan Dinas
 - 6.2.6 Beban Hibah
 - 6.2.7 Beban Bantuan Sosial
 - 6.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi
 - 6.2.9 Beban Penyisihan Piutang
 - 6.2.10 Beban Transfer
 - 6.2.11 Belanja Tidak terduga
 - 6.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
 - 6.4 Beban Luar Biasa
- BAB VII Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Neraca
 - 7.1 Aset
 - 7.1.1 Aset Lancar
 - 7.1.2 Investasi Jangka Panjang
 - 7.1.3 Aset Tetap
 - 7.1.4 Dana Cadangan
 - 7.1.5 Aset Lainnya
 - 7.2 Kewajiban
 - 7.2.1 Kewajiban Jangka Pendek
 - 7.2.2 Kewajiban Jangka Panjang
 - 7.3 Ekuitas Dana
- Bab VIII Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
 - 8.1 Penjelasan Laporan Arus Kas
 - 8.1.1 Definisi Aktivitas Arus Kas

	8.1.2	Posisi Kas
Bab IX		Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas
	9.1	Ekuitas Awal
	9.2	Surplus/Defisit-LO
	9.3	RK PPKD
	9.4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
	9.5	Ekuitas Akhir
Bab X		Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
	10.1	Saldo Anggaran Lebih Awal
	10.2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
	10.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
	10.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
	10.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir
	10.6	Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Berdasarkan Penerapan Basis Akrual, untuk Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, sedangkan Untuk Entitas Pelaporan Menggunakan Basis akrual
	10.7	Hal-hal Penting yang Perlu Diungkapkan
Bab XI		Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis bahwa sektor-sektor yang termasuk dalam basis ekonomi di Kabupaten Cirebon dan sektor unggulan Kabupaten Cirebon sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh Kabupaten Cirebon adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Sementara itu, berdasarkan indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2015-2019, pencapaian target indikator makro pembangunan Tahun 2018-2019 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2.1
Indikator Makro Pembangunan Daerah 2018-2019

No	Indikator Makro Ekonomi	2018		2019**	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi (RPJMD)**
1.	PDRB ADHB (Rp. Juta)	44.446.270	45.106.311	49.446.364	49.186.357
2.	PDRB ADHK (Rp. Juta)	12.183.449	31.942.383	12.847.447	33.723.897
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,50	5,33	5,55	5,08
4.	Tingkat Inflasi (%)	3,5-4,5	2,80	3,5-4,5	2,00
5.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) (%)	1,30	1,99	1,30	1,25
6.	Penyerapan Investasi (Rp. juta)	1.297.599	846,16	1.492.239	1.704.927
7.	Pendapatan per kapita (Rp)	19.590.887	20.857.677	21.568.345	15.315.423
8.	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	91,1	92,27	91,3	90,32
9.	Jumlah Penduduk (jiwa)	-	2.162.576	-	2.189.785
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,17 - 73,81	68,05	73,85 - 74,41	68,69
	a. Indeks Pengetahuan				
	- Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	8,2	6,62	8,03	6,71
	- Harapan Lama Sekolah (HLS)	-	12,22	-	12,24
	b. Indeks Kesehatan				
- Umur Harapan Hidup (UHH)	66,38	71,66	66,51	71,82	
c. Indeks Pengeluaran					
- Pengeluaran per Kapita (Rp ribu)	-	9.862	-	14.728	
11	Penduduk Miskin (%)	8,19	10,70	7,02	9,94
12	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,9	7,73	8,7	10,56
13	Indeks Gini Ratio	-	0,40	-	0,41

Sumber : BPS, DPMPSTSP, Disdukcapil Kabupaten Cirebon, Tahun 2020
Keterangan : **) Proyeksi Bappellitbangda, 2020

1. Struktur dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Cirebon

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar **7,96%** dari angka **45.461.939** juta rupiah tahun 2018 menjadi **49.186.357** juta rupiah pada tahun 2019. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil dari Tahun 2018 mencapai **32.160.192** juta rupiah atau meningkat sebesar **4,86%** pada Tahun 2019 sebesar **33.723.897** juta rupiah.

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015 – 2019

(Dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.708.697	6.339.473	6.612.585	7.168.887	7.476.528
B	Pertambangan dan Penggalian	537.138	527.989	517.407	532.939	520.611
C	Industri Pengolahan	7.612.343	8.321.347	8.903.176	9.521.941	10.008.477
D	Pengadaan Listrik dan Gas	58.280	69.694	86.440	102.525	118.889
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	26.463	30.190	35.869	40.886	46.933
F	Konstruksi	4.228.250	4.498.753	4.817.136	5.264.542	5.783.085
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.839.376	6.146.253	6.608.835	7.067.681	7.592.615
H	Transportasi dan Pergudangan	2.835.581	3.131.583	3.432.642	3.751.418	4.175.482
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.241.906	1.330.941	1.484.463	1.556.478	1.714.275
J	Informasi dan Komunikasi	806.879	893.196	988.957	1.063.950	1.122.897
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.212.558	1.383.018	1.527.545	1.686.423	1.900.601
L	Real Estate	791.055	838.145	930.497	1.022.422	1.130.748
M,N	Jasa Perusahaan	267.883	295.546	329.474	362.649	444.921
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.161.580	1.229.692	1.298.859	1.396.796	1.502.244
P	Jasa Pendidikan	1.643.579	1.806.007	2.092.991	2.416.186	2.841.710
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	648.318	733.828	814.491	896.512	988.753
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.114.766	1.265.118	1.437.918	1.609.704	1.817.588
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	35.734.651	38.840.772	41.919.286	45.461.939	49.186.357

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2020

Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling besar kontribusinya dalam perekonomian Kabupaten Cirebon dengan memberikan sumbangan sebesar **7.476.528** juta rupiah atau **15,20%** dari seluruh total PDRB Kabupaten Cirebon. Ini membuktikan bahwa sektor pertanian di Kabupaten Cirebon masih merupakan sektor yang paling dominan kontribusinya bagi PDRB Kabupaten Cirebon. Namun, sektor pertanian ini kontribusinya sudah mulai tergeser oleh sektor industri pengolahan yang kontribusinya mencapai **20,35%**. Untuk lebih jelasnya mengenai PDRB Kabupaten Cirebon ADHK dan PDRB ADHB dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan Tabel 2.4.

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Cirebon Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015 – 2019

(Dalam Juta Rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4.112.438	4.360.550	4.426.988	4.526.469	4.487.076
B	Pertambangan dan Penggalian	429.908	419.365	420.749	431.175	416.880
C	Industri Pengolahan	5.689.437	6.020.185	6.325.534	6.651.079	6.754.590
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44.516	47.425	51.709	53.000	56.761
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	22.400	23.583	25.400	26.569	28.362
F	Konstruksi	3.361.642	3.527.201	3.679.255	3.936.184	4.181.874
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.486.818	4.647.957	4.853.022	5.010.805	5.249.185
H	Transportasi dan Pergudangan	2.022.859	2.172.362	2.310.399	2.446.491	2.683.459
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.009.223	1.049.024	1.129.847	1.160.826	1.225.904
J	Informasi dan Komunikasi	784.048	866.988	950.048	1.035.692	1.103.908
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	967.279	1.061.760	1.113.883	1.192.733	1.297.663
L	Real Estate	621.764	649.874	713.116	775.727	847.611
M,N	Jasa Perusahaan	227.430	247.828	271.120	294.350	321.659
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	831.801	849.610	853.013	870.708	903.402
P	Jasa Pendidikan	1.400.599	1.488.637	1.630.472	1.757.893	1.984.683
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	565.620	615.280	663.085	711.633	794.031
R,S,T,U	Jasa lainnya	1.018.473	1.101.683	1.205.667	1.278.860	1.386.847
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	27.596.255	29.149.312	30.623.306	32.160.192	33.723.897

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2020

PDRB Kabupaten Cirebon bila dilihat dari kategori laju pertumbuhan ekonomi (LPE) terbagi menjadi 2 (dua) kelompok pertumbuhan yaitu:

1. Kategori LPE sangat tinggi yaitu LPE yang berada di atas LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar **5,88%**.

Sektor yang berada pada rentang kategori tinggi ini adalah:

- a) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
 - b) Industri Pengolahan
 - c) Konstruksi
 - d) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
 - e) Transportasi dan Pergudangan
 - f) Jasa Pendidikan
2. Kategori LPE tinggi yaitu LPE yang berada di bawah LPE Umum PDRB Kabupaten Cirebon yang sebesar **5,88%** terdiri dari:
 - a) Pengadaan Listrik dan Gas
 - b) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
 - c) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
 - d) Real Estate
 - e) Pertambangan dan Penggalian
 - f) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
 - g) Informasi dan Komunikasi
 - h) Jasa Keuangan dan Asuransi
 - i) Jasa Perusahaan
 - j) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
 - k) Jasa lainnya

Tabel 2.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon Dirinci
Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2015 - 2019 (Persen)

Kategori	Uraian	Laju Pertumbuhan Ekonomi				
		2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	(3,51)	4,73	2,74	6,03	5,21
B	Pertambangan dan Penggalian	0,48	0,77	(2,33)	0,51	1,04
C	Industri Pengolahan	5,30	3,31	1,83	1,72	3,5
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,37	12,25	13,75	15,72	8,28
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,89	8,36	10,31	8,97	7,53
F	Konstruksi	8,07	1,4	2,65	2,15	3,4
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,42	1,61	2,98	3,58	2,55
H	Transportasi dan Pergudangan	8,72	2,84	3,06	3,21	1,48
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,56	3,1	3,56	2,05	4,29
J	Informasi dan Komunikasi	13,37	0,11	1,04	(1,31)	(0,98)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	12,41	3,91	5,28	3,1	3,59
L	Real Estate	4,21	1,37	1,17	1,01	1,22
M,N	Jasa Perusahaan	7,76	1,25	1,9	1,38	12,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,88	3,64	5,2	5,35	3,66
P	Jasa Pendidikan	10,36	3,38	5,81	7,07	4,17
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	10,60	4,05	2,99	2,56	(1,16)
R,S,T,U	Jasa lainnya	9,45	4,92	3,86	5,54	4,12
Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi		4,88	5,63	2,9	2,73	3,27

Sumber : BPS Kabupaten Cirebon Tahun 2020

2.2 Kebijakan Keuangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2019, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Sistem penganggaran dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Dana Perimbangan:
 - 1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2) Dana Alokasi Umum;
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya;
 - 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
 - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya.
2. Belanja Daerah, terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Hibah;
 - 3) Belanja Bantuan Sosial;
 - 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan;
 - 6) Belanja Tidak Terduga.
 - b. Belanja Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Modal.

3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;
 - 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Penerimaan Piutang Daerah.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
 - 1) Pembentukan dana cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembayaran Pokok Utang.

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terpenuhinya peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2019. Pendapatan Daerah pada tahun 2019 ditargetkan senilai **Rp4.067.884.688.382,00** yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan senilai **Rp617.644.092.930,00** terdiri dari :

- a) Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp217.850.949.000,00**;
- b) Retribusi Daerah senilai **Rp41.298.590.975,00**;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai **Rp9.844.449.579,00**;
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai **Rp348.650.103.376,00**.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan senilai **Rp3.035.085.731.452,00** terdiri dari:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan senilai **Rp2.286.225.194.387,00** terdiri dari:
 1. Dana Bagi Hasil Pajak senilai **Rp78.689.152.563,00**;
 2. Dana Bagi hasil Sumber Daya Alam senilai **Rp36.213.660.238,00**;
 3. Dana Alokasi Umum senilai **Rp1.591.969.932.000,00**;
 4. Dana Alokasi Khusus senilai **Rp 579.352.449.586,00**.
- b) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya senilai **Rp461.115.736.000,00**; yang diperoleh dari Dana Desa dari APBN senilai **Rp436.288.708.000,00**; dan Dana Insentif Daerah (DID) senilai **Rp24.827.028.000,00**.
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ditargetkan senilai **Rp287.744.801.065,00** terdiri dari:
 1. Pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor senilai **Rp66.584.568.810,00**;

2. Pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor senilai **Rp61.579.491.900,00**;
3. Pendapatan bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor senilai **Rp77.595.663.946,00**;
4. Pendapatan bagi hasil Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan senilai **Rp106.289.525,00**;
5. Pendapatan bagi hasil pajak rokok senilai **Rp81.878.786.884,00**.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan senilai **Rp415.154.864.000,00** terdiri dari:

1. Pendapatan hibah senilai **Rp222.853.200.000,00**;
2. Bantuan Keuangan dari Provinsi senilai **Rp192.301.664.000,00**.

Dalam upaya memenuhi target-target pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi dan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah, pembaharuan database dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD, meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil, mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, dan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi PAD tahun 2019 senilai **Rp639.841.341.358,19** mengalami kenaikan senilai **Rp55.030.497.876,59** atau sebesar **9,41%** dari realisasi tahun 2018 senilai **Rp548.810.843.481,60**. Realisasi PAD sebagai berikut:

- a) Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp213.572.238.616,00** atau mengalami kenaikan senilai **Rp5.676.226.670,00** atau sebesar

2,73% dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp207.896.011.946,00**;

- b) Pendapatan Retribusi Daerah senilai **Rp42.841.103.005,00** atau mengalami kenaikan senilai **Rp210.460.823,00** atau sebesar **0,49%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp42.630.642.182,00**;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai **Rp12.990.615.843,00** mengalami kenaikan senilai **Rp5.095.242.132,00** atau sebesar **64,53%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp7.895.373.711,00**;
- d) Lain-lain PAD yang Sah senilai **Rp370.437.383.894,19** mengalami kenaikan senilai **Rp44.048.568.251,59** atau sebesar **13,50%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp326.388.815.642,60**.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 senilai **Rp2.969.497.473.755,00** mengalami kenaikan senilai **Rp210.891.740.713,00** atau sebesar **7,64%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai **Rp2.758.605.733.042,00**. Kenaikan tersebut diperoleh dari Dana Alokasi Umum sebesar **6,05%**, Dana Alokasi Khusus sebesar **13,45%**, Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar **1,58%**, Dana Penyesuaian sebesar **13,58%** dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **4,40%**, namun terdapat penurunan Dana Bagi Hasil Pajak sebesar **20,06%**.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2019 senilai **Rp405.131.115.603,00** mengalami kenaikan senilai **Rp65.479.425.487,00** atau sebesar **19,28%** dari tahun 2018 senilai **Rp339.651.690.116,00**. Kenaikan tersebut diperoleh dari Bantuan hibah sebesar **3,67%** dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar **45,87%**.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah dan Transfer

Kebijakan Belanja Daerah dan Transfer diarahkan untuk terpenuhinya Belanja Daerah dan Transfer tahun 2019. Belanja Daerah dan Transfer pada tahun 2019 dialokasikan senilai **Rp4.362.142.773.034,73** terdiri dari:

1. Belanja

Belanja dialokasikan senilai **Rp3.700.862.423.634,73** untuk kebutuhan:

- a) Belanja Operasi senilai **Rp2.961.618.392.686,00** yang terdiri dari Belanja Pegawai senilai **Rp1.857.151.289.694,00**; Belanja Barang dan Jasa senilai **Rp1.066.132.732.722,00**; Hibah senilai

Rp36.201.600.000,00; dan Bantuan Sosial senilai **Rp2.132.770.00,00.**

- b) Belanja Modal senilai **Rp681.046.742.437,00** yang terdiri dari Belanja Tanah senilai **Rp16.448.252.800,00**; Belanja Peralatan dan Mesin senilai **Rp166.938.810.547,00**; Belanja Gedung dan Bangunan senilai **Rp210.799.918.436,00**; Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan senilai **Rp257.356.803.139,00**; Belanja Aset Tetap Lainnya senilai **Rp29.502.957.515,00.**
- c) Belanja Tak Terduga senilai **Rp58.197.288.511,73.**

2. Transfer

Transfer dialokasikan senilai **Rp661.280.349.400,00** untuk kebutuhan:

- a) Transfer dari Bagi Hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa senilai **Rp25.019.859.000,00** terdiri dari Bagi Hasil Pajak senilai **Rp20.850.000.000,00** dan Bagi Hasil Retribusi senilai **Rp4.169.859.000,00.**
- b) Belanja Bantuan Keuangan senilai **Rp636.260.490.400,00** terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerinthan Desa senilai **Rp634.765.362.400,00** dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai politik senilai **Rp1.495.128.000,00.**

Realisasi Belanja dan Transfer selama tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Belanja

Realisasi Belanja tahun 2019 senilai **Rp3.373.974.352.440,86** mengalami kenaikan sebesar **8,13%** dari tahun 2018 senilai **Rp3.120.167.307.160,38.** Kenaikan Belanja tersebut diperoleh dari kenaikan realisasi Belanja Operasi senilai **Rp179.507.316.289,48** atau **6,88%**, Belanja Modal senilai **Rp76.909.838.691,00** atau **15,05%** namun terjadi penurunan belanja tak terduga senilai **Rp2.610.109.700,00** atau **100,00%.**

2. Transfer

Realisasi Transfer tahun 2019 senilai **Rp651.781.583.421,00** mengalami kenaikan senilai **Rp90.483.833.183,00** atau **16,12%** dari tahun 2018 senilai **Rp561.297.750.238,00.** Kenaikan realisasi Transfer tersebut diperoleh dari kenaikan realisasi Transfer/Bagi Hasil ke Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa senilai **Rp1.321.135.080,00** atau **6,91%** Belanja Bantuan Keuangan senilai **Rp89.162.698.103,00** atau **16,45%.**

2.2.3 Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) diarahkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dalam upaya Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah terhadap upaya mendorong pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Tahun 2014. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mengacu pada Standar Satuan Harga;
- b. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dan diselaraskan dengan indikasi program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW;
- c. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dan disinergikan dengan sasaran program dan kegiatan pembangunan tahun 2014 sesuai sasaran standar pelayanan minimum dan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs);
- d. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan wajib mengakomodasi program dan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan melalui pendekatan pola penganggaran PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan);
- e. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD, diarahkan sebagaimana poin a,b,c dalam penentuan pagu anggarannya dihitung melalui pendekatan pola PIS (Pagu Indikatif Sektoral).

Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah diarahkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Belanja Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (PAP) diarahkan untuk mendukung tugas dan fungsi SKPD berdasarkan Standar Biaya Belanja Daerah dan dipastikan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama 12 bulan;
- b. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
Selanjutnya, pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD hanya berupa pelayanan medical check up sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dalam rangka pemeriksaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sebagaimana maksud Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Berkaitan dengan itu, pelaksanaan medical check up dimaksud dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

- c. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), pemerintah daerah melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- d. Belanja wajib/mengikat yang harus dianggarkan oleh SKPD pada RKA- SKPD agar mencantumkan sumber pendanaan, misalnya:
 - a) Program kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat TA. 2019.
 - b) Program kegiatan yang bersumber dari DAK fisik dan non fisik TA 2019, DBHCHT TA 2019, DBH Pajak Rokok TA 2019, Dana Insentif daerah TA 2019, Dana Desa TA 2019 dan Hibah BOS TA 2019.
 - c) SiLPA program/kegiatan yang bersumber Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat tahun sebelumnya, DAK fisik dan non fisik tahun sebelumnya, DBHCHT tahun sebelumnya, DBH Pajak Rokok tahun sebelumnya, Dana Insentif daerah tahun sebelumnya, Dana Desa tahun sebelumnya dan Hibah BOS tahun sebelumnya.
- e. Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output kegiatannya belum tercapai, dan Sisa Bantuan keuangan provinsi jawa barat maka, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat output

kegiatannya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

- b) Untuk sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi lebih dari 1 (satu) tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi Jawa Barat pada bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis tahun anggaran berjalan, dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019;
- c) Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Fisik dan bantuan keuangan provinsi pada bidang/subbidang yang output kegiatannya telah tercapai, digunakan kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan dana transfer dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan atas peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019 setelah dilaksanakannya audit oleh BPK-RI dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
- f. Program kegiatan yang dibiayai dari Dana DBH-CHT paling sedikit 50% penggunaannya untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Program kegiatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka mendukung pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari alokasi pelayanan kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016.

2.2.4 Kebijakan Pembiayaan

Kebijakan Pembiayaan diarahkan untuk menghadapi surplus atau defisit anggaran tahun 2019. Pembiayaan tahun 2019 dialokasikan senilai **Rp294.258.084.652,73** sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan ditargetkan senilai **Rp309.058.084.652,73** sebagai berikut:

- a) Penggunaan Silpa senilai **Rp300.058.084.652,73**;
- b) Pencairan Dana Cadangan senilai **Rp0,00**;
- c) Penerimaan Pinjaman Daerah senilai **Rp9.000.000.000,00**.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dialokasikan senilai **Rp14.800.000.000,00** sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah senilai **Rp5.800.000.000,00**;
- b) Pembayaran Pokok Utang senilai **Rp9.000.000.000,00**.

Realisasi Pembiayaan selama tahun anggaran 2019 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2019 senilai **Rp321.620.443.501,73** mengalami penurunan senilai **Rp2.232.742.828,78** atau sebesar **0,69%** dari realisasi tahun 2018 senilai **Rp323.853.186.330,51**. Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2019 sebagai berikut:

- a) Penggunaan SiLPA senilai **Rp300.120.443.501,73** mengalami penurunan senilai **Rp3.876.573.535,78** atau **1,27%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp303.997.017.037,51**;
- b) Pencairan Dana Cadangan senilai **Rp0,00** atau mengalami penurunan senilai **Rp56.169.293,00** atau **100,00%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp56.169.293,00**.
- c) Penerimaan Pinjaman senilai **Rp21.500.000.000,00** atau mengalami kenaikan senilai **Rp1.700.000.000,00** atau **8,58%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp19.800.000.000,00**.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2019 senilai **Rp21.500.000.000,00** mengalami penurunan senilai **Rp3.898.310.919,00** atau sebesar **15,35%** dari realisasi tahun 2018 senilai **Rp25.398.310.919,00**. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2019 sebagai berikut:

- a) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah senilai **Rp0,00** mengalami penurunan senilai **Rp4.772.881.700,00** atau **100,00%**

dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp4.772.881.700,00**;

- b) Pembayaran Pokok Utang senilai **Rp21.500.000.000,00** mengalami kenaikan senilai **Rp874.570.781,00** atau **4,24%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp874.570.781,00**.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Kinerja Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan indikator sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Penetapan Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

2.3.2 Capaian Indikator Kinerja

Kebijakan yang telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat menginformasikan sejauh mana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, maka kinerja pembangunan daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang perlu dicermati bersama adalah, ketercapaian setiap indikator makro tersebut merupakan akumulasi dari peran serta seluruh *stakeholder* pembangunan.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dan perubahan APBD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Sampai dengan tahun anggaran 2019 berakhir, realisasi APBD menunjukkan Pendapatan Daerah senilai **Rp4.014.469.930.716,19** atau **98,69%** dari anggaran yang telah ditetapkan senilai **Rp4.067.884.688.382,00**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp331.401.664.076,59** atau **8,99%** dari realisasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp3.683.068.266.639,60**.

Belanja dan Transfer terealisasi senilai **Rp4.025.755.935.861,86** atau **92,29%** dari anggaran yang telah ditetapkan senilai **Rp4.362.142.773.034,73**.

Belanja terealisasi senilai **Rp3.373.974.352.440,86** atau **91,17%** dari anggaran yang telah ditetapkan senilai **Rp3.700.862.423.634,73**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp253.807.045.280,48** atau **8,13%** dari realiasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp3.120.167.307.160,38**.

Transfer terealisasi senilai **Rp651.781.583.421,00** atau **98,56%** dari anggaran yang telah ditetapkan senilai **Rp661.280.349.400,00**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp90.483.833.183,00** atau **16,12%** dari realiasi tahun 2018 yang mencapai senilai **Rp561.297.750.238,00**.

Dengan demikian terdapat defisit antara Pendapatan Daerah dengan Belanja dan Transfer senilai **Rp11.286.005.145,67**. Sementara realisasi Pembiayaan Daerah Netto Tahun Anggaran 2019 adalah senilai **Rp300.120.443.501,73** atau **101,99%** dari anggaran senilai **Rp294.258.084.652,73**. Realisasi APBD ini merupakan pengungkapan atas kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

a. Permasalahan dan Solusi Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan PAD adalah:

- 1) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak daerah, masih perlu terus ditingkatkan;

- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan dan perubahan regulasi yang ada;
- 3) Belum seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kabupaten Cirebon, melaporkan kegiatan usahanya secara rutin;
- 4) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum optimal;
- 5) Masih belum optimalnya kualitas aparatur pengelola retribusi;
- 6) Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang perlu terus ditingkatkan;
- 7) Keterbatasan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang peraturan pajak dan retribusi sehingga belum sepenuhnya masyarakat membayar kewajibannya terhadap pajak daerah;
- 8) Belum optimalnya ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah secara menyeluruh;
- 9) Penegakan sanksi belum diterapkan sepenuhnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan PAD adalah:

- 1) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, dan penelusuran/sensus. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
- 2) Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung;
- 3) Penyempurnaan ketatalaksanaan pelayanan perpajakan, melalui perbaikan dan penambahan SOP, Standar Pelayanan, pemeliharaan ISO 9001:2008, penambahan *outlet* pelayanan, peningkatan layanan info pajak dan retribusi serta pencanangan layanan pajak dan retribusi pada ATM Bank BJB yang tersebar di seluruh titik ATM milik Bank BJB;
- 4) Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap;
- 5) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan;
- 6) Melakukan inovasi dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi yang memudahkan wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran;
- 7) Peningkatan kegiatan sosialisasi melalui berbagai cara (pemasangan spanduk/*billboard*, penyebaran *booklet* pajak) dan *event* (*talk show* di radio, televisi lokal) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak dan retribusi;
- 8) Intensifikasi dan ekstensifikasi upaya penagihan aktif oleh petugas secara jemput bola kepada wajib pajak;
- 9) Melakukan verifikasi dan validasi data antara potensi, target dan realisasi pajak;
- 10) Menggali potensi pendapatan asli daerah.

b. Permasalahan dan solusi Belanja Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam Belanja Daerah adalah:

- 1) Penyusunan anggaran program belum seluruhnya dilakukan berdasarkan analisis standar belanja sehingga efisiensi dan efektivitas alokasi besaran anggaran belum optimal;
- 2) Proses penganggaran masih belum memperhatikan dengan cermat waktu pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan anggaran program dan kegiatan belum selaras dengan capaian target kinerja;
- 4) Adanya berbagai perubahan peraturan perundang-undangan;
- 5) Proses administrasi pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya dipahami oleh masing-masing SKPD;
- 6) Pengguna Anggaran belum melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam Belanja Daerah adalah:

- 1) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD;
- 3) Melakukan serangkaian proses penajaman dan penentuan prioritas program yang diusulkan oleh setiap SKPD;
- 4) Melakukan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap perubahan peraturan yang ada;
- 5) Penyederhanaan proses administrasi pengelolaan dan pencairan anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah telah diterapkan SPM Online untuk mempermudah dan mempercepat SKPD dalam melakukan proses pencairan anggaran;
- 6) Pengguna Anggaran harus membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi penyusunan pedoman teknis, sosialisasi dan melaksanakannya secara optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan wajib mencatat dan menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon terdiri dari 73 SKPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta SKPKD.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah basis kas. Untuk penyusunan dan penyajian Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas adalah basis akrual.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas untuk realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Cirebon. Entitas pelaporan yang menyajikan laporan kinerja keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan laporan operasional maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Namun demikian, penyajian laporan realisasi anggaran tetap berdasarkan basis kas. Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

4.4.1 Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah (KASDA) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KASDA maupun Kas yang masih berada pada bendahara setelah periode tahun pelaporan berakhir.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah (KASDA) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan

belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4.4.3 Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan dan selanjutnya akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.4 Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4.4.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 4.1
Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10,00%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50,00%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100,00%

- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.
- Biaya standard apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standard persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca.

b. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalty atau manfaat

sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Aset Tetap disajikan senilai perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut:

1) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

2) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan

semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
- b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 2. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.

Kapitalisasi aset tetap merupakan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin berupa Alat-alat Berat yang nilainya lebih dari **Rp2.500.000,00** (dua juta lima ratus ribu rupiah), Alat-alat angkutan yang nilainya lebih dari **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah), Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat-alat Pertanian/Peternakan, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat Keamanan yang nilainya lebih dari **Rp500.000,00** (lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan; jalan, instalasi dan jaringan yang nilainya lebih dari **Rp10.000.000,00** (sepuluh juta rupiah);
- 3) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa Buku dan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga nilainya **Rp1,00** (satu rupiah) sedangkan Hewan/ Ternak dan Tumbuhan yang nilainya lebih dari **Rp1,00** (satu rupiah);
- 4) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2.
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d. 50 tahun

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

4.4.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada saat ini dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban kepada BUD berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

4.4.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.8 Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Cirebon mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan diimplementasikan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan, diantaranya:

1. Pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2019 berbasis akrual.
2. Keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas telah dapat dipenuhi sehubungan pada pelaporan Tahun 2019 penyusunan dan penyajian akuntansi telah berbasis akrual.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas baik halaman muka maupun penjelasannya di Bab IX.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 Pendapatan

Pendapatan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp4.067.884.688.382,00** dan terealisasi senilai **Rp4.014.469.930.716,19** atau **98,69%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp331.401.664.076,59** atau **9,00%** dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2018 yang tercapai senilai **Rp3.683.068.266.639,60**. Realisasi Pendapatan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Realisasi Pendapatan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	617.644.092.930,00	639.841.341.358,19	103,59	584.810.843.481,60
2	Pendapatan Transfer	3.035.085.731.452,00	2.969.497.473.755,00	97,84	2.758.605.733.042,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	415.154.864.000,00	405.131.115.603,00	97,59	339.651.690.116,00
	JUMLAH	4.067.884.688.382,00	4.014.469.930.716,19	98,69	3.683.068.266.639,60

Rincian realisasi Pendapatan senilai **Rp4.014.469.930.716,19** per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.2
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Kesehatan	136.599.521.000,00	125.337.847.697,00	91,76	123.364.959.204,00
2	RSUD Arjawinangun	101.578.397.000,00	111.904.000.821,19	110,17	97.001.416.745,60
3	RSUD Waled	117.623.128.278,00	123.419.132.898,00	104,93	100.425.746.462,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	950.000.000,00	966.837.360,00	101,77	920.152.548,00
5	Dinas Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	105.985.000,00	105,99	103.630.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000,00	375.081.600,00	93,77	731.255.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	2.100.000.000,00	2.197.326.150,00	104,63	2.111.982.176,00
8	Dinas Perhubungan	3.002.050.000,00	2.644.214.500,00	88,08	2.676.068.800,00
9	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.500.000.000,00	1.749.111.750,00	116,61	2.142.353.625,00
10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	5.250.000.000,00	4.071.860.039,00	77,56	6.537.649.597,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Terpadu Satu Pintu				
11	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	46.500.000,00	37.550.000,00	80,75	26.102.000,00
12	Dinas Kelautan dan Perikanan	165.000.000,00	149.178.500,00	90,41	119.436.476,00
13	Dinas Pertanian	418.300.000,00	493.622.900,00	118,01	476.289.300,00
14	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.450.281.875,00	2.369.275.800,00	96,69	1.947.460.256,00
15	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	3.477.850.561.229,00	3.425.076.667.085,00	98,48	3.136.587.752.504,00
16	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	217.850.949.000,00	213.572.238.616,00	98,04	207.896.011.946,00
	JUMLAH	4.067.884.688.382,00	4.014.469.930.716,19	98,69	3.683.068.266.639,60

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp617.644.092.930,00** dan terealisasi senilai **Rp639.841.341.358,19** atau **103,59%** dari target yang ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp55.030.497.876,59** atau **9,41%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp584.810.843.481,60**. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

Tabel 5.3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hasil Pajak Daerah	217.850.949.000,00	213.572.238.616,00	98,04	207.896.011.946,00
2	Hasil Retribusi Daerah	41.298.590.975,00	42.841.103.005,00	103,74	42.630.642.182,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.844.449.579,00	12.990.615.843,00	131,96	7.895.373.711,00
4	Lain-lain PAD yang sah	348.650.103.376,00	370.437.383.894,19	106,25	326.388.815.642,60
	JUMLAH	617.644.092.930,00	639.841.341.358,19	103,59	584.810.843.481,60

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai berikut:

7.1.1.1 Hasil Pajak Daerah

Hasil Pajak Daerah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp217.850.949.000,00** dan terealisasi senilai **Rp213.572.238.616,00** atau **98,04%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp5.676.226.670,00** atau **2,73%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp207.896.011.946,00**. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Realisasi Hasil Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Hotel	6.732.497.000,00	7.337.719.958,00	108,99	5.493.399.088,00
2	Pajak Restoran	16.108.147.000,00	18.475.733.000,00	114,70	14.846.857.359,00
3	Pajak Hiburan	1.612.957.000,00	1.643.946.844,00	101,92	1.143.247.608,00
4	Pajak Reklame	4.500.000.000,00	4.532.777.295,00	100,73	4.200.315.833,00
5	Pajak Penerangan Jalan	72.787.348.000,00	74.039.490.635,00	101,72	70.051.261.883,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	12.000.000.000,00	11.385.438.581,00	94,88	11.228.950.557,00
7	Pajak Parkir	600.000.000,00	638.493.718,00	106,42	615.947.036,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	950.000.000,00	1.162.870.200,00	122,41	995.034.950,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	61.221.000,00	102,04	63.586.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	42.500.000.000,00	47.247.561.827,00	111,17	40.855.853.208,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	60.000.000.000,00	47.046.985.558,00	78,41	58.401.558.424,00
	JUMLAH	217.850.949.000,00	213.572.238.616,00	98,04	207.896.011.946,00

Realisasi Hasil Pajak Daerah terbesar selama tahun 2019 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan senilai **Rp74.039.490.635,00** atau **101,72%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp72.787.348.000,00**. Alokasi anggaran dan realisasi Hasil Pajak Daerah tersebut seluruhnya direalisasikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Realisasi Hasil Pajak Daerah meliputi realisasi atas pajak-pajak yang dipungut di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi Hasil Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel Kabupaten Cirebon tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp6.732.497.000,00** dan terealisasi senilai **Rp7.337.719.958,00** atau **108,99%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.844.320.870,00** atau **33,57%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp5.493.399.088,00**. Realisasi Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel 5.5
Realisasi Pajak Hotel

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hotel Bintang Empat	3.760.000.000,00	4.744.172.831,00	126,17	3.028.179.373,00
2	Hotel Bintang Tiga	1.379.885.000,00	1.124.644.751,00	81,50	902.113.451,00
3	Hotel Bintang Dua	400.000.000,00	333.990.636,00	83,50	433.865.234,00
4	Hotel Melati Tiga	716.231.000,00	675.914.352,00	94,37	681.196.515,00
5	Hotel Melati Dua	45.500.000,00	38.188.227,00	83,93	47.041.250,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
6	Hotel Melati Satu	200.881.000,00	160.854.000,00	80,07	174.175.285,00
7	Losmen/Rumah Penginapan/Pesanggerahan /Hostel/Rumah Kos	230.000.000,00	259.955.161,00	113,02	226.827.980,00
	JUMLAH	6.732.497.000,00	7.337.719.958,00	108,99	5.493.399.088,00

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp16.108.147.000,00** dan terealisasi senilai **Rp18.475.733.000,00** atau **114,70%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.628.875.641,00** atau **24,44%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp14.846.857.359,00**. Realisasi Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 5.6
Realisasi Pajak Restoran

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Restoran	7.900.000.000,00	9.001.788.218,00	113,95	6.917.673.398,00
2	Rumah Makan	3.566.676.000,00	3.769.979.822,00	105,70	3.377.449.166,00
3	Café	500.000.000,00	613.360.868,00	122,67	439.983.381,00
4	Kantin	131.471.000,00	111.181.974,00	84,57	114.257.243,00
5	Katering	3.340.000.000,00	4.127.428.670,00	123,58	3.312.461.477,00
6	Jasa Boga	670.000.000,00	851.993.448,00	127,16	685.032.694,00
	JUMLAH	16.108.147.000,00	18.475.733.000,00	114,70	14.846.857.359,00

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp1.612.957.000,00** dan terealisasi **Rp1.643.946.844,00** atau **101,92%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp500.699.236,00** atau **43,80%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp1.143.247.608,00**. Realisasi Pajak Hiburan sebagai berikut:

Tabel 5.7
Realisasi Pajak Hiburan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Tontonan Film/Bioskop	440.000.000,00	550.378.456,00	125,09	-
2	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	13.500.000,00	15.927.000,00	117,98	9.800.000,00
3	Pameran	9.000.000,00	12.577.022,00	139,74	-
4	Karaoke	414.857.000,00	455.925.432,00	109,90	404.105.665,00
5	Sirkus/Akrobat/Sulap	3.000.000,00	4.250.000,00	141,67	2.900.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
6	Permainan Bilyard	2.600.000,00	1.925.000,00	74,04	2.250.000,00
7	Permainan Ketangkasan	680.000.000,00	555.232.833,00	81,65	680.947.870,00
8	Pusat Kebugaran	50.000.000,00	47.731.101,00	95,46	43.244.073,00
	JUMLAH	1.612.957.000,00	1.643.946.844,00	101,92	1.143.247.608,00

Tontonan Film/Bioskop terealisasi pada tahun 2019 karena merupakan objek pajak yang baru beroperasi pada tahun 2019. Sedangkan Pameran terealisasi pada tahun 2019 karena merupakan wajib pungut yang baru dikenakan pada tahun 2019.

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp4.500.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp4.532.777.295,00** atau **100,73%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp332.461.462,00** atau **7,92%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp4.200.315.833,00**. Realisasi Pajak Reklame sebagai berikut:

Tabel 5.8
Realisasi Pajak Reklame

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	3.195.000.000,00	3.645.319.310,00	114,09	3.532.843.613,00
2	Reklame Kain	1.230.000.000,00	703.802.985,00	57,22	621.644.720,00
3	Reklame Berjalan	75.000.000,00	183.655.000,00	244,87	45.827.500,00
	JUMLAH	4.500.000.000,00	4.532.777.295,00	100,73	4.200.315.833,00

Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar **57,22%** disebabkan oleh penetapan target anggaran tahun 2019 menyesuaikan dengan target pada RPJMD tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan tahun 2014. Atas realisasi tahun 2018 dan 2019, akan dijadikan dasar untuk menurunkan target anggaran pada RPJMD tahun 2020-2025.

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp72.787.348.000,00** dan terealisasi senilai **Rp74.039.490.635,00** atau **101,72%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.988.228.752,00** atau **5,69%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp70.051.261.883,00**. Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

Tabel 5.9
Realisasi Pajak Penerangan Jalan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	72.500.000.000,00	73.843.621.819,00	101,85	69.796.615.704,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	287.348.000,00	195.868.816,00	68,16	254.646.179,00
	JUMLAH	72.787.348.000,00	74.039.490.635,00	101,72	70.051.261.883,00

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp12.000.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp11.385.438.581,00** atau **94,88%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp156.488.024,00** atau **1,39%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp11.228.950.557,00**. Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut:

Tabel 5.10
Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Batu Kapur	9.239.082.000,00	9.300.258.675,00	100,66	9.027.842.100,00
2	Andesit (Bahan Bangunan)	35.275.000,00	61.668.000,00	174,82	31.902.000,00
3	Andesit Batu Hias	2.000.000,00	-	-	-
4	Pasir Bahan Bangunan	339.195.000,00	73.194.943,00	21,58	299.099.065,00
5	Tanah Liat Tahan Api	401.500.000,00	278.777.050,00	69,43	234.569.775,00
6	Tanah Urug	1.982.948.000,00	1.671.539.913,00	84,30	1.635.537.617,00
	JUMLAH	12.000.000.000,00	11.385.438.581,00	94,88	11.228.950.557,00

Andesit Batu Hias tidak terealisasi disebabkan oleh kelangkaan sumberdaya alam berupa andesit batu hias namun tetap dianggarkan untuk mengantisipasi jika adanya realiasi.

Pasir Bahan Bangunan terealisasi sebesar **21,58%** disebabkan oleh proses perizinan yang belum didapat oleh pengusaha.

7. Pajak Parkir

Pajak Parkir tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp600.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp638.493.718,00** atau **106,42%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp22.546.682,00** atau **3,66%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp615.947.036,00**. Realisasi Pajak Parkir sebagai berikut:

Tabel 5.11
Realisasi Pajak Parkir

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Parkir	600.000.000,00	638.493.718,00	106,42	615.947.036,00
	JUMLAH	600.000.000,00	638.493.718,00	106,42	615.947.036,00

Realisasi Pajak Parkir tahun 2018 tidak dijadikan dasar penetapan anggaran tahun 2019 karena terdapat realisasi yang bukan dari potensi pajak namun diperoleh dari hasil temuan pemeriksa.

8. Pajak Air Bawah Tanah

Pajak Air Bawah Tanah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp950.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp1.162.870.200,00** atau **122,41%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp167.835.250,00** atau **16,87%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp995.034.950,00**. Realisasi Pajak Air Bawah Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.12
Realisasi Pajak Air Bawah Tanah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Air Bawah Tanah	950.000.000,00	1.162.870.200,00	122,41	995.034.950,00
	JUMLAH	950.000.000,00	1.162.870.200,00	122,41	995.034.950,00

9. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp60.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp61.221.000,00** atau **102,04%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp2.365.000,00** atau **3,72%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp63.586.000,00**. Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut:

Tabel 5.13
Realisasi Pajak Sarang Burung Walet

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	61.221.000,00	102,04	63.586.000,00
	JUMLAH	60.000.000,00	61.221.000,00	102,04	63.586.000,00

10. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp42.500.000.000,00** dan terealisasi senilai

Rp47.247.561.827,00 atau **111,17%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **6.391.708.619,00** atau **15,64%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp40.855.853.208,00**. Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.14
Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Bumi dan Bangunan	42.500.000.000,00	47.247.561.827,00	111,17	40.855.853.208,00
	JUMLAH	42.500.000.000,00	47.247.561.827,00	111,17	40.855.853.208,00

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp60.000.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp47.046.985.558,00** atau **78,41%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp11.354.572.866,00** atau **19,44%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp58.401.558.424,00**. Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 5.15
Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	60.000.000.000,00	47.046.985.558,00	78,41	58.401.558.424,00
	JUMLAH	60.000.000.000,00	47.046.985.558,00	78,41	58.401.558.424,00

7.1.1.2 Hasil Retribusi Daerah

Hasil Retribusi Daerah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp41.298.590.975,00** dan terealisasi senilai **Rp42.841.103.005,00** atau **103,74%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp210.460.823,00** atau **0,49%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp42.630.642.182,00**. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.16
Realisasi Hasil Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Jasa Umum	32.613.048.875,00	35.162.159.450,00	107,82	31.807.715.232,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.535.542.100,00	1.482.890.166,00	96,57	1.411.668.728,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	7.150.000.000,00	6.196.053.389,00	86,66	9.411.258.222,00
	JUMLAH	41.298.590.975,00	42.841.103.005,00	103,74	42.630.642.182,00

Rincian realisasi Hasil Retribusi Daerah per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rincian Realisasi Retribusi Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Kesehatan	25.193.517.000,00	27.924.685.500,00	110,84	25.045.331.000,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	750.862.100,00	801.131.266,00	106,69	791.003.952,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	105.985.000,00	105,99	103.630.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	400.000.000,00	375.081.600,00	93,77	731.255.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.100.000.000,00	2.197.326.150,00	104,63	2.111.982.176,00
6	Dinas Perhubungan	3.002.050.000,00	2.644.214.500,00	88,08	2.676.068.800,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.500.000.000,00	1.749.111.750,00	116,61	2.142.353.625,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.250.000.000,00	4.071.860.039,00	77,56	6.537.649.597,00
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	46.500.000,00	37.550.000,00	80,75	26.102.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	87.080.000,00	71.258.500,00	81,83	41.516.476,00
11	Dinas Pertanian	418.300.000,00	493.622.900,00	118,01	476.289.300,00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.450.281.875,00	2.369.275.800,00	96,69	1.947.460.256,00
	JUMLAH	41.298.590.975,00	42.841.103.005,00	103,74	42.630.642.182,00

Realisasi Hasil Retribusi Daerah terbesar tahun 2019 diperoleh dari Retribusi Jasa Umum senilai **Rp35.162.159.450,00** atau **107,82%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp32.613.048.875,00**. Realisasi Hasil Retribusi Daerah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi Jasa Umum tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp32.613.048.875,00** dan terealisasi senilai **Rp35.162.159.450,00** atau **107,82%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.354.444.218,00** atau **10,55%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp31.807.715.232,00**. Realisasi Retribusi Jasa Umum sebagai berikut:

Tabel 5.18
Realisasi Retribusi Jasa Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	25.193.517.000,00	27.924.685.500,00	110,84	25.045.331.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.100.000.000,00	2.197.326.150,00	104,63	2.111.982.176,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	270.744.000,00	54,15	308.791.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	2.395.281.875,00	2.311.320.800,00	96,49	1.900.464.656,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.203.250.000,00	2.218.326.000,00	100,68	2.215.915.800,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	105.985.000,00	105,99	103.630.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	121.000.000,00	133.772.000,00	110,56	121.600.600,00
	JUMLAH	32.613.048.875,00	35.162.159.450,00	107,82	31.807.715.232,00

Realisasi Retribusi Jasa Umum terdapat pada SKPD berikut :

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan;
2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan;
4. Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Pertanian;
5. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran pada Dinas Pemadam Kebakaran;
6. Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar **54,15%** disebabkan oleh penetapan anggaran pada tahun 2019 meliputi objek retribusi lahan parkir pasar yang pengelolaannya masih dalam proses pengalihan.

2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp1.535.542.100,00** dan terealisasi senilai **Rp1.482.890.166,00** atau senilai **96,57%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp71.221.438,00** atau **5,05%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp1.411.668.728,00**. Realisasi Retribusi Jasa Usaha sebagai berikut:

Tabel 5.19
Realisasi Retribusi Jasa Usaha

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	750.862.100,00	801.131.266,00	106,69	791.003.952,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	87.080.000,00	71.258.500,00	81,83	41.516.476,00
3	Retribusi Terminal	298.800.000,00	155.144.500,00	51,92	151.362.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.000.000,00	-	-	2.252.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	152.275.000,00	213.623.400,00	140,29	197.794.300,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.500.000,00	37.550.000,00	100,13	23.850.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	200.025.000,00	204.182.500,00	102,08	203.890.000,00
	JUMLAH	1.535.542.100,00	1.482.890.166,00	96,57	1.411.668.728,00

Realisasi Retribusi Jasa Usaha terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
2. Retribusi Tempat Pelelangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Retribusi Terminal pada Dinas Perhubungan;
4. Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
5. Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah pada Dinas Pertanian.

Realisasi Retribusi Terminal sebesar **51,92%** disebabkan oleh:

- Beralihnya kewenangan pengelolaan terminal Sumber, Losari dan Ciledug ke Dinas Perhubungan Provinsi sehingga retribusi hanya dilakukan di pos terminal Cipeujeuh, Weru, dan Arjawinangun;
- Jumlah angkutan desa yang aktif berkurang dan tidak seluruhnya masuk/lewat di pos terminal;
- Waktu beroperasi angkutan desa semakin pendek karena berkurangnya penumpang;
- Dari jumlah trayek yang ada, sekitar **60,00%** yang melewati ke tiga terminal sehingga tidak maksimal terpungut.

Realisasi Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar **0,00%** disebabkan oleh adanya pemutusan sewa lahan parkir sebagai objek retribusi dan adanya konflik dalam pengelolaan lahan parkir dengan warga setempat.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp7.150.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp6.196.053.389,00** atau **86,66%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.215.204.833,00** atau **34,16%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai

Rp9.411.258.222,00. Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu sebagai berikut:

Tabel 5.20
Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.204.700.000,00	4.068.220.039,00	78,16	6.517.417.177,00
2	Retribusi Izin Trayek	45.000.000,00	3.640.000,00	8,09	19.240.000,00
3	Retribusi Izin Usaha Perikanan	300.000,00	-	-	992.420,00
4	Retribusi Menara Telekomunikasi	1.500.000.000,00	1.749.111.750,00	116,61	2.142.353.625,00
5	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	400.000.000,00	375.081.600,00	93,77	731.255.000,00
	JUMLAH	7.150.000.000,00	6.196.053.389,00	86,66	9.411.258.222,00

Realisasi Retribusi Jasa Perijinan Tertentu terdapat pada SKPD sebagai berikut:

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Retribusi Menara Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Realisasi Izin Mendirikan Bangunan tahun 2018 tidak dijadikan dasar penetapan anggaran tahun 2019 karena adanya rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Badan Pertanahan Nasional yang menjadi kendala dalam penerbitan IMB.

Realisasi Retribusi Izin Trayek sebesar **8,09%** disebabkan oleh tarif retribusi izin trayek hanya dikenakan untuk izin baru sedangkan untuk perpanjangan/registrasi tidak dikenakan tarif dan berkurangnya izin trayek karena semakin banyaknya kendaraan pribadi atau transportasi online sehingga menyebabkan banyak transportasi umum yang tidak beroperasi.

Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak terealisasi disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari dinas teknis sehingga mengurangi minat masyarakat terhadap budidaya ikan.

7.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tahun 2019 Yang Dipisahkan dianggarkan senilai **Rp9.844.449.579,00**. Dasar penganggaran pendapatan ini mengacu kepada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum Dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp12.990.615.843,00** atau **131,96%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp5.095.242.132,00** atau **64,53%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp7.895.373.711,00** yang diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jawa Barat-Banten (BJB) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 5.21
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Perusahaan Daerah PD. BPR	4.827.221.183,00	7.973.387.447,00	165,18	3.054.473.787,00
2	Bank Jawa Barat-Banten (BJB)	5.017.228.396,00	5.017.228.396,00	100,00	4.840.899.924,00
	JUMLAH	9.844.449.579,00	12.990.615.843,00	131,96	7.895.373.711,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan untuk Perusahaan Daerah PD. BPR senilai **Rp7.973.387.447,00** merupakan penyeteroran deviden dengan rincian sebagai berikut:

1. PD. BPR Astanajapura senilai **Rp6.381.676.907,00**;
2. PD. BPR Babakan senilai **Rp1.591.710.540,00**.

Pada tahun 2019 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan untuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Cirebon hanya terdapat pada dua PD. BPR. Hal tersebut berdasarkan:

- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2018 tentang penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Cirebon.
- Keputusan OJK Nomor 132/D.03/2019 tentang pemberian izin penggabungan usaha (merger) PD. BPR Beber, PD. BPR Cirebon Selatan, PD. BPR Ciwaringin, PD. BPR Gegecik, PD. BPR Kapetakan, dan PD. BPR Klangeran ke dalam PD. BPR Astanajapura.

- Akta merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura Nomor 10 Tahun 2019.
- Keputusan OJK Nomor KEP-156/D.03/2019 tentang pemberian izin penggabungan usaha (merger) PD. BPR Sumber, PD. BPR Arjawinangun, PD. BPR Waled, PD. BPR Karangsembung, PD. BPR Palimanan, PD. BPR Plumbon, PD. BPR Lemahabang, PD. BPR Susukan, PD. BPR Weru, PD. BPR Cirebon Barat, dan PD. BPR Cirebon Utara ke dalam PD. BPR Babakan.
- Akta merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Nomor 609 Tahun 2019
- Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal Luar Biasa tentang Penetapan Pengurus PD. BPR Babakan (hasil merger) serta pemberhentian pengurus PD. BPR Babakan, PD. BPR Sumber, PD. BPR Arjawinangun, PD. BPR Waled, PD. BPR Karangsembung, PD. BPR Palimanan, PD. BPR Plumbon, PD. BPR Lemahabang, PD. BPR Susukan, PD. BPR Weru, PD. BPR Cirebon Barat, dan PD. BPR Cirebon Utara.

7.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp348.650.103.376,00** dan terealisasi senilai **Rp370.437.383.894,19** atau **106,25%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp44.048.568.251,59** atau **13,50%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp326.388.815.642,60**. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.22
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	427.057.900,00	833.438.781,00	195,16	939.459.335,00
2	Penerimaan Jasa Giro	3.850.000.000,00	8.792.001.720,00	228,36	7.985.002.389,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	11.500.000.000,00	21.589.345.005,00	187,73	16.384.894.850,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	-	10.350.000,00	-	193.798.270,00
5	Pendapatan dari Pengembalian	113.000.000,00	333.110.582,00	294,79	172.326.550,00
6	Pendapatan BLUD	219.201.525.278,00	235.323.133.719,19	107,35	197.427.163.207,60
7	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas	111.406.004.000,00	97.377.918.425,00	87,41	98.319.628.204,00
8	Pendapatan Lain-Lain	2.152.516.198,00	6.178.085.662,00	287,02	4.966.542.837,00
	JUMLAH	348.650.103.376,00	370.437.383.894,19	106,25	326.388.815.642,60

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terbesar selama tahun 2019 diperoleh dari Pendapatan BLUD senilai

Rp235.323.133.719,19 atau **107,35%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp219.201.525.278,00**. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp427.057.900,00** dan terealisasi senilai **Rp833.438.781,00** atau **195,16%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp106.020.554,00** atau **11,29%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp939.459.335,00**. Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 5.23
Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	100.000.000,00	419.621.480,00	419,62	174.280.000,00
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	50.000.000,00	48.709.900,00	97,42	107.789.997,00
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	-	-	-	226.325.500,00
4	Penjualan Drum Bekas	18.000.000,00	11.636.000,00	64,64	12.092.000,00
5	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	4.137.900,00	7.561.310,00	182,73	6.808.881,00
6	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	177.000.000,00	146.508.784,00	82,77	110.247.715,00
7	Penjualan Hasil Perikanan	77.920.000,00	77.920.000,00	100,00	77.920.000,00
8	Hasil Sewa Tanah dan Bangunan	-	121.481.307,00	-	223.995.242,00
	JUMLAH	427.057.900,00	833.438.781,00	195,16	939.459.335,00

Sewa Tanah dan Bangunan tidak dianggarkan pada tahun 2019 disebabkan oleh belum adanya peraturan mengenai sewa tanah dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menjadi dasar keputusan penetapan penyewa tanah dan bangunan.

Sewa Tanah dan Bangunan terealisasi walaupun tidak terdapat anggaran disebabkan oleh adanya pemanfaatan tanah dalam bentuk sewa oleh Bank Jabar Banten yang bukan merupakan target sewa.

2. Penerimaan Hasil Jasa Giro

Penerimaan Hasil Jasa Giro tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp3.850.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp8.792.001.720,00** atau **228,36%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut

mengalami kenaikan senilai **Rp806.999.331,00** atau **10,11%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp7.985.002.389,00**. Realisasi Penerimaan Hasil Jasa Giro sebagai berikut:

Tabel 5.24
Realisasi Penerimaan Jasa Giro

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Jasa Giro Kas Daerah	3.750.000.000,00	7.624.245.735,00	203,31	6.965.187.161,00
2	Jasa Giro Pemegang Kas	100.000.000,00	1.167.755.985,00	1.167,76	1.019.815.228,00
	JUMLAH	3.850.000.000,00	8.792.001.720,00	228,36	7.985.002.389,00

Realisasi Jasa Giro Pemegang Kas senilai **Rp1.167.755.985,00** terdiri dari jasa giro pemegang kas pada Bendahara Pengeluaran SKPD dan jasa bunga pada Bendahara JKN FKTP dan Bendahara Dana BOS. Rincian Jasa Giro Pemegang Kas terdapat dalam Lampiran 5.1.

3. Pendapatan Bunga Deposito

Pendapatan Bunga Deposito tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp11.500.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp21.589.345.005,00** atau senilai **187,73%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp5.204.450.155,00** atau **31,76%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp16.384.894.850,00**. Realisasi Pendapatan Bunga Deposito sebagai berikut:

Tabel 5.25
Realisasi Pendapatan Bunga Deposito

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Rekening Deposito pada Bank Pemerintah dan PD. BPR	11.500.000.000,00	21.589.345.005,00	187,73	16.384.894.850,00
	JUMLAH	11.500.000.000,00	21.589.345.005,00	187,73	16.384.894.850,00

Rincian realisasi rekening Bunga Deposito pada Bank Pemerintah dan BPR sebagai berikut :

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai **Rp10.485.714.879,00**;
2. Bank Jawa Barat-Banten (BJB) senilai **Rp10.928.630.124,00**;
3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) senilai **Rp175.000.002,00**.

4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp0,00** dan terealisasi senilai **Rp10.350.000,00** atau **0,00%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp183.448.270,00** atau **94,66%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp193.798.270,00**. Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.26
Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Kerugian Barang	-	10.350.000,00	-	193.798.270,00
	JUMLAH	-	10.350.000,00	-	193.798.270,00

Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tidak dianggarkan tetapi terealisasi dikarenakan pada tahun 2019 terdapat penggantian kerugian daerah atas kehilangan barang berupa kendaraan bermotor yang dibayarkan pada tahun yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM). Rincian pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Pembayaran Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	STS	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	00018/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke sepuluh an. H.Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 7 Januari 2019)
2	00192/KB/2019	250.000,00	Kerugian barang sesuai dengan SKTJM No.951/02-SKTJM/2011 tanggal 15 Desember 2011 an. Yuyum Suminarti. UPT PKM Plumbon (8 Februari 2019)
3	00226/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke sebelas an. H.Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 19 Februari 2019)
4	00650/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke dua belas an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 13 Maret 2019)
5	00814/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke tiga belas an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 12 April 2019)
6	00929/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke empat belas an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai

NO	STS	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
			SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 7 Mei 2019)
7	01147a/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke lima belas an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 24 Juni 2019)
8	01226/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke enam belas an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 3 Juli 2019)
9	01448/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke tujuh belas an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 5 Agustus 2019)
10	01669/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke delapan belas an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 6 September 2019)
11	01849/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke sembilan belas an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 4 Oktober 2019)
12	02030/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke dua puluh an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 5 November 2019)
13	02262/KB/2019	300.000,00	Pengembalian biaya <i>own risk</i> (OR) bulan ke dua puluh satu an. H. Juju Hermanto, SKM., M.Si. sesuai SKTJM No.931/SKTJM 324.1-BKAD/2018 (Kecamatan Babakan tanggal 12 Desember 2019)
14	02290/KB/2019	6.000.000,00	Pembayaran Ganti Kerugian Daerah Kendaraan an. Dodi Sumantoro (tanggal 17 Desember 2019)
15	02322a/KB/2019	500.000,00	Penyelesaian/Pengembalian Tuntutan Ganti Rugi (TGR) an. Hj. Lilis Herawati, Kepala SDN 3 Beber (tanggal 26 Desember 2019)
	JUMLAH	10.350.000,00	

5. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan senilai **Rp113.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp333.110.582,00** atau **294,79%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp160.784.032,00** atau **93,30%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp172.326.550,00**. Realisasi Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 5.28
Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	113.000.000,00	333.110.582,00	294,79	172.326.550,00
	JUMLAH	113.000.000,00	333.110.582,00	294,79	172.326.550,00

Realisasi tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Terjadinya kelebihan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan diketahui pada saat rekonsiliasi antara data belanja pegawai dengan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pada Bendahara SKPD. Perbedaan antara data belanja pegawai dengan SKUMPTK dikarenakan SKPD belum melaporkan perubahan atau mutasi tunjangan keluarga sehingga tetap membayarkan gaji dan tunjangan pegawai yang bersangkutan. Serta adanya PNS yang meninggal namun gaji dan tunjangannya terlanjur masuk dalam daftar gaji dan ada pula keterlambatan penerbitan SK Pensiun bagi pegawai yang mengajukan pensiun sebelum waktunya.

6. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD dianggarkan senilai **Rp219.201.525.278,00** terealisasi senilai **Rp235.323.133.719,19** atau **107,35%** yang merupakan Pendapatan BLUD dari retribusi pelayanan kesehatan. Realisasi tersebut merupakan realisasi Pendapatan BLUD dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun senilai **Rp111.904.000.821,19** dan Rumah Sakit Umum Daerah Waled senilai **Rp123.419.132.898,00**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp37.895.970.511,59** atau **19,19%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp197.427.163.207,60**. Realisasi Pendapatan BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.29
Realisasi Pendapatan BLUD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan BLUD	219.201.525.278,00	235.323.133.719,19	107,35	197.427.163.207,60
	JUMLAH	219.201.525.278,00	235.323.133.719,19	107,35	197.427.163.207,60

7. Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Dana Kapitasi JKN pada FKTP tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp111.406.004.000,00** dan terealisasi senilai **Rp97.377.918.425,00** atau **87,41%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp941.709.779,00** atau **0,96%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp98.319.628.204,00** disebabkan oleh adanya penonaktifan sebanyak 264.000 jiwa per Agustus 2019 dari kepesertaan BPJS BPI Pusat.

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pembayaran pendapatan dana kapitasi berdasarkan Surat Keputusan Dana Kapitasi yang dikirimkan oleh BPJS ke Dinas Kesehatan setiap bulan. Realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebagai berikut:

Tabel 5.30
Realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	111.406.004.000,00	97.377.918.425,00	87,41	98.319.628.204,00
	JUMLAH	111.406.004.000,00	97.377.918.425,00	87,41	98.319.628.204,00

Realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP per Puskesmas terdapat dalam Lampiran 5.2.

8. Pendapatan Lain-lain

Pendapatan Lain-lain tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp2.152.516.198,00** dan terealisasi senilai **Rp6.178.085.662,00** atau **287,02%** yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.211.542.825,00** atau **24,39%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp4.966.542.837,00**. Realisasi Pendapatan Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 5.31
Realisasi Pendapatan Lain-Lain

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Lain-Lain	557.775.273,00	1.420.292.122,00	254,64	1.760.452.370,00
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Kependudukan	345.520.000,00	844.575.000,00	244,44	942.310.000,00
3	Pendapatan Pengembalian Kerugian Daerah Atas Pemeriksaan	1.224.010.800,00	3.861.827.650,00	315,51	2.216.697.783,00
4	Pendapatan Jasa Bunga Selain Pemegang Kas	25.210.125,00	51.390.890,00	203,85	47.082.684,00
	JUMLAH	2.152.516.198,00	6.178.085.662,00	287,02	4.966.542.837,00

Rincian realisasi Pendapatan Lain-lain sebagai berikut:

- Pengembalian sisa anggaran dana hibah senilai **Rp226.103.457,00**;
- Pembayaran denda administrasi senilai **Rp24.750.000,00**;
- Penerimaan lain-lain senilai **Rp111.556.309,00**;
- Obyek wisata banyu panas senilai **Rp190.650.900,00**;
- Utang Kasda Dapem senilai **Rp23.405.572,00**;
- Penjualan barang hasil bongkaran bangunan senilai **Rp44.238.000,00**;
- Denda dan pokok pajak (BAPPENDA) senilai **Rp615.746.059,00**;
- Denda keterlambatan pekerjaan senilai **Rp183.024.703,00**;
- Kelebihan setor oleh bank/SKPD senilai **Rp817.122,00**.

5.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp3.035.085.731.452,00**. Dan terealisasi senilai **Rp2.969.497.473.755,00** atau **97,84%** dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp210.891.740.713,00** atau **7,64%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp2.758.605.733.042,00** merupakan transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi. Realisasi Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.32
Realisasi Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.286.225.194.387,00	2.213.789.276.963,00	96,83	2.070.427.928.565,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	461.115.736.000,00	461.115.736.000,00	100,00	405.992.221.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	287.744.801.065,00	294.592.460.792,00	102,38	282.185.583.477,00
	JUMLAH	3.035.085.731.452,00	2.969.497.473.755,00	97,84	2.758.605.733.042,00

Realisasi Pendapatan Transfer terbesar selama tahun 2019 diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan senilai **Rp2.213.789.276.963,00** atau **96,83%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp2.286.225.194.387,00**. Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2019 sebagai berikut:

5.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan

Transfer pemerintah Pusat–Dana Perimbangan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp2.286.225.194.387,00** dan terealisasi senilai **Rp2.213.789.276.963,00** atau **96,83 %** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp143.361.348.398,00** atau **6,92%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp2.070.427.928.565,00**. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat–Dana Perimbangan sebagai berikut:

Tabel 5.33
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bagi Hasil Pajak	78.689.152.563,00	50.507.005.280,00	64,19	63.182.845.832,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	36.213.660.238,00	24.351.064.800,00	67,24	23.972.292.072,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.591.969.932.000,00	1.591.291.632.000,00	99,96	1.500.538.688.000,00
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	579.352.449.586,00	547.639.574.883,00	94,53	482.734.102.661,00
	JUMLAH	2.286.225.194.387,00	2.213.789.276.963,00	96,83	2.070.427.928.565,00

5.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp78.689.152.563,00** dan terealisasi senilai **Rp50.507.005.280,00** atau **64,19%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp12.675.840.552,00** atau **20,06%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp63.182.845.832,00**. Realisasi Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Tabel 5.34
Realisasi Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	28.313.678.256,00	17.979.187.656,00	63,50	17.937.742.173,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	45.038.831.998,00	28.520.689.598,00	63,32	40.287.956.659,00
3	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)	5.336.642.309,00	4.007.128.026,00	75,09	4.957.147.000,00
	JUMLAH	78.689.152.563,00	50.507.005.280,00	64,19	63.182.845.832,00

5.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp36.213.660.238,00** dan terealisasi senilai **Rp24.351.064.800,00** atau **67,24%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp378.772.728,00** atau **1,58%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp23.972.292.072,00**. Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebagai berikut:

Tabel 5.35
Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	128.306.832,00	56.122.200,00	43,74	76.973.236,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	1.082.777.671,00	590.155.800,00	54,50	701.234.591,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	7.738.651.023,00	4.797.020.800,00	61,99	4.944.070.438,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	11.557.257.240,00	6.116.790.610,00	52,93	5.908.065.237,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara	553.809.174,00	481.470.892,00	86,94	374.841.812,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	15.152.858.298,00	12.309.504.498,00	81,24	11.967.106.758,00
	JUMLAH	36.213.660.238,00	24.351.064.800,00	67,24	23.972.292.072,00

5.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp1.591.969.932.000,00** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara Tahun Anggaran 2019 dan terealisasi senilai **Rp1.591.291.632.000,00** atau **99,96%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp90.752.944.000,00** atau **6,05%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp1.500.538.688.000,00**. Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut:

Tabel 5.36
Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.591.969.932.000,00	1.591.291.632.000,00	99,96	1.500.538.688.000,00
	JUMLAH	1.591.969.932.000,00	1.591.291.632.000,00	99,96	1.500.538.688.000,00

5.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp579.352.449.586,00** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 dan terealisasi senilai **Rp547.639.574.883,00** atau **94,53%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp64.905.472.222,00** atau **13,45%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp482.734.102.661,00**. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

Tabel 5.37
Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Alokasi Khusus	146.544.727.586,00	129.956.111.056,00	88,68	78.063.207.560,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	432.807.722.000,00	417.683.463.827,00	96,51	404.670.895.101,00
	JUMLAH	579.352.449.586,00	547.639.574.883,00	94,53	482.734.102.661,00

Realisasi Dana Transfer DAK Fisik ke Kas Umum Daerah tersalurkan senilai **Rp129.956.111.056,00** atau **88,68%** dari pagu anggaran yang ditetapkan senilai **Rp146.544.727.586,00**.

Realisasi Dana Transfer DAK Non Fisik ke Kas Umum Daerah tersalurkan senilai **Rp417.683.463.827,00** atau **96,51%** dari pagu anggaran yang ditetapkan senilai **Rp432.807.722.000,00**. Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) per bidang sebagai berikut:

Tabel 5.38
Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Per Bidang

NO	SKPD	BIDANG	REALISASI PEMBAYARAN DARI KAS NEGARA (Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
a	Dinas Pendidikan	BOP PAUD	19.917.900.000,00
		Tunjangan Profesi Guru	319.117.056.170,00
		Tambahan Penghasilan Guru	498.600.000,00
		Tunjangan Khusus Guru	707.913.000,00
		BOP Pendidikan Kesetaraan	13.023.800.000,00
b	Dinas Kesehatan	BOK	50.781.534.169,00
c	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	BOKB	8.646.906.000,00
d	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.539.754.488,00
e	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga	BOP Museum	450.000.000,00
	JUMLAH		417.683.463.827,00
2	Dana Alokasi Khusus Fisik		
	DAK Fisik Reguler		
a	Dinas Pendidikan	SD	33.024.339.013,00
		SMP	13.973.000.600,00
		SKB	1.034.937.100,00
b	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar	5.876.536.860,00
		Pelayanan Kefarmasian	6.445.229.792,00
c	RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled	Pelayanan Rujukan	25.171.590.523,00
d	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Keluarga Berencana	1.078.202.712,00
e	Dinas Pertanian	Pertanian	4.523.066.630,00
f	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur Jalan	16.822.134.000,00
g	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Infrastruktur Air Minum	2.484.928.400,00
h	Dinas Kelautan dan Perikanan	Kelautan dan Perikanan	749.337.000,00
	JUMLAH		111.183.302.630,00
	DAK Fisik Penugasan		
a	Dinas Kesehatan	Penurunan Stunting	3.854.087.127,00
		Pengendalian Penyakit	2.289.472.561,00
b	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Sanitasi	1.800.000.000,00
		Infrastruktur Air Minum	1.282.830.600,00
c	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sarana Perdagangan	3.068.250.700,00
d	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur Irigasi	6.478.167.438,00
	JUMLAH		18.772.808.426,00
	JUMLAH KESELURUHAN		129.956.111.056,00

5.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp461.115.736.000,00** dan terealisasi senilai **Rp461.115.736.000,00** atau **100,00%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp55.123.515.000,00** atau **13,58%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp405.992.221.000,00**. Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.39
Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	461.115.736.000,00	461.115.736.000,00	100,00	405.992.221.000,00
	JUMLAH	461.115.736.000,00	461.115.736.000,00	100,00	405.992.221.000,00

Rincian Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebagai berikut:

Tabel 5.40
Rincian Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Desa dari APBN	436.288.708.000,00	436.288.708.000,00	100,00	370.242.221.000,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	24.827.028.000,00	24.827.028.000,00	100,00	35.750.000.000,00
	JUMLAH	461.115.736.000,00	461.115.736.000,00	100,00	405.992.221.000,00

Dana Desa dari APBN mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Tahun 2019 Dana Desa dari APBN dianggarkan senilai **Rp436.288.708.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp436.288.708.000,00** atau **100,00%** dari anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019. Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan senilai **Rp24.827.028.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp24.827.028.000,00** atau **100,00%** dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Transfer Pemerintah Provinsi tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp287.744.801.065,00** sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi

Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2019 dan terealisasi senilai **Rp294.592.460.792,00** atau **102,38%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp12.406.877.315,00** atau **4,40%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp282.185.583.477,00**. Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi sebagai berikut:

Tabel 5.41
Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	287.744.801.065,00	294.592.460.792,00	102,38	282.185.583.477,00
	JUMLAH	287.744.801.065,00	294.592.460.792,00	102,38	282.185.583.477,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Bagi Hasil dari Pajak Rokok. Rincian realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdapat dalam Lampiran 5.3.

5.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp415.154.864.000,00** dan terealisasi senilai **Rp405.131.115.603,00** atau **99,00%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp65.479.425.487,00** atau **19,28%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp339.651.690.116,00**. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 5.42
Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Hibah	222.853.200.000,00	221.895.600.000,00	99,57	214.038.960.000,00
2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	192.301.664.000,00	183.235.515.603,00	95,29	125.612.730.116,00
	JUMLAH	415.154.864.000,00	405.131.115.603,00	97,59	339.651.690.116,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terbesar selama tahun 2019 diperoleh dari Pendapatan Hibah senilai **Rp221.895.600.000,00** atau **99,57%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp222.853.200.000,00**.

5.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp222.853.200.000,00** dan terealisasi senilai **Rp221.895.600.000,00** atau **99,57%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp7.856.640.000,00** atau **3,67%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp214.038.960.000,00**. Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 5.43
Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar	161.775.200.000,00	161.157.600.000,00	99,62	155.045.760.000,00
2	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Pertama	61.078.000.000,00	60.738.000.000,00	99,44	58.993.200.000,00
	JUMLAH	222.853.200.000,00	221.895.600.000,00	99,57	214.038.960.000,00

5.1.3.2 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp192.301.664.000,00** dan terealisasi senilai **Rp183.235.515.603,00** atau **95,29%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp57.622.785.487,00** atau **45,87%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp125.612.730.116,00**. Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.44
Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	192.301.664.000,00	183.235.515.603,00	95,29	125.612.730.116,00
	JUMLAH	192.301.664.000,00	183.235.515.603,00	95,29	125.612.730.116,00

5.2 Belanja

Belanja tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp4.362.142.773.034,73** dan terealisasi senilai **Rp4.025.755.935.861,86** atau mencapai **92,29%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp344.290.878.463,48** atau **9,35%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp3.681.465.057.398,38**. Realisasi Belanja sebagai berikut:

Tabel 5.45
Realisasi Belanja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Operasi	2.961.618.392.686,00	2.786.140.573.287,86	94,07	2.606.633.256.998,38
2	Belanja Modal	681.046.742.437,00	587.833.779.153,00	86,31	510.923.940.462,00
3	Belanja Tidak Terduga	58.197.288.511,73	-	-	2.610.109.700,00
4	Belanja Transfer	661.280.349.400,00	651.781.583.421,00	98,56	561.297.750.238,00
	JUMLAH	4.362.142.773.034,73	4.025.755.935.861,86	92,29	3.681.465.057.398,38

Realisasi Belanja per SKPD terdapat dalam Lampiran 5.4.

5.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp2.961.618.392.686,00** dan terealisasi senilai **Rp2.786.140.573.287,86** atau **94,07%**. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp179.507.316.289,48** atau **6,89%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp2.606.633.256.998,38**. Realisasi Belanja Operasi sebagai berikut:

Tabel 5.46
Realisasi Belanja Operasi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pegawai	1.857.151.289.964,00	1.776.844.553.989,00	95,68	1.717.527.604.248,00
2	Belanja Barang dan Jasa	1.066.132.732.722,00	976.683.376.555,86	91,61	829.887.402.162,38
3	Belanja Hibah	36.201.600.000,00	31.223.382.600,00	86,25	57.515.561.814,00
4	Belanja Bantuan Sosial	2.132.770.000,00	1.389.260.143,00	65,14	1.702.688.774,00
	JUMLAH	2.961.618.392.686,00	2.786.140.573.287,86	94,07	2.606.633.256.998,38

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp1.857.151.289.964,00** dan terealisasi senilai **Rp1.776.844.553.989,00** atau **95,68%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp59.316.949.741,00** atau **3,45%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp1.717.527.604.248,00**.

Realisasi Belanja Pegawai Tidak Langsung merupakan realisasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu berupa Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai Langsung merupakan Belanja Pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya dalam bentuk

Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim, Honorarium Tenaga Ahli, dan Uang Lembur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47
Realisasi Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
A	Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung				
1	Gaji dan Tunjangan	1.284.307.902.400,00	1.255.746.165.137,00	97,78	1.235.337.669.202,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	286.231.374.000,00	243.565.602.550,00	85,09	221.945.533.662,00
3	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.573.472.000,00	9.511.200.000,00	99,35	9.385.750.000,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	10.892.547.450,00	9.605.371.766,00	88,18	8.853.246.711,00
5	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	1.441.706.300,00	1.151.723.399,00	79,89	1.105.014.635,00
	JUMLAH A	1.592.447.002.150,00	1.519.580.062.852,00	95,42	1.476.627.214.210,00
B	Belanja Pegawai – Belanja Langsung				
1	Honorarium PNS	17.777.615.000,00	15.015.774.500,00	84,46	11.902.744.100,00
2	Honorarium Non PNS	86.253.795.000,00	82.648.147.091,00	95,82	72.648.426.105,00
3	Uang Lembur	6.105.030.500,00	5.336.148.100,00	87,41	4.527.132.300,00
4	Stimulan/Hadiah Lomba/Penghargaan	-	-	-	27.500.000,00
5	Belanja Pegawai BLUD	108.779.814.566,00	108.507.084.625,00	99,75	94.337.203.776,00
6	Belanja Pegawai Dana BOS	45.788.032.748,00	45.757.336.821,00	99,93	57.457.383.757,00
	JUMLAH B	264.704.287.814,00	257.264.491.137,00	97,19	240.900.390.038,00
	JUMLAH A + B	1.857.151.289.964,00	1.776.844.553.989,00	95,68	1.717.527.604.248,00

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp1.066.132.732.722,00** dan terealisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon senilai **Rp976.683.376.555,86** atau **91,61%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp146.795.974.393,48** atau **17,69%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp829.887.402.162,38**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 5.48
Realisasi Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	38.635.447.349,00	34.208.978.417,00	88,54	30.299.078.734,00
2	Belanja Bahan/Material	43.034.566.077,00	37.224.199.948,00	86,50	26.675.932.381,00
3	Belanja Jasa Kantor	309.904.295.176,00	283.651.109.314,00	91,53	206.417.360.538,00
4	Belanja Premi Asuransi	3.258.656.545,00	1.380.774.465,00	42,37	996.144.417,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	18.909.359.321,00	16.396.466.410,00	86,71	14.348.284.105,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	32.281.735.134,00	28.562.034.620,00	88,48	24.660.693.746,00
7	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	22.660.899.000,00	20.571.867.783,00	90,78	18.168.495.500,00
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.706.521.200,00	2.318.199.000,00	85,65	2.234.940.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	206.715.100,00	196.022.700,00	94,83	15.878.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.911.398.258,00	4.479.582.100,00	91,21	5.223.407.000,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	59.637.004.200,00	53.877.573.522,00	90,34	48.976.268.474,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.558.728.120,00	2.466.566.750,00	96,40	1.652.895.100,00
13	Belanja Pakaian Kerja	2.398.066.275,00	2.377.500.700,00	99,14	2.212.872.600,00
14	Belanja Pakaian khusus dan Hari-hari tertentu	3.703.575.700,00	3.484.730.900,00	94,09	2.942.006.450,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	66.896.820.188,00	56.097.120.193,00	83,86	48.564.929.508,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	456.500.000,00	456.500.000,00	100,00	450.000.000,00
17	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.966.195.000,00	5.149.672.000,00	73,92	4.583.973.000,00
18	Belanja Pemeliharaan	66.614.013.100,00	59.101.795.655,00	88,72	31.216.658.326,00
19	Belanja Jasa Konsultasi	22.652.011.960,00	20.165.622.400,00	89,02	16.935.806.150,00
20	Belanja Stimulan dan Hadiah	352.742.000,00	316.992.000,00	89,87	308.682.000,00
21	Belanja Jasa Travel/Event Organizer	6.105.842.882,00	6.017.766.479,00	98,56	4.422.031.200,00
22	Belanja Barang Untuk Diserahkan	65.000.000,00	64.500.000,00	99,23	-
23	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan	45.814.583.340,00	41.856.136.929,00	91,36	86.727.809.462,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
24	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.203.850.400,00	11.090.664.000,00	98,99	7.467.569.800,00
25	Belanja Barang/Jasa elain Hibah dan Bantuan Sosial untuk Diserahkan	-	-	-	374.951.500,00
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	30.674.191.500,00	26.418.568.000,00	86,13	22.469.943.000,00
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	120.767.727.857,00	119.946.843.129,86	99,32	95.405.249.059,38
28	Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan	5.332.612.500,00	4.864.006.800,00	91,21	4.937.124.400,00
29	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	137.423.674.540,00	133.941.582.341,00	97,47	121.198.417.712,00
	JUMLAH	1.066.132.732.722,00	976.683.376.555,86	91,61	829.887.402.162,38

Realisasi Belanja Premi Asuransi sebesar **42,37%** disebabkan oleh belum adanya kesepakatan antara SKPD dan BPJS Kesehatan dan kurangnya sosialisasi oleh BPJS kepada SKPD mengenai asuransi bagi tenaga honorer sehingga banyak SKPD yang tidak merealisasikan belanja tersebut.

5.2.1.2.1 Belanja Bahan Habis Pakai

Belanja Bahan Habis Pakai tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp38.635.447.349,00** dan terealisasi senilai **Rp34.208.978.417,00** atau **88,54%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.909.899.683,00** atau **12,90%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp30.299.078.734,00**. Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai sebagai berikut:

Tabel 5.49
Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	14.771.611.848,00	13.344.576.020,00	90,34	12.439.573.240,00
2	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	131.354.000,00	88.300.000,00	67,22	161.940.000,00
3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.403.977.316,00	2.054.245.775,00	85,45	1.717.983.316,00
4	Belanja Perangko, Materai	523.952.000,00	461.681.500,00	88,12	390.380.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	dan Benda Pos Lainnya				
5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.349.403.468,00	1.963.469.445,00	83,57	1.976.901.389,00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.680.900.249,00	5.783.509.519,00	86,57	5.524.203.326,00
7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	280.507.500,00	209.231.000,00	74,59	126.827.500,00
8	Belanja Pengisian Tabung Gas	154.317.900,00	132.207.700,00	85,67	100.831.100,00
9	Belanja Atribut Penghargaan/Piagam/Piala/Cenderamata	975.988.100,00	959.332.800,00	98,29	816.282.500,00
10	Belanja Kit Pelatihan	7.919.565.836,00	7.739.260.136,00	97,72	6.136.963.500,00
11	Belanja Dekorasi dan Desain Interior/Ekterior	850.237.000,00	544.303.000,00	64,02	151.497.850,00
12	Belanja Kelengkapan (Aksesoris) Komputer	653.999.182,00	277.076.630,00	42,37	261.276.658,00
13	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	276.960.900,00	269.527.460,00	97,32	248.246.284,00
14	Belanja Tas/Kantung Plastik/Karung	274.367.718,00	134.201.832,00	48,91	95.485.566,00
15	Belanja Piring/Gelas/Sendok/Garpu/Nampan/Mangkok/Cangkir/Asbak	181.830.300,00	126.002.100,00	69,30	115.660.300,00
16	Belanja Bantal/Guling/Sarung Bantal/Sarung Guling/Sprei/Taplak Meja	206.474.032,00	122.053.500,00	59,11	35.026.205,00
	JUMLAH	38.635.447.349,00	34.208.978.417,00	88,54	30.299.078.734,00

Realisasi Belanja Kelengkapan (Aksesoris) sebesar **42,37%** dari anggaran, Belanja Tas/Kantung Plastik/Karung sebesar **48,91%**, Belanja Bantal/Guling/Sarung Bantal/Sarung Guling/Sprei/Taplak Meja sebesar **59,11%** disebabkan oleh SILPA JKN pada Dinas Kesehatan belum boleh dipergunakan berdasarkan radiogram Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Indonesia Nomor T.900/3976/keuda.

5.2.1.2.2 Belanja Bahan Material

Belanja Bahan Material tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp43.034.566.077,00** dan terealisasi senilai **Rp37.224.199.948,00** atau **86,50%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp10.548.267.567,00** atau **39,54%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp26.675.932.381,00**. Realisasi Belanja Bahan Material sebagai berikut:

Tabel 5.50
Realisasi Belanja Bahan Material

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bahan Baku Bangunan	6.705.842.613,00	6.399.438.175,00	95,43	2.798.363.158,00
2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	577.231.500,00	477.421.500,00	82,71	713.088.000,00
3	Belanja Bibit Ternak	88.580.000,00	88.580.000,00	100,00	216.755.900,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	20.895.448.259,00	16.679.337.204,00	79,82	12.941.820.866,00
5	Belanja Bahan Kimia	1.512.029.616,00	1.391.918.700,00	92,06	1.065.390.500,00
6	Belanja Material Fasilitas Pameran/Stand	439.000.000,00	420.803.000,00	95,85	322.594.000,00
7	Belanja Material Dokumentasi/Film/Kaset/VC D/DVD	180.202.453,00	112.034.900,00	62,17	131.469.900,00
8	Belanja Bahan/Material Praktek	7.839.037.936,00	7.169.570.569,00	91,46	3.855.217.887,00
9	Belanja Bahan/Material Penerangan Jalan, Rambu Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.833.000.000,00	2.606.401.000,00	92,00	2.347.147.970,00
10	Belanja Bahan Penutup Reklame	-	-	-	40.500.000,00
11	Belanja Bahan/Material Perbengkelan	247.012.800,00	243.391.000,00	98,53	300.235.000,00
12	Belanja Pakan Hewan / Ternak	356.233.200,00	325.091.900,00	91,26	203.143.925,00
13	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok	262.000.000,00	260.786.900,00	99,54	774.825.000,00
14	Belanja Bahan/Material untuk Budidaya dan Pasca Panen	781.047.600,00	775.475.100,00	99,29	133.655.000,00
15	Belanja Bahan/Material Lainnya	40.000.000,00	35.000.000,00	87,50	387.552.400,00
16	Belanja Bahan dan Alat Praktek Sekolah Lapang Komoditi Pertanian/Perkebunan	78.580.100,00	78.580.000,00	100,00	33.150.000,00
17	Belanja Papan Nama/Nomenklatur	124.320.000,00	113.570.000,00	91,35	7.642.875,00
18	Belanja Patok	75.000.000,00	46.800.000,00	62,40	403.380.000,00
	JUMLAH	43.034.566.077,00	37.224.199.948,00	86,50	26.675.932.381,00

5.2.1.2.3 Belanja Jasa Kantor

Belanja Jasa Kantor tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp309.904.295.176,00** dan terealisasi senilai **Rp283.651.109.314,00** atau **91,53%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp77.233.748.776,00** atau **37,42%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai

Rp206.417.360.538,00. Realisasi Belanja Jasa Kantor sebagai berikut:

Tabel 5.51
Realisasi Belanja Jasa Kantor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Telepon	1.105.430.000,00	476.163.136,00	43,07	434.475.511,00
2	Belanja Air	1.478.384.800,00	990.190.227,00	66,98	674.451.010,00
3	Belanja Listrik	41.806.402.270,00	37.142.213.500,00	88,84	35.251.730.156,00
4	Belanja Surat Kabar/Majalah	2.051.610.200,00	1.884.155.750,00	91,84	1.798.135.900,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.815.516.000,00	3.186.806.373,00	83,52	3.106.781.478,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	6.800.000,00	3.726.500,00	54,80	2.241.000,00
7	Belanja Sertifikasi	803.050.500,00	360.992.609,00	44,95	457.622.180,00
8	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	11.808.000,00	3.240.000,00	27,44	3.420.000,00
9	Belanja Jasa Dokumentasi	299.938.500,00	237.901.000,00	79,32	154.000.000,00
10	Belanja Jasa Publikasi	8.848.727.060,00	8.445.395.109,00	95,44	7.750.127.900,00
11	Belanja Jasa Dekorasi Ruang/Gedung Kantor	1.494.189.200,00	1.475.275.000,00	98,73	1.429.175.000,00
12	Belanja Jasa Pengolahan Data Perkantoran	201.040.000,00	137.940.000,00	68,61	204.650.000,00
13	Belanja Jasa Pengarsipan	116.336.300,00	114.900.000,00	98,77	252.550.000,00
14	Belanja Jasa Kesehatan	229.376.242.531,00	212.457.379.729,00	92,62	143.135.297.911,00
15	Belanja Pajak	174.896.950,00	165.076.664,00	94,39	149.032.437,00
16	Belanja Gas Alam	2.400.000,00	1.000.040,00	41,67	454.860,00
17	Belanja Jasa Uji Laboratorium	514.440.000,00	510.701.000,00	99,27	375.663.000,00
18	Belanja Jasa Administrasi Penanganan Perkara	15.000.000,00	4.500.000,00	30,00	12.550.000,00
19	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	5.000.000,00	-	-	7.297.720,00
20	Belanja Jasa Upah Tukang/Mandor/Juru Laden/Petugas Kebersihan	13.528.485.000,00	13.051.202.000,00	96,47	8.279.462.000,00
21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis	431.474.865,00	119.380.176,00	27,67	101.367.475,00
22	Belanja Jasa Profesi	73.752.500,00	10.752.500,00	14,58	28.200.000,00
23	Belanja Jasa Kebersihan	2.223.983.700,00	1.979.750.001,00	89,02	1.883.085.000,00
24	Belanja Jasa Pengamanan	1.499.230.800,00	884.195.000,00	58,98	925.590.000,00
25	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	20.156.000,00	8.273.000,00	41,04	-
	JUMLAH	309.904.295.176,00	283.651.109.314,00	91,53	206.417.360.538,00

Realisasi Belanja Telepon sebesar **43,07%** disebabkan oleh pemakaian telepon sebagian besar hanya untuk menerima panggilan.

Realisasi Belanja Sertifikasi sebesar **44,95%** disebabkan oleh SILPA JKN pada Dinas Kesehatan belum boleh

dipergunakan berdasarkan radiogram Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Indonesia Nomor T.900/3976/keuda untuk jasa kalibrasi alat-alat kesehatan. Realisasi Belanja Transaksi Keuangan sebesar **27,44%** disebabkan oleh penganggaran dalam rangka mengantisipasi terjadinya kenaikan biaya administrasi kliring.

Realisasi Belanja Gas Alam sebesar **41,67%** disebabkan oleh adanya rumah jabatan Kepala Daerah dan rumah jabatan Wakil Kepala Daerah tidak ditempati.

Realisasi Belanja Jasa Administrasi Penanganan Perkara sebesar **30,00%** disebabkan oleh pihak Pemerintah Daerah sebagai tergugat, sehingga biaya administrasi penanganan perkara rendah.

Realisasi Belanja Jasa Pengukuran Tanah sebesar **0,00%** disebabkan oleh harga tanah untuk air bersih di Desa Cangkring melebihi anggaran yang disediakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Realisasi Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis sebesar **27,67%** dan Belanja Jasa Pengangkutan Sampah **41,04%** disebabkan oleh SILPA JKN pada Dinas Kesehatan belum boleh dipergunakan berdasarkan radiogram Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Indonesia Nomor T.900/3976/keuda.

Realisasi Belanja Jasa Profesi sebesar **14,58%** disebabkan oleh kegiatan pengendalian kebisingan dan gangguan dari masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam penurunan baliho atau spanduk tidak memakai pihak ketiga.

5.2.1.2.4 Belanja Premi Asuransi

Belanja Premi Asuransi tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp3.258.656.545,00** dan terealisasi senilai **Rp1.380.774.465,00** atau **42,37%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp384.630.048,00** atau **38,61%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp996.144.417,00**. Realisasi Belanja Premi Asuransi sebagai berikut:

Tabel 5.52
Realisasi Belanja Premi Asuransi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Premi Asuransi	1.867.858.228,00	360.630.500,00	19,31	-

	Kesehatan				
2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.148.585.159,00	999.911.442,00	87,06	996.144.417,00
3	Belanja Premi Asuransi Jiwa	242.213.158,00	20.232.523,00	8,35	-
	JUMLAH	3.258.656.545,00	1.380.774.465,00	42,37	996.144.417,00

Realisasi Belanja Premi Asuransi Kesehatan sebesar **19,31%** dan Belanja Premi Asuransi Jiwa sebesar **8,35%** disebabkan oleh belum adanya kesepakatan antara SKPD dan BPJS Kesehatan dan kurangnya sosialisasi oleh BPJS kepada SKPD mengenai asuransi bagi tenaga honorer sehingga banyak SKPD yang tidak merealisasikan belanja tersebut.

5.2.1.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp18.909.359.321,00** dan terealisasi senilai **Rp16.396.466.410,00** atau **86,71%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp2.048.182.305,00** atau **14,27%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp14.348.284.105,00**. Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

Tabel 5.53
Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Service	2.780.358.500,00	2.408.588.503,00	86,63	1.315.467.454,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.612.598.541,00	4.131.917.414,00	89,58	3.528.944.608,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.242.344.450,00	8.998.223.193,00	87,85	8.802.561.493,00
4	Belanja Jasa KIR	26.800.000,00	11.845.200,00	44,20	13.670.200,00
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.247.257.830,00	845.892.100,00	67,82	687.640.350,00
	JUMLAH	18.909.359.321,00	16.396.466.410,00	86,71	14.348.284.105,00

Belanja Jasa KIR terealisasi senilai **44,20%** dari anggaran dikarenakan beberapa SKPD seperti Dinas Perhubungan yang beberapa pemilik kendaraan tidak bersedia melakukan perpanjangan KIR, dan Dinas Sosial dimana dari empat kendaraan yang memiliki KIR, hanya satu mobil yang terealisasi dikarenakan tiga mobil harus mengurus perpanjangan KIR di Dinas Perhubungan Jakarta.

5.2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan

Belanja Cetak dan Penggandaan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp32.281.735.134,00** dan terealisasi senilai **Rp28.562.034.620,00** atau **88,48%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.901.340.874,00** atau **15,82%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp24.660.693.746,00**. Realisasi Belanja Cetak dan Penggandaan sebagai berikut:

Tabel 5.54
Realisasi Belanja Cetak Dan Penggandaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Cetak	25.586.595.470,00	22.798.898.506,00	89,10	19.351.125.117,00
2	Belanja Penggandaan	5.055.007.424,00	4.377.646.657,00	86,60	4.380.548.003,00
3	Belanja Penjilidan	1.101.515.100,00	859.180.447,00	78,00	809.952.026,00
4	Cetak Buku, Majalah, Profil	450.948.900,00	449.063.900,00	99,58	82.288.500,00
5	Belanja Cetak Foto	87.668.240,00	77.245.110,00	88,11	36.780.100,00
	JUMLAH	32.281.735.134,00	28.562.034.620,00	88,48	24.660.693.746,00

5.2.1.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp22.660.899.000,00** dan terealisasi senilai **Rp20.571.867.783,00** atau **90,78%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp2.403.372.283,00** atau **13,23%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp18.168.495.500,00**. Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir sebagai berikut:

Tabel 5.55
Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	46.000.000,00
2	Belanja Sewa Gedung/ Kantor/Tempat	9.360.971.800,00	8.646.349.701,00	92,37	7.241.337.500,00
3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	10.782.737.200,00	9.999.088.600,00	92,73	8.054.927.000,00
4	Belanja Sewa Tempat Parkir/Ruang Tambat/ Hanggar Sarana Mobilitas	16.280.000,00	1.280.000,00	7,86	-
5	Belanja Sewa Kamar Hotel	2.484.910.000,00	1.909.149.482,00	76,83	2.584.231.000,00
6	Belanja Sewa Tanah/Lahan	-	-	-	242.000.000,00
	JUMLAH	22.660.899.000,00	20.571.867.783,00	90,78	18.168.495.500,00

Realisasi Belanja Belanja Sewa Tempat Parkir/Ruang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas sebesar **7,86%** disebabkan oleh SILPA JKN pada Dinas Kesehatan belum boleh dipergunakan berdasarkan radiogram Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Indonesia Nomor T.900/3976/keuda.

5.2.1.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Sewa Sarana Mobilitas tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp2.706.521.200,00** dan terealisasi senilai **Rp2.318.199.000,00** atau **85,65%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp83.259.000,00** atau **3,73%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp2.234.940.000,00**. Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas sebagai berikut:

Tabel 5.56
Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.703.521.200,00	2.315.199.000,00	85,64	2.200.800.000,00
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Air	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	-
3	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	-	-	-	34.140.000,00
	JUMLAH	2.706.521.200,00	2.318.199.000,00	85,65	2.234.940.000,00

5.2.1.2.9 Belanja Sewa Alat Berat

Belanja Sewa Alat Berat tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp206.715.100,00** dan terealisasi senilai **Rp196.022.700,00** atau **94,83%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp180.144.700,00** atau **1.134,56%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp15.878.000,00**. Realisasi Belanja Sewa Alat Berat sebagai berikut:

Tabel 5.57
Realisasi Belanja Sewa Alat Berat

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Eskavator	55.244.400,00	47.052.000,00	85,17	-
2	Belanja Sewa Buldoser	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	-
3	Belanja Sewa Dump Truck	20.892.000,00	18.392.000,00	88,03	15.878.000,00
4	Belanja Sewa Alat Lainnya	80.578.700,00	80.578.700,00	100,00	-
	JUMLAH	206.715.100,00	196.022.700,00	94,83	15.878.000,00

5.2.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp4.911.398.258,00** dan terealisasi senilai **Rp4.479.582.100,00** atau **91,21%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp743.824.900,00** atau **14,24%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp5.223.407.000,00**. Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor sebagai berikut:

Tabel 5.58
Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Meja Kursi	642.531.400,00	597.423.900,00	92,98	886.178.200,00
2	Belanja Sewa Proyektor	68.000.000,00	49.860.000,00	73,32	12.600.000,00
3	Belanja Sewa Generator	306.135.050,00	178.723.800,00	58,38	278.105.300,00
4	Belanja Sewa Tenda/Panggung	2.102.242.300,00	1.937.288.300,00	92,15	2.318.464.600,00
5	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	28.000.000,00	23.500.000,00	83,93	18.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Teknologi Tepat Guna	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	9.600.000,00
7	Belanja Sewa Sound System	1.513.034.800,00	1.450.504.800,00	95,87	1.530.297.800,00
8	Belanja Sewa Peralatan Outbound	-	-	-	24.116.100,00
9	Belanja Sewa Peralatan Praktek/Perbengkelan	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	-
10	Belanja Sewa Alat Musik	44.000.000,00	43.800.000,00	99,55	38.000.000,00
11	Belanja Sewa Peralatan Studio	11.834.308,00	11.800.000,00	99,71	4.000.000,00
12	Belanja Sewa Alat-alat Laboratorium	34.650.000,00	33.790.900,00	97,52	-
13	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Acara Pembukaan/Penutupan	69.170.400,00	61.090.400,00	88,32	300.000,00
14	Belanja Sewa Peralatan & Perlengkapan Lainnya	36.000.000,00	36.000.000,00	100,00	103.745.000,00
	JUMLAH	4.911.398.258,00	4.479.582.100,00	91,21	5.223.407.000,00

5.2.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

Belanja Makanan dan Minuman tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp59.637.004.200,00** dan terealisasi senilai **Rp53.877.573.522,00** atau **90,34%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp4.901.305.048,00** atau **10,01%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai

Rp48.976.268.474,00. Realisasi Belanja Makanan dan Minuman sebagai berikut:

Tabel 5.59
Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	2.010.688.600,00	1.876.269.313,00	93,31	1.408.306.290,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.901.270.000,00	26.874.909.759,00	86,97	24.457.038.004,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	5.167.540.600,00	4.797.251.480,00	92,83	4.406.504.280,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	13.507.809.000,00	13.001.075.370,00	96,25	12.906.931.800,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	138.470.000,00	128.852.000,00	93,05	18.864.000,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Atlet/Panti/Balita	7.911.226.000,00	7.199.215.600,00	91,00	5.778.624.100,00
	Jumlah	59.637.004.200,00	53.877.573.522,00	90,34	48.976.268.474,00

5.2.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributya

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp2.558.728.120,00** dan terealisasi senilai **Rp2.466.566.750,00** atau **96,40%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp813.671.650,00** atau **49,23%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp1.652.895.100,00**. Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributya sebagai berikut:

Tabel 5.60
Realisasi Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	256.850.000,00	212.300.000,00	82,66	190.950.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	217.650.000,00	216.794.000,00	99,61	223.500.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	291.224.000,00	288.446.000,00	99,05	188.400.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	1.585.855.620,00	1.543.494.250,00	97,33	906.670.100,00
5	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	161.200.000,00	159.650.000,00	99,04	115.450.000,00
6	Belanja Atribut Pakaian	45.948.500,00	45.882.500,00	99,86	8.325.000,00
7	Belanja Pakaian Dinas Lainnya	-	-	-	19.600.000,00
	JUMLAH	2.558.728.120,00	2.466.566.750,00	96,40	1.652.895.100,00

5.2.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja

Belanja Pakaian Kerja tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp2.398.066.275,00** dan terealisasi senilai **Rp2.377.500.700,00** atau **99,14%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp164.628.100,00** atau **7,44%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp2.212.872.600,00**. Realisasi Belanja Pakaian Kerja sebagai berikut:

Tabel 5.61
Realisasi Belanja Pakaian Kerja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	2.128.753.400,00	2.109.620.700,00	99,10	1.856.414.950,00
2	Belanja Pakaian Seragam	183.687.500,00	182.604.000,00	99,41	25.700.000,00
3	Belanja Topi Lapangan	10.855.000,00	10.530.000,00	97,01	23.952.250,00
4	Belanja Sepatu Lapangan	74.770.375,00	74.746.000,00	99,97	306.805.400,00
	JUMLAH	2.398.066.275,00	2.377.500.700,00	99,14	2.212.872.600,00

5.2.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu dianggarkan senilai **Rp3.703.575.700,00** dan terealisasi senilai **Rp3.484.730.900,00** atau **94,09%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp542.724.450,00** atau **18,45%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp2.942.006.450,00**. Realisasi Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu sebagai berikut:

Tabel 5.62
Realisasi Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pakaian KORPRI	90.200.000,00	85.166.000,00	94,42	4.420.000,00
2	Belanja Pakaian Adat Daerah	336.100.000,00	334.922.000,00	99,65	236.399.500,00
3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	862.244.900,00	840.992.500,00	97,54	590.819.500,00
4	Belanja Pakaian Olahraga	2.268.766.800,00	2.080.374.000,00	91,70	1.892.760.850,00
5	Belanja Pakaian Pasien dan Tenaga Medis	146.264.000,00	143.276.400,00	97,96	115.231.600,00
6	Belanja Pakaian Drumband	-	-	-	102.375.000,00
	JUMLAH	3.703.575.700,00	3.484.730.900,00	94,09	2.942.006.450,00

5.2.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp66.896.820.188,00** dan terealisasi senilai **Rp56.097.120.193,00** atau **83,86%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp7.532.190.685,00** atau **15,51%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp48.564.929.508,00**. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Tabel 5.63
Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	34.238.931.331,00	26.904.969.600,00	78,58	23.026.975.800,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	32.657.888.857,00	29.192.150.593,00	89,39	25.537.953.708,00
	JUMLAH	66.896.820.188,00	56.097.120.193,00	83,86	48.564.929.508,00

5.2.1.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Belanja Beasiswa Pendidikan PNS tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp456.500.000,00** dan terealisasi senilai **Rp456.500.000,00** atau **100,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp6.500.000,00** atau **1,44%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp450.000.000,00**. Realisasi Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagai berikut:

Tabel 5.64
Realisasi Beasiswa Pendidikan PNS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	134.000.000,00	134.000.000,00	100,00	166.000.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	322.500.000,00	322.500.000,00	100,00	284.000.000,00
	JUMLAH	456.500.000,00	456.500.000,00	100,00	450.000.000,00

5.2.1.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp6.966.195.000,00** dan terealisasi senilai **Rp5.149.672.000,00** atau **73,92%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai

Rp565.699.000,00 atau **12,34%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp4.583.973.000,00**. Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS sebagai berikut:

Tabel 5.65
Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	6.096.895.000,00	4.533.372.000,00	74,36	3.836.563.000,00
2	Belanja Sosialisasi	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	273.185.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	864.500.000,00	611.500.000,00	70,73	474.225.000,00
	JUMLAH	6.966.195.000,00	5.149.672.000,00	73,92	4.583.973.000,00

5.2.1.2.18 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp66.614.013.100,00** dan terealisasi senilai **Rp59.101.795.655,00** atau **88,72%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp27.885.137.329,00** atau **89,33%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp31.216.658.326,00**. Realisasi Belanja Pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 5.66
Realisasi Belanja Pemeliharaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan	37.776.350.000,00	36.057.136.519,00	95,45	12.736.823.310,00
2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	2.016.000.000,00	1.348.193.000,00	66,87	394.637.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor	15.176.272.224,00	12.032.784.471,00	79,29	8.753.787.934,00
4	Belanja Penggantian Suku Cadang	768.042.000,00	761.987.000,00	99,21	434.812.000,00
5	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.045.884.428,00	2.121.043.136,00	69,64	1.832.957.136,00
6	Belanja Pemeliharaan Saluran Air	1.710.000.000,00	1.614.991.000,00	94,44	1.880.573.000,00
7	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	1.132.600.000,00	1.082.847.000,00	95,61	1.060.535.000,00
8	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	64.625.000,00	51.935.530,00	80,36	25.657.623,00
9	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	2.445.531.140,00	1.952.580.517,00	79,84	1.336.196.862,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
10	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	531.940.000,00	528.461.500,00	99,35	634.583.800,00
11	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat-alat Bengkel	78.331.000,00	68.167.000,00	87,02	17.194.900,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	49.350.000,00	49.350.000,00	100,00	37.300.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	5.565.800,00	5.515.800,00	99,10	8.692.950,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	341.671.498,00	103.511.522,00	30,30	63.878.926,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	88.118.500,00	72.035.000,00	81,75	91.565.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS/TPA)	351.476.850,00	331.107.000,00	94,20	741.696.000,00
17	Belanja Pemeliharaan/Service	1.032.254.660,00	920.149.660,00	89,14	1.165.766.885,00
	JUMLAH	66.614.013.100,00	59.101.795.655,00	88,72	31.216.658.326,00

Realisasi Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran sebesar **30,30%** disebabkan oleh SILPA JKN pada Dinas Kesehatan belum boleh dipergunakan berdasarkan radiogram Dirjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri Indonesia Nomor T.900/3976/keuda.

5.2.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi

Belanja Jasa Konsultansi tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp22.652.011.960,00** dan terealisasi senilai **Rp20.165.622.400,00** atau **89,02%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.229.816.250,00** atau **19,07%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp16.935.806.150,00**. Realisasi Belanja Jasa Konsultansi sebagai berikut:

Tabel 5.67
Realisasi Belanja Jasa Konsultansi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	2.618.306.900,00	2.284.466.000,00	87,25	3.200.645.600,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	16.627.281.060,00	14.777.389.400,00	88,87	11.006.090.550,00
3	Belanja Jasa Konsultansi Sistem Informasi Manajemen	1.193.630.000,00	1.069.484.000,00	89,60	1.392.956.000,00
4	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem	1.517.794.000,00	1.450.830.000,00	95,59	824.260.000,00

	Informasi				
5	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal	695.000.000,00	583.453.000,00	83,95	511.854.000,00
	JUMLAH	22.652.011.960,00	20.165.622.400,00	89,02	16.935.806.150,00

5.2.1.2.20 Belanja Stimulan dan Hadiah

Belanja Stimulan dan Hadiah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp352.742.000,00** dan terealisasi senilai **Rp316.992.000,00** atau **89,87%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp8.310.000,00** atau **2,69%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp308.682.000,00**. Realisasi Belanja Stimulan dan hadiah sebagai berikut:

Tabel 5.68
Realisasi Belanja Stimulan dan Hadiah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hadiah dalam Bentuk Uang	273.000.000,00	237.250.000,00	86,90	157.750.000,00
2	Belanja Hadiah dalam Bentuk Barang	-	-	-	149.390.000,00
3	Belanja Stimulan dalam Bentuk Barang	79.742.000,00	79.742.000,00	100,00	1.542.000,00
	JUMLAH	352.742.000,00	316.992.000,00	89,87	308.682.000,00

5.2.1.2.21 Belanja Jasa Travel/Event Organizer

Belanja Jasa Travel/Event Organizer tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp6.105.842.882,00** dan terealisasi senilai **Rp6.017.766.479,00** atau **98,56%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.595.735.279,00** atau **36,09%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp4.422.031.200,00**. Realisasi Belanja Jasa Travel/Event Organizer sebagai berikut:

Tabel 5.69
Realisasi Belanja Jasa Travel/Event Organizer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Travel	-	-	-	123.660.000,00
2	Belanja Jasa Event Organizer	6.105.842.882,00	6.017.766.479,00	98,56	4.298.371.200,00
	JUMLAH	6.105.842.882,00	6.017.766.479,00	98,56	4.422.031.200,00

5.2.1.2.22 Belanja Barang Untuk Diserahkan

Belanja Barang Untuk Diserahkan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp65.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp64.500.000,00** atau **99,23%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp64.500.000,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp0,00**. Rincian realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan sebagai berikut:

Tabel 5.70
Realisasi Belanja Barang Untuk Diserahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Barang Untuk Diserahkan	65.000.000,00	64.500.000,00	99,23	-
	JUMLAH	65.000.000,00	64.500.000,00	99,23	-

5.2.1.2.23 Belanja Hibah Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan

Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp45.814.583.340,00** dan terealisasi senilai **Rp41.856.136.929,00** atau senilai **91,36%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp44.871.672.533,00** atau **51,74%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp86.727.809.462,00**. Realisasi Belanja Hibah Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan sebagai berikut:

Tabel 5.71
Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	45.814.583.340,00	41.856.136.929,00	91,36	86.727.809.462,00
	JUMLAH	45.814.583.340,00	41.856.136.929,00	91,36	86.727.809.462,00

Rincian realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.72
Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pendidikan	3.403.750.000,00	-	-	-
2	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	33.033.300.000,00	33.024.017.000,00	99,97	62.749.995.234,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
3	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	9.522.350.778,00
4	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	125.000.000,00	124.659.000,00	99,73	384.186.000,00
5	Dinas Pertanian	5.065.673.090,00	4.619.303.929,00	91,19	10.269.699.450,00
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	1.077.500.000,00	1.071.400.000,00	99,43	575.678.000,00
7	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	3.008.360.250,00	2.915.757.000,00	96,92	3.225.900.000,00
8	Kecamatan Sumber	101.000.000,00	101.000.000,00	100,00	-
	JUMLAH	45.814.583.340,00	41.856.136.929,00	91,36	86.727.809.462,00

Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan sebesar **0,00%** pada Dinas Pendidikan disebabkan oleh juknis dan ketentuan tata cara penyaluran belanja tersebut dari Pemerintah Provinsi diperoleh pada akhir tahun anggaran sehingga tidak memungkinkan dilaksanakan proses lelang dengan waktu yang sangat singkat.

5.2.1.2.24 Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp11.203.850.400,00** dan terealisasi senilai **Rp11.090.664.000,00** atau **98,99%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.623.094.200,00** atau **48,52%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp7.467.569.800,00**. Realisasi Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebagai berikut:

Tabel 5.73
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	11.203.850.400,00	11.090.664.000,00	98,99	7.467.569.800,00
	JUMLH	11.203.850.400,00	11.090.664.000,00	98,99	7.467.569.800,00

5.2.1.2.25 Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan

Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp0,00** dan terealisasi senilai **Rp0,00** atau **0,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp374.951.500,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp374.951.500,00**. Realisasi Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan sebagai berikut:

Tabel 5.74
Realisasi Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	374.951.500,00
	JUMLAH	-	-	-	374.951.500,00

5.2.1.2.26 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp30.674.191.500,00** dan terealisasi senilai **Rp26.418.568.000,00** atau **86,13%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp3.948.625.000,00** atau **17,57%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp22.469.943.000,00**. Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber sebagai berikut:

Tabel 5.75
Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber PNS	13.645.616.500,00	11.496.974.000,00	84,25	10.840.001.500,00
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber Non PNS	17.028.575.000,00	14.921.594.000,00	87,63	11.629.941.500,00
	JUMLAH	30.674.191.500,00	26.418.568.000,00	86,13	22.469.943.000,00

5.2.1.2.27 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp120.767.727.857,00** dan terealisasi senilai

Rp119.946.843.129,86 atau **99,32%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp24.541.594.070,48** atau **25,72%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp95.405.249.059,38**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.76
Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
A	RSUD ARJAWINANGUN				
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	59.781.845.268,00	59.187.607.974,86	99,01	44.658.178.035,38
B	RSUD WALED				
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.985.882.589,00	60.759.235.155,00	99,63	50.747.071.024,00
	JUMLAH	120.767.727.857,00	119.946.843.129,86	99,32	95.405.249.059,38

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per BLUD terdapat dalam Lampiran 5.5.

5.2.1.2.28 Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan

Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp5.332.612.500,00** dan terealisasi senilai **Rp4.864.006.800,00** atau **91,21%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp73.117.600,00** atau **1,48%** jika dibandingkan dengan tahun 2018 senilai **Rp4.937.124.400,00**. Realisasi Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan sebagai berikut:

Tabel 5.77
Realisasi Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hadiah Lomba	4.475.512.500,00	4.057.477.800,00	90,66	4.387.809.400,00
2	Belanja Penghargaan	857.100.000,00	806.529.000,00	94,10	549.315.000,00
	JUMLAH	5.332.612.500,00	4.864.006.800,00	91,21	4.937.124.400,00

5.2.1.2.29 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Belanja Barang dan Jasa Dana BOS tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp137.423.674.540,00** dan terealisasi senilai **Rp133.941.582.341,00** atau **97,47%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp12.743.164.629,00** atau **10,51%** jika

dibandingkan dengan tahun 2018 senilai **Rp121.198.417.712,00**. Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 5.78
Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	137.423.674.540,00	133.941.582.341,00	97,47	121.198.417.712,00
	JUMLAH	137.423.674.540,00	133.941.582.341,00	97,47	121.198.417.712,00

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS terdapat dalam Lampiran 5.6.

5.2.1.3 Belanja Hibah

Belanja Hibah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp36.201.600.000,00** dan terealisasi senilai **Rp31.223.382.600,00** atau **86,25%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja hibah pada PPKD mengalami penurunan senilai **Rp26.292.179.214,00** atau **45,71%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp57.515.561.814,00**.

Belanja hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.79
Realisasi Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hibah pada PPKD Untuk Pemerintah Pusat	-	-	-	23.647.185.470,00
2	Belanja Hibah pada PPKD Untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	4.155.000.000,00	4.076.550.000,00	98,11	16.273.376.344,00
3	BOP PAUD Masyarakat/Swasta di Kab. Cirebon	19.067.100.000,00	18.786.900.000,00	98,53	17.595.000.000,00
4	BOP Pendidikan Kesetaraan di Kab. Cirebon	12.979.500.000,00	8.359.932.600,00	64,41	-
	JUMLAH	36.201.600.000,00	31.223.382.600,00	86,25	57.515.561.814,00

5.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp2.132.770.000,00** dan terealisasi senilai **Rp1.389.260.143,00** atau **65,14%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi Belanja Bantuan Sosial tersebut mengalami penurunan senilai **Rp313.428.631,00** atau **18,41%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp1.702.688.774,00**.

Belanja Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.80
Realisasi Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Sosial pada PPKD untuk Individu dan atau Keluarga	2.132.770.000,00	1.389.260.143,00	65,14	1.702.688.774,00
	JUMLAH	2.132.770.000,00	1.389.260.143,00	65,14	1.702.688.774,00

5.2.2 Belanja Modal

Belanja Modal tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp681.046.742.437,00** dan terealisasi senilai **Rp587.833.779.153,00** atau **86,31%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp76.909.838.691,00** atau **15,05%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp510.923.940.462,00**. Realisasi Belanja Modal sebagai berikut:

Tabel 5.81
Realisasi Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Tanah	16.448.252.800,00	7.355.693.793,00	44,72	8.435.062.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	166.938.810.547,00	123.053.357.908,00	73,71	88.822.429.289,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	210.799.918.436,00	193.588.871.113,00	91,84	130.132.103.447,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	257.356.803.139,00	235.134.118.886,00	91,37	252.384.857.989,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	29.502.957.515,00	28.701.737.453,00	97,28	25.918.284.042,00
6	Belanja Modal BLUD	-	-	-	5.231.203.695,00
	JUMLAH	681.046.742.437,00	587.833.779.153,00	86,31	510.923.940.462,00

5.2.2.1 Belanja Tanah

Belanja Tanah tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp16.448.252.800,00**. dan terealisasi senilai **Rp7.355.693.793,00** atau senilai **44,72%** dari

anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp1.079.368.207,00** atau **12,80%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp8.435.062.000,00**. Realisasi Belanja Tanah sebagai berikut:

Tabel 5.82
Rincian Realisasi Belanja Tanah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit	-	-	-	3.915.000.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah	6.181.750.000,00	48.881.000,00	0,79	-
3	Belanja Modal Pengadaan Tanah Jalan/Pengairan	-	-	-	1.654.874.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Tinggi	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	2.865.188.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Air Minum/Air Bersih	10.246.502.800,00	7.286.812.793,00	71,12	-
	JUMLAH	16.448.252.800,00	7.355.693.793,00	44,72	8.435.062.000,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Umum Tempat Pembuangan Akhir Sampah sebesar **0,79%** disebabkan oleh adanya penolakan dari warga Desa Cigobangwangi sehingga yang dapat direalisasikan hanya untuk belanja jasa konsultasi pada kegiatan di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

5.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp166.938.810.547,00** dan terealisasi senilai **Rp123.053.357.908,00** atau **73,71%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp34.230.928.619,00** atau **38,54%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp88.822.429.289,00**. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 5.83
Realisasi Belanja Peralatan Dan Mesin

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	9.061.910.400,00	3.328.641.750,00	36,73	4.234.088.622,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	19.686.712.100,00	17.469.541.520,00	88,74	8.582.273.846,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	5.350.474.000,00	5.041.126.000,00	94,22	667.804.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Bermotor	60.800.000,00	57.185.000,00	94,05	-
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	165.000.000,00	153.750.000,00	93,18	50.800.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	587.877.600,00	554.152.236,00	94,26	752.713.100,00
7	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	600.018.900,00	461.923.900,00	76,98	1.417.797.000,00
8	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	3.190.759.766,00	2.181.989.390,00	68,38	1.695.179.100,00
9	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	7.665.206.378,00	4.270.126.698,00	55,71	5.013.502.294,00
10	Belanja Modal Pengadaan Komputer	23.758.980.306,00	20.395.902.723,00	85,85	9.943.227.411,00
11	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.815.223.680,00	6.977.720.447,00	64,52	8.483.721.624,00
12	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	550.926.900,00	357.496.370,00	64,89	333.624.322,00
13	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	2.073.282.014,00	1.290.299.036,00	62,23	827.027.267,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	4.389.663.904,00	3.418.240.290,00	77,87	1.883.536.616,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.004.109.010,00	1.052.201.202,00	52,50	2.105.696.677,00
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	609.612.320,00	555.648.000,00	91,15	243.386.000,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	41.899.306.224,00	33.732.152.619,00	80,51	26.506.281.685,00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	7.131.465.562,00	5.409.220.770,00	75,85	7.496.875.077,00
19	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	12.544.000,00	11.730.000,00	93,51	42.050.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	27.324.937.483,00	16.334.309.957,00	59,78	8.542.844.648,00
	JUMLAH	166.938.810.547,00	123.053.357.908,00	73,71	88.822.429.289,00

Realisasi Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat sebesar **36,73%** disebabkan oleh adanya perubahan data pada *e-catalog* untuk pengadaan genset yang pada saat perencanaan tersedia namun pada saat pelaksanaan tidak tersedia pada kegiatan di RSUD Waled.

5.2.2.3 Belanja Gedung dan Jaringan

Belanja Gedung dan Bangunan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp210.799.918.436,00** dan terealisasi senilai **Rp193.588.871.113,00** atau **91,84%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp63.456.767.666,00** atau **48,76%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp130.132.103.447,00**. Realisasi Belanja Gedung dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.84
Realisasi Belanja Gedung Dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor	23.574.662.097,00	17.785.849.354,00	75,44	54.440.675.383,00
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Rumah Dinas	791.900.000,00	767.284.000,00	96,89	1.843.062.229,00
3	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Gudang	746.710.000,00	714.470.000,00	95,68	747.471.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Bersejarah	-	-	-	215.125.000,00
5	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan Monumen	89.029.000,00	88.016.000,00	98,86	1.053.625.000,00
6	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	86.159.175.000,00	81.391.163.000,00	94,47	3.020.792.883,00
7	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung	19.109.327.074,00	16.714.964.994,00	87,47	14.293.686.719,00
8	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Perpustakaan	700.000.000,00	529.247.000,00	75,61	1.435.980.000,00
9	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Taman Kanak-Kanak	749.537.100,00	748.487.100,00	99,86	569.360.000,00
10	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sekolah Dasar/ Sederajat	39.118.200.000,00	37.889.608.345,00	96,86	21.620.173.634,00
11	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung SMP/Sederajat	12.880.949.000,00	12.524.870.643,00	97,24	3.507.115.000,00
12	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Terminal	206.282.000,00	196.097.000,00	95,06	148.925.000,00
13	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Tempat Pelelangan	529.101.700,00	521.760.700,00	98,61	793.742.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Ikan				
14	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Pasar	13.433.082.000,00	12.645.918.585,00	94,14	15.969.724.000,00
15	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pusat Perdagangan	226.000.000,00	224.935.000,00	99,53	69.519.000,00
16	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Taman	4.930.713.865,00	4.710.338.469,00	95,53	2.253.889.000,00
17	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Pusat Hiburan Rakyat	964.170.000,00	853.358.000,00	88,51	1.094.649.000,00
18	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Ibadah	-	-	-	122.200.000,00
19	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Sarana Olahraga	-	-	-	368.338.000,00
21	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Halte	215.800.000,00	208.847.000,00	96,78	170.952.000,00
22	Belanja Modal Pemagaran	3.266.624.000,00	2.940.432.485,00	90,01	5.761.851.599,00
23	Belanja Modal Pembangunan Tempat/Halaman Parkir	660.655.600,00	632.756.094,00	95,78	564.067.000,00
24	Belanja Pendukung Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	67.180.000,00
25	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.448.000.000,00	1.500.467.344,00	61,29	-
	JUMLAH	210.799.918.436,00	193.588.871.113,00	91,84	130.132.103.447,00

5.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp257.356.803.139,00** dan terealisasi senilai **Rp235.134.118.886,00** atau **91,37%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp17.250.739.103,00** atau **6,84%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp252.384.857.989,00**. Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 5.85
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	123.421.845.006,00	108.334.260.792,00	87,78	140.468.972.854,00
2	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan	32.276.427.521,00	31.961.601.229,00	99,02	16.913.625.444,00
3	Belanja Modal Pengadaan	87.536.636.839,00	83.425.308.448,00	95,30	82.103.968.008,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Konstruksi Jaringan Air				
4	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	13.017.200.000,00	10.990.798.428,00	84,43	11.857.650.275,00
5	Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpon dan Air	1.104.693.773,00	422.149.989,00	38,21	1.040.641.408,00
	JUMLAH	257.356.803.139,00	235.134.118.886,00	91,37	252.384.857.989,00

5.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp29.502.957.515,00** dan terealisasi senilai **Rp28.701.737.453,00** atau senilai **97,28%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp2.783.453.411,00** atau **10,74%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp25.918.284.042,00**. Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 5.86
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	6.474.000.000,00	6.297.582.413,00	97,27	725.581.215,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	191.663.000,00	141.575.000,00	73,87	229.277.000,00
3	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	426.500.000,00	413.280.000,00	96,90	20.000.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	30.000.000,00	2.065.000,00	6,88	-
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	22.380.794.515,00	21.847.235.040,00	97,62	24.943.425.827,00
	JUMLAH	29.502.957.515,00	28.701.737.453,00	97,28	25.918.284.042,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD sebesar **6,88%** disebabkan oleh tercukupinya kebutuhan informasi melalui media lain.

5.2.2.6 Belanja Modal BLUD

Belanja Modal BLUD tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp0,00** dan terealisasi senilai **Rp0,00** atau **0,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp5.231.203.695,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp5.231.203.695,00**. Realisasi Belanja Modal BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.87
Realisasi Belanja Modal BLUD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal BLUD	-	-	-	5.231.203.695,00
	JUMLAH	-	-	-	5.231.203.695,00

Pada tahun 2019 Belanja Modal BLUD telah digabungkan ke dalam Belanja Modal Peralatan dan Mesin dan Aset Tetap Lainnya pada Belanja Modal APBD.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp58.197.288.511,73** dan terealisasi senilai **Rp0,00** atau **0,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp2.610.109.700,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp2.610.109.700,00**. Realisasi Belanja Tidak Terduga sebagai berikut:

Tabel 5.88
Realisasi Belanja Tidak Terduga

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Tidak Teduga	58.197.288.511,73	-	-	2.610.109.700,00
	JUMLAH	58.197.288.511,73	-	-	2.610.109.700,00

Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar **0,00%** disebabkan oleh tidak ada kejadian yang bersifat tidak biasa dan tidak berulang.

5.3 Belanja Transfer

Belanja Transfer tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp661.280.349.400,00** dan terealisasi senilai **Rp651.781.583.421,00** atau **98,56%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp90.483.833.183,00** atau **16,12%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp561.297.750.238,00**. Realisasi Belanja Transfer sebagai berikut:

Tabel 5.89
Realisasi Belanja Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	25.019.859.000,00	20.433.532.671,00	81,67	19.112.397.591,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	636.260.490.400,00	631.348.050.750,00	99,23	542.185.352.647,00
	JUMLAH	661.280.349.400,00	651.781.583.421,00	98,56	561.297.750.238,00

5.3.1 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp25.019.859.000,00** dan terealisasi senilai **Rp20.433.532.671,00** atau **81,67%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.321.135.080,00** atau **6,91%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp19.112.397.591,00**. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebagai berikut:

Tabel 5.90
Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	20.850.000.000,00	17.562.112.671,00	84,23	15.723.897.591,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	4.169.859.000,00	2.871.420.000,00	68,86	3.388.500.000,00
	JUMLAH	25.019.859.000,00	20.433.532.671,00	81,67	19.112.397.591,00

Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp636.260.490.400,00** dan terealisasi senilai **Rp631.348.050.750,00** atau **99,23%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp89.162.698.103,00** atau **16,45%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp542.185.352.647,00**. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.91
Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	634.765.362.400,00	630.351.298.750,00	99,30	540.690.225.520,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.495.128.000,00	996.752.000,00	66,67	1.495.127.127,00
	JUMLAH	636.260.490.400,00	631.348.050.750,00	99,23	542.185.352.647,00

Belanja Bantuan Keuangan merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan

pemerintah daerah. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa				
a	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	634.765.362.400,00	630.351.298.750,00	99,30	540.690.225.520,00
	JUMLAH	634.765.362.400,00	630.351.298.750,00	99,30	540.690.225.520,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
a	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	333.379.500,00	222.253.000,00	66,67	333.379.500,00
b	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	132.160.500,00	88.107.000,00	66,67	132.160.500,00
c	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	263.665.500,00	175.777.000,00	66,67	263.664.627,00
d	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	131.448.000,00	87.632.000,00	66,67	131.448.000,00
e	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	153.241.500,00	102.161.000,00	66,67	153.241.500,00
f	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	111.918.000,00	74.612.000,00	66,67	111.918.000,00
g	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	174.264.000,00	116.176.000,00	66,67	174.264.000,00
h	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	27.841.500,00	18.561.000,00	66,67	27.841.500,00
i	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	117.085.500,00	78.057.000,00	66,67	117.085.500,00
j	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	50.124.000,00	33.416.000,00	66,67	50.124.000,00
	JUMLAH	1.495.128.000,00	996.752.000,00	66,67	1.495.127.127,00
	JUMLAH KESELURUHAN	636.260.490.400,00	631.348.050.750,00	99,23	542.185.352.647,00

5.4 Pembiayaan

Pembiayaan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp294.258.084.652,73** dan terealisasi senilai **Rp300.120.443.501,73** atau **101,99%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami kenaikan senilai **Rp1.665.568.090,22** atau **0,56%** jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp298.454.875.411,51**. Realisasi Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.93
Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penerimaan Pembiayaan	309.058.084.652,73	321.620.443.501,73	104,06	323.853.186.330,51
2	Pengeluaran Pembiayaan	14.800.000.000,00	21.500.000.000,00	145,27	25.398.310.919,00
	JUMLAH	294.258.084.652,73	300.120.443.501,73	101,99	298.454.875.411,51

5.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp309.058.084.652,73** dan terealisasi senilai **Rp321.620.443.501,73** atau **104,06%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp2.232.742.828,78** atau **0,69%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp323.853.186.330,51**. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.94
Realisasi Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penggunaan SiLPA	300.058.084.652,73	300.120.443.501,73	100,02	303.997.017.037,51
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	56.169.293,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	9.000.000.000,00	21.500.000.000,00	238,89	19.800.000.000,00
	JUMLAH	309.058.084.652,73	321.620.443.501,73	104,06	323.853.186.330,51

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah senilai **Rp21.500.000.000,00** merupakan pinjaman RSUD Waled kepada Bank BJB cabang Sumber Cirebon sebagai dana talangan karena adanya keterlambatan pembayaran dari pihak BPJS.

5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2019 dianggarkan senilai **Rp14.800.000.000,00** dan terealisasi senilai **Rp21.500.000.000,00** atau **145,27%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.898.310.919,00** atau **15,35%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 senilai **Rp25.398.310.919,00**. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 5.95
Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2019 (Rp)	REALISASI 2019		REALISASI 2018 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.800.000.000,00	-	-	4.772.881.700,00
2	Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga	9.000.000.000,00	21.500.000.000,00	238,89	20.625.429.219,00
	JUMLAH	14.800.000.000,00	21.500.000.000,00	145,27	25.398.310.919,00

5.3.3 Perhitungan Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2019 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai **Rp288.834.438.356,06** merupakan hasil perhitungan dari:

- Realisasi Pendapatan TA. 2019	Rp	4.014.469.930.716,19
- Realisasi Belanja TA. 2019	Rp	4.025.755.935.861,86
Defisit (I)	Rp	(11.286.005.145,67)
- Penerimaan Daerah dari Pembiayaan	Rp	321.620.443.501,73
- Pengeluaran Daerah dari Pembiayaan	Rp	41.140.564.248,00
- Saldo Akhir Kas di BOS	Rp	21.500.000.000,00
Pembiayaan Netto (II)	Rp	300.120.443.501,73
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (I+II)	Rp	288.834.438.356,06

5.3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berjalan senilai **Rp288.834.438.356,06** merupakan hasil perhitungan dari:

- Saldo Kas di Kas Daerah	Rp	215.722.795.407,00
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	-
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	23.529.000,00
- Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD	Rp	21.514.650.258,06
- Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	Rp	41.140.564.248,00
- Saldo Akhir Kas di BOS	Rp	10.432.899.443,00
JUMLAH	Rp	288.834.438.356,06

SiLPA senilai **Rp288.834.438.356,06** terdiri dari SILPA atas dana-dana spesifik senilai **Rp134.499.511.743,06** dengan rincian sebagai berikut:

- DAK Non Fisik	Rp	36.926.212.801,00
- DAK Fisik	Rp	10.214.345.222,00
- DBHCHT	Rp	-
- Dana Insentif Daerah	Rp	768.977.140,00
- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	13.501.862.631,00
- SILPA BLUD	Rp	21.514.650.258,06

- SILPA JKN Rp 41.140.564.248,00
- SILPA Dana BOS Rp 10.432.899.443,00

Sisanya senilai **Rp154.334.926.613,00** merupakan SiLPA yang penganggarannya tidak diatur secara spesifik.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai **Rp300.120.443.501,73** merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember Tahun 2018.

6.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai **Rp300.120.443.501,73** merupakan SiLPA tahun 2018 yang digunakan untuk pembiayaan tahun 2019.

6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai **Rp288.834.438.356,06** merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Total Penerimaan tahun 2019 adalah senilai **Rp4.014.469.930.716,19** dikurangi dengan jumlah belanja **Rp3.373.974.352.440,86** dikurangi dengan jumlah transfer **Rp651.781.583.421,00** serta ditambah dengan pembiayaan senilai **Rp300.120.443.501,73**.

6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya senilai **Rp0,00**.

6.5 Lain-Lain

Lain-lain senilai **Rp0,00**.

6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2019 senilai **Rp288.834.438.356,06**.

BAB VII

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN NERACA

7.1 Aset

7.1.1 Aset Lancar

7.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2019 senilai **Rp215.722.795.407,00** dan saldo per 31 Desember 2018 senilai **Rp255.823.706.505,00**. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dikelola pada Bank BJB Cabang Sumber. Saldo Kas tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo Buku Kas Umum Harian BUD Kabupaten Cirebon dengan Rekening Koran Bank BJB Cabang Sumber per 31 Desember 2019. Kas di Kas Daerah sebagai berikut:

Tabel 7.1
Kas di Kas Daerah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018 AUDITED
1	Rekening No.0008753148001/Kas umum	215.722.795.407,00	255.823.706.505,00
2	Rekening No.0008753032001/Kas Penerimaan	199.717,00	-
	JUMLAH	215.722.795.407,00	255.823.706.505,00

Saldo Kas di Kas Daerah senilai **Rp215.722.795.407,00** terdiri dari SiLPA atas dana-dana spesifik senilai **Rp61.411.397.794,00** dengan rincian sebagai berikut:

-	DAK Non Fisik	Rp	36.926.212.801,00
-	DAK Fisik	Rp	10.214.345.222,00
-	Dana Insentif Daerah	Rp	768.977.140,00
-	Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	13.501.862.631,00

Sisanya senilai **Rp154.311.397.613,00** merupakan SiLPA yang penganggarannya tidak diatur secara spesifik.

7.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 senilai **Rp240.283.177,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp612,00**. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Cirebon yang masih berada pada Bendahara

Pengeluaran berupa sisa dana kegiatan yang belum disetor ke Kas Daerah senilai **Rp23.529.000,00** adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Sumber : **Rp 2.200.000,00**
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah : **Rp 21.329.000,00**

Serta pajak belum disetor senilai **Rp216.754.177,00** dengan rincian per SKPD sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan : **Rp 2.983.325,00**
- Kecamatan Klangeran : **Rp 1.372.800,00**
- Kecamatan Pangenan : **Rp 634.440,00**
- Kecamatan Pabelilan : **Rp 6.743.499,00**
- Kecamatan Kaliwedi : **Rp 7.646.657,00**
- Badan Kesatuan Bangsa : **Rp197.289.456,00**
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah : **Rp 84.000,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran per SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.2
Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Dinas Pendidikan	2.983.325,00	-
2	Kecamatan Pabelilan	6.743.499,00	-
3	Kecamatan Sedong	-	612,00
4	Kecamatan Pangenan	634.440,00	-
5	Kecamatan Sumber	2.200.000,00	-
6	Kecamatan Klangeran	1.372.800,00	-
7	Kecamatan Kaliwedi	7.646.657,00	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21.413.000,00	-
9	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	197.289.456,00	-
	JUMLAH	240.283.177,00	612,00

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Sumber senilai **Rp2.200.000,00** telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 24 Januari 2020 dengan STS No : 01/UP/KEC. SUMBER/2020.

Kas di Bendahara Pengeluaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai **Rp21.329.000,00** telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 6 Januari 2020 dengan STS No : 001/STS-UP-BPBD/2020.

Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD atas pajak yang belum disetor sampai dengan tanggal 20 Maret 2020 adalah senilai **Rp197.289.456,00** terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri. Sisanya telah disetorkan ke Kas Negara.

7.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2019 senilai **Rp0,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.508.000,00**. Saldo

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah. Kas di Bendahara Penerimaan per SKPD sebagai berikut:

Tabel 7.3
Kas di Bendahara Penerimaan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Dinas Kesehatan	-	1.508.000,00
	JUMLAH	-	1.508.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan senilai **Rp1.508.000,00** telah disetorkan ke kas daerah pada tanggal 2 Januari 2019 dengan STS No: 00001/STS/PKM LOSARI/2018 senilai **Rp627.000,00**; tanggal 2 Januari 2019 dengan STS No: 00001A/STS/PKM SUMBER/2018 senilai **Rp769.000,00**; dan tanggal 3 Januari 2019 dengan STS No: 00001B/STS/PKM KALIBUNTU/2018 senilai **Rp112.000,00**.

7.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2019 senilai **Rp21.514.650.258,06** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp7.616.393.726,73**. Kas di Bendahara BLUD sebagai berikut:

Tabel 7.4
Kas di Bendahara BLUD

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	RSUD Arjawinangun	10.253.183.162,06	3.616.595.259,00
2	RSUD Waled	11.261.467.096,00	3.999.798.467,73
	JUMLAH	21.514.650.258,06	7.616.393.726,73

7.1.1.5 Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2019 senilai **Rp41.140.564.248,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp33.997.037.726,00**. Perhitungan Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5
Perhitungan Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	SILPA 2018	33.997.037.726,00
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Tahun 2019	97.377.918.425,00
2	Pendapatan Atas Pengembalian Belanja Tahun 2018	35.243.772,00
3	Belanja Tahun 2019	(90.269.635.675,00)
	SILPA 2019	41.140.564.248,00

Terdapat penerimaan kas pada JKN senilai **Rp35.243.772,00** merupakan pengembalian belanja JKN tahun 2018 atas temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon. Rincian kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per puskesmas terdapat dalam Lampiran 7.1.

7.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2019 senilai **Rp10.432.899.443,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp2.681.796.932,00**. Perhitungan Kas di Bendahara Dana BOS sebagai berikut:

Tabel 7.6
Perhitungan Kas di Bendahara Dana BOS

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	SILPA 2018	2.681.796.932,00
1	Pendapatan Tahun 2019	221.895.600.000
2	Belanja Tahun 2019	(214.092.787.802)
3	Penyetoran Jasa Giro Tahun 2018	(51.709.687,00)
	SILPA 2019	10.432.899.443,00

Kas di Bendahara Dana BOS adalah sebagai berikut:

Tabel 7.7
Kas di Bendahara Dana BOS

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Kas di Bendahara Dana BOS	
1	Kas Tunai	3.631.995.919,00
2	Kas di Bank	6.800.903.524,00
	JUMLAH	10.432.899.443,00

7.1.1.7 Piutang Pajak

7.1.1.7.1 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2019 senilai **Rp78.393.726.958,50** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp70.285.713.117,50**. Piutang Pajak sebagai berikut:

Tabel 7.8
Piutang Pajak Daerah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Pajak Hotel	1.044.750,00	1.044.750,00
2	Pajak Restoran	117.828.823,00	151.275.638,00
3	Pajak Hiburan	1.761.000,00	44.496.521,00

Tabel 7.8
Piutang Pajak Daerah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
4	Pajak Reklame	564.077.921,00	470.914.733,00
5	Pajak Penerangan Jalan	179.400,00	179.400,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam	177.098.211,50	190.030.488,50
7	Pajak Parkir	247.203.500,00	283.870.514,00
8	Pajak Air Tanah	216.049,00	1.654.699,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	5.700.000,00	5.700.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	77.278.617.304,00	69.136.546.374,00
	JUMLAH	78.393.726.958,50	70.285.713.117,50

Piutang Pajak Daerah terendah adalah Pajak Penerangan Jalan senilai **Rp179.400,00** dan Piutang Pajak Daerah tertinggi adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) senilai **Rp77.278.617.304,00**.

7.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Pajak

Penyisihan Piutang Pajak Daerah tahun 2019 senilai **(Rp43.622.599.944,23)** merupakan penyisihan piutang pajak tak tertagih untuk tahun 2019. Rincian Penyisihan Piutang Pajak terdapat dalam Lampiran 7.2.

7.1.1.7.3 Piutang Pajak Netto

Piutang Pajak Netto tahun 2019 senilai **Rp34.771.127.014,28** merupakan selisih dari Piutang Pajak dengan Penyisihan Piutang Pajak.

7.1.1.8 Piutang Retribusi

7.1.1.8.1 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2019 senilai **Rp2.882.423.000,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp5.423.706.000,00**. Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 7.9
Piutang Retribusi

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Dinas Kesehatan	2.830.988.000,00	5.397.816.000,00
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	51.435.000,00	25.890.000,00
	JUMLAH	2.882.423.000,00	5.423.706.000,00

Piutang Retribusi senilai **Rp2.830.988.000,00** pada Dinas Kesehatan merupakan pendapatan atas jasa pelayanan

kesehatan yang belum diterima pembayarannya berupa klaim Dana Non Kapitasi pada BPJS senilai **Rp2.828.788.000,00** dan PT Indocement senilai **Rp2.200.000,00**.

Klaim Dana Non Kapitasi pada BPJS senilai **Rp2.828.788.000,00** merupakan angka klaim bulan Oktober 2019 senilai **Rp989.217.000,00**, November 2019 senilai **Rp928.636.000,00** dan Desember 2019 senilai **Rp910.935.000,00**.

Piutang Retribusi senilai **Rp51.435.000,00** pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan pendapatan retribusi pelayanan pasar pada Pasar Batik Weru senilai **Rp46.635.000,00** dan Pasar Sumber senilai **Rp4.800.000,00** yang belum diterima per 31 Desember 2019.

7.1.1.8.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi pada tahun 2019 adalah senilai (**Rp243.009.975,00**). Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi sebagai berikut:

Tabel 7.10
Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi

NO	WAJIB RETRIBUSI	DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL
			0,5% x PIUTANG	10% x PIUTANG	100% x PIUTANG	
1	Dinas Kesehatan					
	- 1 Tahun	913.135.000,00	4.565.675,00	-	-	4.565.675,00
	- > 1 Tahun	1.917.853.000,00	-	191.785.300,00	-	191.785.300,00
	JUMLAH	2.830.988.000,00	4.565.675,00	191.785.300,00	-	196.350.975,00
2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan					
	- 1 Tahun	4.800.000,00	24.000,00	-	-	24.000,00
	- > 1 Tahun	46.635.000,00	-	-	46.635.000,00	46.635.000,00
	JUMLAH	51.435.000,00	24.000,00	-	46.635.000,00	46.659.000,00
	JUMLAH KESELURUHAN	2.882.423.000,00	4.589.675,00	191.785.300,00	46.635.000,00	243.009.975,00

7.1.1.8.3 Piutang Pajak Netto

Piutang Retribusi Netto per 31 Desember 2019 senilai **Rp2.639.413.025,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp5.396.587.470,00** merupakan selisih dari Piutang Retribusi dengan Penyisihan Piutang Retribusi.

7.1.1.9 Piutang BLUD

7.1.1.9.1 Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2019 senilai **Rp59.267.828.827,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp66.702.865.278,00**. Saldo Piutang BLUD merupakan Piutang Jamkesda dan Piutang JKN yang terdapat di RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled. Piutang BLUD sebagai berikut:

Tabel 7.11
Rincian Piutang BLUD

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
A	RSUD Arjawinangun		
1	Piutang JKN	29.836.578.605,00	29.222.514.600,00
2	Jamkesda	1.032.004.700,00	1.353.184.100,00
3	Piutang Pihak ketiga	485.509.151,00	141.703.635,00
	JUMLAH A	31.354.092.456,00	30.717.402.335,00
B	RSUD Waled		
1	Piutang JKN	28.208.700.947,00	36.688.135.651,00
2	Jamkesda	940.778.356,00	573.950.800,00
3	Piutang Pihak ketiga	737.040.124,00	650.511.392,00
	JUMLAH B	29.886.519.427,00	37.912.597.843,00
	JUMLAH A+B	61.240.611.883,00	68.630.000.178,00
	Jamkesda Dinas Kesehatan	(1.972.783.056,00)	(1.927.134.900,00)
	JUMLAH	59.267.828.827,00	66.702.865.278,00

Piutang Jamkesda senilai **Rp1.972.783.056,00** merupakan tagihan RSUD kepada Dinas Kesehatan, pada laporan keuangan konsolidasi tidak disajikan dengan mengeliminasi utang belanja jasa Dinas Kesehatan dengan nilai yang sama.

7.1.1.9.2 Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang BLUD per 31 Desember tahun 2019 senilai **(Rp568.700.890,97)** dan per 31 Desember 2018 senilai **(Rp343.150.000,91)**. Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD sebagai berikut:

Tabel 7.12
Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD

NO	SKPD	DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG		
			0,5% x PIUTANG	10% x PIUTANG	TOTAL
1	RSUD Arjawinangun				
	- 1 Tahun	28.905.900.430,00	144.529.502,15	-	144.529.502,15
	- > 1 Tahun	2.933.701.177,00	-	244.819.202,60	244.819.202,60
	JUMLAH	31.839.601.607,00	144.529.502,15	244.819.202,60	389.348.704,75

2	RSUD WALED				
	- 1 Tahun	29.571.576.384,00	147.857.881,92	-	147.857.881,92
	- > 1 Tahun	320.501.743,00	-	31.494.304,30	31.494.304,30
	JUMLAH	29.892.078.127,00	147.857.881,92	31.494.304,30	179.352.186,22
	JUMLAH KESELURUHAN	61.731.679.734,00	292.387.384,07	276.313.506,90	568.700.890,97

7.1.1.9.3 Piutang BLUD Netto

Piutang BLUD Netto per 31 Desember 2019 senilai **Rp58.699.127.936,03** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp66.359.715.277,09** merupakan selisih antara Piutang BLUD dengan Penyisihan Piutang BLUD.

7.1.1.10 Piutang Transfer

7.1.1.10.1 Piutang Transfer

Piutang Transfer per 31 Desember 2019 senilai **Rp55.667.233.746,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp27.961.010.349,00**. Piutang Transfer merupakan pengakuan kurang bayar pendapatan transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Pengakuan nilai piutang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 serta tata cara penyelesaiannya. Piutang Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.13
Piutang Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019
1	TRANSFER PUSAT	
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	12.811.281.106,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO	207.812.203,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	1.695.789.213,00
	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Umum - LO	1.223.114.769,00
	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO	156.806.060,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO	2.704.523.308,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO	340.322.620,00
	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO	30.273.665,00
	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	174.305.192,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO	21.482.844.199,00
	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO	38.901.472,00
	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO	12.811.281.106,00
	JUMLAH	40.865.973.807,00

Tabel 7.13
Piutang Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019
2	TRANSFER PROVINSI	
	Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.396.313.920,00
	Dana Bagi Hasil Pajak BBNKB	3.903.287.250,00
	Dana Bagi Hasil Pajak PBBKB	7.451.254.319,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	50.404.450,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	-
	JUMLAH	14.801.259.939,00
	JUMLAH KESELURUHAN	55.667.233.746,00

Mutasi Piutang Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.14
Mutasi Piutang Transfer

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	TRANSFER PUSAT	
	Saldo 31 Desember 2018	15.871.899.192,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(15.735.722.878,00)
	Koreksi	(136.176.314,00)
	Piutang 2019	40.865.973.807,00
	Saldo 31 Desember 2019	40.865.973.807,00
2	TRANSFER PROVINSI	
	Saldo 31 Desember 2018	12.089.111.157,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(12.089.111.159,00)
	Koreksi	2,00
	Piutang 2019	14.801.259.939,00
	Saldo 31 Desember 2019	14.801.259.939,00
	JUMLAH KESELURUHAN	55.667.233.746,00

Penetapan piutang transfer yang berasal dari Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 973/Kep.205-Bappenda/2020 Tanggal 01 April 2020 tentang Kurang /Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Provinsi Jawa Barat Per 31 Desember 2019 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Penetapan piutang transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat berdasarkan :

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20/PMK.7/2020 Tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/PMK.7/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar

Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 dalam Rangka Penanganan Pandemi/ *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

7.1.1.10.2 Penyisihan Piutang Transfer

Penyisihan Piutang Transfer per 31 Desember 2019 senilai **(Rp278.336.168,74)** dan per 31 Desember 2018 senilai **(Rp139.805.051,75)**. Perhitungan Penyisihan Piutang Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.15
Perhitungan Penyisihan Piutang Transfer

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG 0,5% x PIUTANG
1	Penyisihan Piutang Transfer	55.667.233.746,00	(278.336.168,74)
	JUMLAH	55.667.233.746,00	(278.336.168,74)

7.1.1.10.3 Piutang Transfer Netto

Piutang Transfer Netto per 31 Desember 2019 senilai **Rp55.388.897.577,26** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp27.821.205.297,26**. Piutang Transfer Netto merupakan selisih antara Piutang Transfer dengan Penyisihan Piutang Transfer.

7.1.1.11 Piutang Pendapatan Lainnya

7.1.1.11.1 Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2019 senilai **Rp1.805.063.257,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp583.359.890,00**. Piutang pendapatan lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.16
Piutang Pendapatan Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	LUPEP	363.500.000,00	423.500.000,00
2	PD BPR	146.923.050,00	146.923.050,00
3	PT TASPEN	46.993.400,00	12.936.840,00
4	Piutang Bunga Deposito	21.369.864,00	-
5	Penjualan Tanah	993.583.943,00	-
6	Penjualan Kendaraan	232.693.000,00	-
	JUMLAH	1.805.063.257,00	583.359.890,00

Mutasi piutang pendapatan lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.17
Mutasi Piutang Transfer

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Piutang LUEP	
	Saldo 31 Desember 2018	423.500.000,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	60.000.000,00
	Saldo 31 Desember 2019	363.500.000,00
2	Piutang PD BPR	
	Saldo 31 Desember 2018	146.923.050,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	-
	Saldo 31 Desember 2019	146.923.050,00
3	Piutang PT TASPEN	
	Saldo 31 Desember 2018	12.936.840,00
	Piutang 2018	66.183.372,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(32.126.812,00)
	Saldo 31 Desember 2019	46.993.400,00
4	Kelebihan Bayar	
	Saldo 31 Desember 2018	-
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(185.388.500,00)
	Saldo 31 Desember 2019	-
5	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan & Jasa Giro	
	Saldo 31 Desember 2018	-
	Penerimaan Pembayaran Piutang	-
	Saldo 31 Desember 2019	-
6	Piutang Bunga Deposito	
	Saldo 31 Desember 2018	-
	Penerimaan Pembayaran Piutang	21.369.864,00
	Saldo 31 Desember 2019	21.369.864,00
7	Penjualan Tanah	
	Saldo 31 Desember 2018	-
	Piutang 2019	993.583.943,00
	Saldo 31 Desember 2019	993.583.943,00
8	Penjualan Kendaraan	
	Saldo 31 Desember 2018	-
	Piutang 2019	232.693.000,00
	Saldo 31 Desember 2019	232.693.000,00

Penjualan Tanah senilai **Rp993.583.943,00** dan Penjualan Kendaraan **Rp232.693.000,00** merupakan reklasifikasi dari Bagian Lancar Penjualan Angsuran Tanah dan Kendaraan.

Penjualan Tanah merupakan piutang tagihan yang dibebankan pada pegawai yang mendapatkan kapling tanah yang berlokasi di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, namun tidak dapat tertagih dikarenakan sebagian para pegawai tersebut mengundurkan diri dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon yang telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 030/Kep.427-PLK/2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 030/Kep.606-PLK/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Penetapan Pegawai yang mendapat kapling tanah yang berlokasi di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan cara ganti rugi.

Penjualan Kendaraan merupakan piutang tagihan kurang bayar atas penjualan kendaraan dinas. Rincian Piutang kepada PT.TASPEN terdapat dalam Lampiran 7.3.

7.1.1.11.2 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya per 31 Desember 2019 senilai **(Rp1.736.934.960,00)** dan per 31 Desember 2018 senilai **(Rp570.487.734,20)**. Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.18
Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

NO	URAIAN	DESEMBER 2019	PENYISIHAN PIUTANG			TOTAL
			0% x PIUTANG	0,5% x PIUTANG	100% x PIUTANG	
1	LUEP	363.500.000,00	-	-	363.500.000,00	363.500.000,00
2	PD BPR	146.923.050,00	-	-	146.923.050,00	146.923.050,00
3	PT TASPEN	46.993.400,00	-	234.967,00	-	234.967,00
4	Piutang Bunga Deposito	21.369.864,00	-	-	-	-
5	Penjualan Tanah	993.583.943,00	-	-	993.583.943,00	993.583.943,00
6	Penjualan Kendaraan	232.693.000,00	-	-	232.693.000,00	232.693.000,00
	JUMLAH	1.805.063.257,00	-	234.967,00	1.736.699.993,00	1.736.934.960,00

7.1.1.11.3 Piutang Pendapatan Lainnya Netto

Piutang Pendapatan Lainnya Netto pada tahun 2019 senilai **Rp68.128.297,00** merupakan selisih antara Piutang Pendapatan Lainnya dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya.

7.1.1.12 Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Saldo Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2019 senilai **Rp0,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.226.276.943,00**. Piutang Bagian Lancar Penjualan sebagai berikut:

Tabel 7.19
Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tanah	-	993.583.943,00
2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan	-	232.693.000,00
	JUMLAH	-	1.226.276.943,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tanah dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan direklasifikasi ke Piutang Pendapatan Lainnya.

7.1.1.13 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2019 senilai **Rp1.954.330.185,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.934.456.825,00**. Perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi sebagai berikut:

Tabel 7.20
Perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo 2018	1.934.456.825,00
1	Tuntutan Ganti Rugi 2019 :	39.523.360,00
	951/SKTJM/553-PAA/2019, 4 Juli 2019	14.923.360,00
	951/SKTJM/563-PAA/2019, 16 Juli 2019	9.300.000,00
	951/SKTJM/564-PAA/2019, 16 Juli 2019	9.300.000,00
	951/SKTJM/564-PAA/2019, 16 Desember 2019	6.000.000,00
2	Penerimaan 2019	(19.650.000,00)
	Tunai	(10.350.000,00)
	Barang	(9.300.000,00)
	Saldo 2019	1.954.330.185,00

Penerimaan pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi senilai **Rp19.650.000,00** terdiri atas penerimaan kas daerah senilai **Rp10.350.000,00** dan penggantian barang senilai **Rp9.300.000,00**. Rincian perkembangan penyelesaian kerugian daerah terdapat dalam Lampiran 7.4.

7.1.1.14 Biaya Dibayar Dimuka

Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2019 senilai **Rp1.513.577.708,06** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.250.825.047,46** merupakan penyesuaian atas belanja jasa dan sewa yang belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2019. Biaya Dibayar Dimuka sebagai berikut:

Tabel 7.21
Biaya Dibayar Dimuka

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018 AUDITED
	Biaya Jasa Dibayar Dimuka		
1	Asuransi Kesehatan	-	-
2	Asuransi Jiwa	-	-
3	Asuransi Kebakaran	200.241.340,00	-
4	Asuransi Lainnya	-	199.787.000,00
5	Jasa KIR	8.289.974,99	1.296.166,68
6	Pajak Kendaraan Bermotor	456.285.275,01	361.891.066,60
7	Sertifikasi	1.575.000,00	-
8	Premi Asuransi Barang Milik Daerah	456.908.335,00	459.761.230,84
	Biaya Sewa Dibayar Dimuka		
1	Gedung/Kantor/Tempat	390.277.783,06	228.089.583,34
	JUMLAH	1.513.577.708,06	1.250.825.047,46

Rincian saldo Biaya Dibayar Dimuka per SKPD disajikan dalam Lampiran 7.5.

7.1.1.15 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2019 senilai **Rp51.612.326.166,78** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp64.483.285.628,14** merupakan hasil *stock opname* Bendahara Barang SKPD dengan metode periodik sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran, penilaian dan pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Persediaan sebagai berikut:

Tabel 7.22
Persediaan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018 AUDITED
1	Persediaan Bahan Pakai Habis	3.429.398.304,82	5.201.897.003,14
2	Persediaan Bahan/Material	35.940.512.139,96	32.036.710.883,00
3	Persediaan Barang Lainnya	12.242.415.722,00	27.244.677.742,00
	JUMLAH	51.612.326.166,78	64.483.285.628,14

Rincian Persediaan per SKPD beserta jenis persediaannya terdapat dalam Lampiran 7.6.

7.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2019 senilai **Rp118.380.833.283,37** merupakan investasi yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2019 terdiri dari Investasi Non Permanen senilai

Rp14.075.000.000,00 dengan nilai bersih **Rp7.071.643.166,00** dan Investasi Permanen senilai **Rp111.309.190.117,37**.

7.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2019 senilai **Rp7.071.643.166,00** yang merupakan nilai bersih dari dana bergulir dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan tertagih. Investasi Non Permanen sebagai berikut:

Tabel 7.23
Investasi Non Permanen

NO	SEKTOR	DANA AWAL	DIRAGUKAN TERTAGIH	NILAI BERSIH DAPAT DIREALISASIKAN
1	2	3	4	5 = (3 - 4)
	Rekapitulasi Nilai Bersih Dana Bergulir			
I	Kredit Program Bantuan/KPB (Bagian Perekonomian Setda)			
1	Peternakan	2.001.000.000,00	1.206.399.805,00	794.600.195,00
2	Perkebunan	900.000.000,00	217.105.000,00	682.895.000,00
3	Pertanian	1.599.000.000,00	559.914.167,00	1.039.085.833,00
4	Perikanan	1.000.000.000,00	398.932.886,00	601.067.114,00
5	Koperasi	1.500.000.000,00	534.019.583,00	965.980.417,00
6	Indag	2.450.000.000,00	842.392.733,00	1.607.607.267,00
	JUMLAH	9.450.000.000,00	3.758.764.174,00	5.691.235.826,00
II	Dana Kredit Modal Bantuan Lunak Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Disperindag)			
1	Industri & Perdagangan	2.000.000.000,00	1.694.703.052,00	305.296.948,00
	JUMLAH	2.000.000.000,00	1.694.703.052,00	305.296.948,00
III	Dana Kredit Modal Bantuan Usaha Kecil Dan Menengah Di Sektor Koperasi & UKM (Dinas Koperasi & UKM)			
1	Koperasi/UKM	1.500.000.000,00	1.182.527.814,00	317.472.186,00
	JUMLAH	1.500.000.000,00	1.182.527.814,00	317.472.186,00
IV	Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Setda)			
1	Industri & Perdagangan	1.067.400.000,00	334.812.794,00	732.587.206,00
2	Peternakan	45.100.000,00	25.875.000,00	19.225.000,00
3	Perikanan	12.500.000,00	6.674.000,00	5.826.000,00
	JUMLAH	1.125.000.000,00	367.361.794,00	757.638.206,00
	JUMLAH KESELURUHAN	14.075.000.000,00	7.003.356.834,00	7.071.643.166,00

Perhitungan nilai bersih dari dana bergulir sebagai berikut:

- Saldo 2018 Rp14.075.000.000,00
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih (Rp7.003.356.834,00)
- Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan Rp7.071.643.166,00

7.1.2.1.1 Dana Bergulir

Dana bergulir per 31 Desember 2019 senilai **Rp14.075.000.000,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp14.075.000.000,00**. Dana Bergulir sebagai berikut:

Tabel 7.24
Dana Bergulir

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Kredit Program Bantuan /KPB (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)	9.450.000.000,00	9.450.000.000,00
2	Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
3	Dana Kredit Modal Bantuan Lunak Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4	Dana Kredit Modal Bantuan Usaha Kecil dan Menengah Di Sektor Koperasi dan UKM (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH	14.075.000.000,00	14.075.000.000,00

Dana bergulir senilai **Rp14.075.000.000,00** merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon berupa :

- Kredit Program Bantuan (KPB) yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Program Dakabalarea yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Dana kredit modal bantuan lunak pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Dana kredit modal bantuan usaha kecil dan menengah di sektor koperasi & UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi & UKM.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

7.1.2.1.2 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih sampai dengan 31 Desember 2019 senilai **Rp7.003.356.834,00** tersebut pada umumnya disebabkan oleh:

- Omset usaha yang mengalami penurunan;
- Sebagian penerima dana guliran beralih usaha;
- Penggunaan dana guliran yang tidak sesuai dengan peruntukan proposal awal;

- Sistem tanggung renteng yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian;
- Mengalami kerugian dalam usaha usaha yang kolep/bangkrut;
- Kelompok penerima kredit bubar dan tidak ada yang bertanggungjawab untuk pengembalian dana bergulirnya;
- Adanya pemahaman yang salah dari masyarakat/nasabah tentang dana bergulir, yang beranggapan bahwa dana bergulir bukan merupakan kredit yang harus dikembalikan, akan tetapi merupakan hibah dari pemerintah walaupun sudah diberikan sosialisasi;
- Tidak dapat mengelola usaha dengan baik.

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam penanganan dana bergulir/macet sebagai berikut:

- Melakukan monitoring ke nasabah dengan dibuat berita acara kunjungan yang berisi tentang kesanggupan nasabah untuk menyelesaikan dana bergulir (Kredit Macet);
- Memberikan surat teguran ke nasabah;
- Koordinasi dengan pihak BPR.

Dana Bergulir Diragukan Tertagih sebagai berikut:

Tabel 7.25
Dana Bergulir Diragukan Tertagih

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Kredit Program Bantuan/KPB (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)	3.758.764.174,00	3.860.388.574,00
2	Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah)	367.361.794,00	745.313.206,00
3	Dana Kredit Modal Bantuan Lunak Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	1.694.703.052,00	1.598.451.502,00
4	Dana Kredit Modal Bantuan Usaha Kecil Dan Menengah di Sektor Koperasi dan UKM (Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)	1.182.527.814,00	1.171.390.314,00
	JUMLAH	7.003.356.834,00	7.375.543.596,00

7.1.2.2 Investasi Permanen

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2019 senilai **Rp111.309.190.117,37** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp127.649.067.305,59**. Investasi Permanen sebagai berikut:

Tabel 7.26
Investasi Permanen

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	PT Bank Jabar Banten, Tbk.	18.175.151.700,00	18.175.151.700,00
2	PD BPR	72.728.107.264,16	88.587.215.462,96
3	PDAM Kabupaten Cirebon	20.405.931.153,21	20.886.700.142,63
	JUMLAH	111.309.190.117,37	127.649.067.305,59

7.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah

Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2019 senilai **Rp111.309.190.117,37** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp127.649.067.305,59**. Mutasi Penyertaan Modal sebagai berikut:

Tabel 7.27
Mutasi Penyertaan Modal Pemerintah

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH	
1	PT BANK JABAR BANTEN, TBK	
	Saldo 31 Desember 2018	18.175.151.700,00
	Penambahan Tahun 2019	-
	Saldo 31 Desember 2019	18.175.151.700,00
2	PD BPR	
	Saldo 31 Desember 2018	37.469.674.000,00
	Penambahan Tahun 2019	-
	Saldo 31 Desember 2018	37.469.674.000,00
3	PDAM	
	Saldo 31 Desember 2018	64.473.331.277,00
	Penambahan Tahun 2019	-
	Saldo 31 Desember 2019	64.473.331.277,00
	JUMLAH	120.118.156.977,00

Tidak terdapat penambahan penyertaan modal di tahun 2019, hal tersebut dikarenakan adanya proses merger atas 17 PD. BPR menjadi 2 PD. BPR berdasarkan:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 05 Tahun 2018 tentang penggabungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Cirebon.
2. Keputusan OJK Nomor 132/D.03/2019 tentang pemberian izin penggabungan usaha (merger) PD. BPR Beber, PD. BPR Cirebon Selatan, PD. BPR Ciwaringin, PD. BPR Gegesik, PD. BPR Kapetakan, dan PD. BPR Klungenan ke dalam PD. BPR Astanajapura.

3. Akta merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Astanajapura Nomor 10 Tahun 2019.
4. Keputusan OJK Nomor KEP-156/D.03/2019 tentang pemberian izin penggabungan usaha (merger) PD. BPR Sumber, PD. BPR Arjawinangun, PD. BPR Waled, PD. BPR Karangsembung, PD. BPR Palimanan, PD. BPR Plumbon, PD. BPR Lemahabang, PD. BPR Susukan, PD. BPR Weru, PD. BPR Cirebon Barat, dan PD. BPR Cirebon Utara ke dalam PD. BPR Babakan.
5. Akta merger Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Babakan Nomor 609 Tahun 2019.
6. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal Luar Biasa tentang Penetapan Pengurus PD. BPR Babakan (hasil merger) serta pemberhentian pengurus PD. BPR Babakan, PD. BPR Sumber, PD. BPR Arjawinangun, PD. BPR Waled, PD. BPR Karangsembung, PD. BPR Palimanan, PD. BPR Plumbon, PD. BPR Lemahabang, PD. BPR Susukan, PD. BPR Weru, PD. BPR Cirebon Barat, dan PD. BPR Cirebon Utara.

Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya (*cost methode*), karena persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon di PT Bank Jabar Banten, Tbk. kurang dari 20%.

Saldo penyertaan modal pada PD BPR dan PDAM pada Tahun 2019 dan Tahun 2018 disajikan berdasarkan metode ekuitas yang dihitung dari total ekuitas masing-masing PD BPR dan dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada PD BPR yang bersangkutan. Pada tahun 2019 nilai ekuitas PD BPR secara keseluruhan mengalami penurunan sehingga nilai investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon senilai **Rp16.339.877.188,22** atau sebesar **13%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah dan Laporan Keuangan PDAM dan PD. BPR terdapat dalam Lampiran 7.7.

7.1.3 Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2019 senilai **Rp3.928.433.010.727,88** per 31 Desember 2018 senilai **Rp3.383.925.041.979,72**. Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 7.28
Aset Tetap

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Tanah	501.381.974.209,50	481.622.553.941,50
2	Peralatan dan Mesin	914.141.459.232,59	819.075.004.802,42
3	Gedung dan Bangunan	1.713.774.986.704,72	1.618.863.081.296,30
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.253.204.498.585,58	1.980.555.642.669,58
5	Aset Tetap Lainnya	354.811.110.032,09	325.011.219.479,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	251.362.030.261,36	161.233.829.916,36
7	Akumulasi Penyusutan	(2.060.243.048.297,96)	(2.002.436.290.125,53)
	JUMLAH	3.928.433.010.727,88	3.383.925.041.979,72

Mutasi penambahan dan pengurangan Aset Tetap sebagai berikut:

ASET TETAP	SALDO 31 DESEMBER 2018	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO 31 DESEMBER 2019
Tanah	481.622.553.941,50	20.240.053.761,00	(480.633.493,00)	501.381.974.209,50
Peralatan dan Mesin	819.075.004.802,42	126.134.558.091,00	(31.068.103.660,83)	914.141.459.232,59
Gedung dan Bangunan	1.618.863.081.296,30	199.183.787.162,00	(104.271.881.753,58)	1.713.774.986.704,72
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.980.555.642.669,58	273.623.327.125,00	(974.471.209,00)	2.253.204.498.585,58
Aset Tetap Lainnya	325.011.219.479,09	29.996.908.453,00	(197.017.900,00)	354.811.110.032,09
Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.233.829.916,36	93.410.627.345,00	(3.282.427.000,00)	251.362.030.261,36
Akumulasi Penyusutan	(2.002.436.290.125,53)	(178.108.235.920,54)	120.137.189.248,11	(2.060.407.336.797,96)
JUMLAH	3.383.925.041.979,72	565.358.780.237,46	(20.850.811.489,30)	3.928.433.010.727,88

Penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap sebagai berikut:

7.1.3.1 Tanah

Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019 senilai **Rp501.381.974.209,50** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp481.622.553.941,50**. Aset Tetap Tanah per jenis sebagai berikut:

Tabel 7.29
Aset Tetap Tanah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Tanah Perkampungan	10.356.978.300,00	10.356.978.300,00
2	Tanah Pertanian	2.558.131.050,00	2.709.638.050,00
3	Tanah Perkebunan	119.960.000,00	119.960.000,00
4	Kolam Ikan	465.535.500,00	465.535.500,00
5	Tanah Untuk Bangunan Gedung	464.324.154.734,50	447.128.901.416,50
6	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	23.557.214.625,00	20.841.540.675,00
	JUMLAH	501.381.974.209,50	481.622.553.941,50

Mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut:

Tabel 7.30
Mutasi Aset Tetap Tanah

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Per 31 Desember 2018	481.622.553.941,50
	Mutasi Tambah :	20.240.053.761,00
1	Belanja Modal Tahun 2019	7.355.693.793,00
2	Hibah	10.491.384.800,00
3	Reklasifikasi	344.000.000,00
4	Koreksi Nilai	2.048.975.168,00
	Mutasi Kurang :	(480.633.493,00)
1	Reklasifikasi	(480.633.493,00)
	Saldo Per 31 Desember 2019	501.381.974.209,50

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah terdiri dari :

1. Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Tanah dari pengadaan tahun 2019 senilai **Rp7.355.693.793,00**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.8.

2. Hibah

Mutasi Aset Tetap Tanah dari hibah tahun 2019 senilai **Rp10.491.384.800,00** berupa penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019. Rincian hibah terdapat dalam Lampiran 7.8.

3. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Tanah dari reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp344.000,00** berasal dari gedung dan bangunan.

4. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Tanah dari koreksi tahun 2019 senilai **Rp2.048.975.168,00** berupa koreksi nilai pencatatan aset tetap tanah. Rincian koreksi per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.8.

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah terdiri dari :

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Tanah dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai **(Rp48.881.000,00)** ke beban jasa konsultasi perencanaan dan senilai **(Rp431.752.493,00)** ke aset lain-lain.

Mutasi antar unit terdiri dari :

Mutasi antar unit pada Aset Tetap Tanah berupa tranfer masuk senilai **Rp31.995.357.600,00** dan transfer keluar senilai **(Rp31.995.357.600,00)**.

Sehingga kenaikan nilai Aset Tetap Tanah dari **Rp481.622.553.941,50** menjadi **Rp501.381.974.209,50** berupa :

1. Tanah untuk Bangunan Air SPAM Metro Cirebon Raya yang beralamat di desa Susukan Kecamatan Susukan seluas ± 5.807 m2 senilai **Rp1.768.872.200,00**;
2. Tanah untuk Bangunan Air SPAM Metro Cirebon Raya yang beralamat di desa Penpen Kecamatan Mundu seluas ± 12.432 m2 senilai **Rp5.086.188.100,00**;
3. Tanah berupa Prasana, Sarana dan Utilitas senilai **Rp10.491.384.800,00** yang berasal dari hibah pengembang;
4. Pengurangan Tanah senilai **Rp344.000.000,00**;
5. Penambahan nilai tanah senilai **Rp20.000.000,00**;
6. Koreksi tambah nilai tanah senilai **Rp2.048.975.168,00**.

7.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 **Rp914.141.459.232,59** senilai dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp819.075.004.802,42**. Aset Tetap Peralatan dan Mesin per jenis sebagai berikut :

Tabel 7.31
Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Alat-Alat Besar Darat	27.973.429.595,00	24.337.843.295,00
2	Alat-alat Bantu	14.715.227.283,39	13.859.287.333,39
3	Alat Angkutan Darat Bermotor	187.239.718.851,15	170.249.810.152,76
4	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	8.335.732.583,99	6.645.207.719,99
5	Alat Angkut Apung Bermotor	86.785.000,00	-
6	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	547.816.500,00	96.500.000,00
7	Alat Angkut Bermotor Udara	4.350.000,00	4.350.000,00
8	Alat Bengkel Bermesin	1.559.853.064,42	1.426.570.564,42
9	Alat Bengkel Tak Bermesin	605.193.230,00	507.703.230,00
10	Alat Ukur	4.336.044.301,82	3.950.495.301,82
11	Alat Pengolahan	5.649.446.311,17	5.416.831.311,17
12	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	2.655.844.887,14	2.480.312.987,14
13	Alat Kantor	48.527.860.113,57	41.248.531.707,67
14	Alat Rumah Tangga	121.353.940.260,62	112.011.416.552,45
15	Komputer	109.729.547.479,86	90.728.997.506,69
16	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	8.054.933.373,43	7.738.264.717,21
17	Alat Studio	16.221.584.985,10	13.780.888.862,16
18	Alat Komunikasi	5.600.959.361,52	3.753.940.842,06
19	Peralatan Pemancar	160.338.453,15	160.338.453,15
20	Alat Kedokteran	278.435.452.755,26	250.421.588.632,01

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
21	Alat Kesehatan	947.161.234,00	932.161.234,00
22	Unit-Unit Laboratorium	36.128.352.833,00	34.802.897.527,33
23	Alat Peraga/Praktek Sekolah	28.913.031.542,00	28.706.984.386,00
24	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	916.715.334,00	901.715.334,00
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.155.750.153,00	2.011.375.153,00
26	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	388.776.054,00	349.276.054,00
27	Radiation Application and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	540.159.999,00	552.419.999,00
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	1.359.589.696,00	895.779.699,00
29	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	654.305.864,00	654.305.864,00
30	Senjata Api	90.454.133,00	79.471.383,00
31	Persenjataan Non Senjata Api	247.624.000,00	369.739.000,00
32	Senjata Sinar	5.480.000,00	-
	JUMLAH	914.141.459.232,59	819.075.004.802,42

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 7.32
Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Per 31 Desember 2018	819.075.004.802,42
	Mutasi Tambah :	126.134.558.091,00
1	Belanja Modal Tahun 2019	123.053.357.908,00
2	Hibah	937.834.066,00
3	Reklasifikasi	2.061.866.117,00
4	Koreksi	81.500.000,00
	Mutasi Kurang :	(31.068.103.660,83)
1	Reklasifikasi	(15.054.713.721,88)
2	Koreksi	(172.688.500,00)
3	Penghapusan	(15.840.701.438,95)
	Saldo Per 31 Desember 2019	914.141.459.232,59

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari :

1. Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari pengadaan tahun 2019 senilai **Rp123.053.357.908,00**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.9.

2. Hibah

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari hibah tahun 2019 senilai **Rp937.834.066,00** berupa penyerahan Alat-Alat Besar Darat, Alat-alat Bantu, Alat Angkutan Darat Bermotor, Alat Angkuta Apung Bermotor dan Tak Bermotor, Alat Bengkel Bermesin dan Tak Bermesin serta Alat Komunikasi dari Badan

Nasional Penanggulangan Bencana kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019.

3. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp2.061.866.117,00** berasal dari Gedung dan Bangunan.

4. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi tahun 2019 senilai **Rp81.500.000,00** berupa koreksi nilai pencatatan aset tetap Peralatan dan Mesin pada PPKD yang belum tercatat.

Mutasi kurang aset tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari :

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai (**Rp15.054.713.721,88**) terdiri dari Belanja Modal yang tidak di kapitalisasi, pengakuan pada aset selain peralatan dan mesin, dan pengakuan di tahun sebelumnya karena pembayaran utang.

2. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi keluar tahun 2019 senilai (**Rp172.688.500,00**) berupa koreksi nilai pencatatan aset tetap Peralatan dan Mesin berupa barang-barang yang nilai perolehannya dibawah kapitalisasi senilai **Rp12.688.500,00** serta barang yang sudah ada SK penghapusannya tetapi masih tercatat di KIB senilai **Rp160.000.000,00**.

3. Penghapusan

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari penghapusan tahun 2019 senilai (**Rp15.840.701.438,95**) berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 786 – BKAD/2019. Rincian penghapusan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 7.9.

Mutasi antar Unit terdiri dari :

Mutasi antar unit pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa tranfer masuk senilai **Rp3.133.272.347,78** dan transfer keluar senilai **Rp3.133.272.347,78**.

7.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 senilai **Rp1.713.774.986.704,72** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.618.863.081.296,30**. Aset Tetap Gedung dan Bangunan per jenis sebagai berikut:

Tabel 7.33
Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	1.676.498.658.923,87	1.582.743.395.515,45
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	22.933.460.000,47	22.390.139.000,47
3	Bangunan Menara	1.242.824.135,03	1.152.367.135,03
4	Bangunan Bersejarah	49.900.000,00	49.900.000,00
5	Tugu Peringatan	2.760.672.953,35	2.760.672.953,35
6	Monumen/Bangunan Bersejarah	1.591.858.080,00	1.591.858.080,00
7	Tugu Titik Kontrol/Pasti	1.915.141.478,00	1.611.641.478,00
8	Rambu-Rambu	6.782.471.134,00	6.563.107.134,00
	JUMLAH	1.713.774.986.704,72	1.618.863.081.296,30

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 7.34
Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Per 31 Desember 2018	1.618.863.081.296,30
	Mutasi Tambah :	199.183.787.162,00
1	Belanja Modal Tahun 2019	193.588.871.113,00
2	Hibah	1.844.618.750,00
3	Reklasifikasi	3.750.297.299,00
	Mutasi Kurang :	(104.271.881.753,58)
1	Reklasifikasi	(103.990.775.753,58)
2	Koreksi	(7.800.000,00)
3	Penghapusan	(273.306.000,00)
	Saldo Per 31 Desember 2019	1.713.774.986.704,72

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa :

1. Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari pengadaan tahun 2019 senilai **Rp193.588.871.113,00**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.10.

2. Hibah

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari hibah tahun 2019 senilai **Rp1.844.618.750,00** berupa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon tahun 2019. Rincian hibah terdapat dalam Lampiran 7.10.

3. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp3.750.297.299,00** berasal dari Beban

Pakai Habis senilai **Rp1.964.183.299,00**, Peralatan dan Mesin senilai **Rp90.457.000,00**, Jalan Irigasi dan Jaringan senilai **Rp145.696.000,00** serta Konstruksi dalam Pengerjaan senilai **Rp1.549.961.000,00**.

Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari :

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai (**Rp103.990.775.753,58**) ke Tanah senilai (**Rp344.000.000,00**), Peralatan dan Mesin senilai (**Rp2.285.600.766,00**), Jalan Irigasi dan Jaringan senilai (**Rp3.813.910.279,00**), Aset Tetap Lainnya senilai (**Rp452.972.000,00**), Konstruksi dalam Pengerjaan senilai (**Rp91.911.732.345,00**), Aset Lain-lain senilai (**Rp4.557.312.458,58**), dan Non Kapitalisasi senilai (**Rp625.247.905,00**).

2. Koreksi

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari koreksi kurang tahun 2019 senilai (**Rp7.800.000,00**) berupa koreksi pencatatan aset tetap Gedung dan Bangunan yang nilai perolehannya dibawah batas kapitalisasi.

3. Penghapusan

Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penghapusan tahun 2019 senilai (**Rp273.306.000,00**) berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 786 – BKAD/2019 sebagai berikut:

1. Penghapusan pagar pada Dinas Sosial senilai (**Rp99.374.000,00**), berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 709 – BKAD/2019;
2. Penghapusan berupa Gedung dan bangunan kantor pada Dinas Perdagangan dan perindustrian senilai (**Rp173.932.000,00**), berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 644–BKAD/2019.

Mutasi antar unit pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa tranfer masuk senilai **Rp5.062.135.000,00** dan transfer keluar senilai senilai (**Rp5.062.135.000,00**).

7.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 senilai **Rp2.253.204.498.585,58** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.980.555.642.669,58**. Jalan, Irigasi dan Jaringan per jenis sebagai berikut:

Tabel 7.35
Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Jalan	1.808.609.290.177,00	1.622.990.425.254,00
2	Jembatan	14.301.360.719,00	8.512.793.719,00
3	Bangunan Air Irigasi	351.018.641.103,59	290.833.401.225,59
4	Bangunan Air Pasang Surut	45.685.000,00	45.685.000,00
5	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	7.122.371.301,00	6.448.455.347,00
6	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	267.433.821,00	267.433.821,00
7	Bangunan Air Bersih/Baku	635.582.164,00	277.472.664,00
8	Bangunan Air Kotor	2.861.037.300,00	685.695.700,00
10	Instalasi Air Minum Bersih	4.889.126.288,00	4.626.586.288,00
11	Instalasi Air Kotor	6.022.557.829,00	5.066.132.829,00
12	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	760.147.000,00	760.147.000,00
13	Instalasi Pembangkit Listrik	846.255.962,00	846.255.962,00
14	Instalasi Gardu Listrik	1.991.478.111,00	1.904.934.111,00
15	Instalasi Pertahanan	10.803.723.660,66	9.131.936.160,66
16	Instalasi Gas	884.689.240,00	805.799.000,00
17	Instalasi Pengaman	198.000.000,00	198.000.000,00
18	Jaringan Air Minum	20.981.892,00	20.981.892,00
19	Jaringan Listrik	41.069.037.146,00	26.345.855.119,00
20	Jaringan Telepon	857.099.871,33	787.651.577,33
	JUMLAH	2.253.204.498.585,58	1.980.555.642.669,58

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut :

Tabel 7.36
Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Per 31 Desember 2018	1.980.555.642.669,58
	Mutasi Tambah :	273.623.327.125,00
1	Belanja Modal Tahun 2019	235.134.118.886,00
2	Hibah	15.660.049.241,00
3	Reklasifikasi	22.829.158.998,00
	Mutasi Kurang :	(974.471.209,00)
1	Reklasifikasi	(974.471.209,00)
	Saldo Per 31 Desember 2019	2.253.204.498.585,58

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

1. Belanja Modal

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari pengadaan tahun 2019 senilai **Rp235.134.118.886,00**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam lampiran 7.11.

2. Hibah

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari hibah tahun 2019 senilai **Rp15.660.049.241,00** berupa penyerahan prasarana, sarana dan utilitis perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019. Rincian hibah terdapat dalam Lampiran 7.11.

3. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp22.829.158.998,00** dari Beban Pakai Habis senilai **Rp16.401.567.499,00**, Peralatan dan Mesin senilai **Rp1.821.527.220,00**, Gedung dan Bangunan senilai **Rp3.813.910.279,00** serta Konstruksi dalam Pengerjaan senilai **Rp792.154.000,00**.

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai **(Rp913.891.076,00)** ke Gedung dan Bangunan senilai **(Rp145.696.000,00)**, Aset Lain-lain senilai **(Rp768.195.076,00)**, dan Non Kapitalisasi senilai **(Rp60.580.133,00)**.

Mutasi antar unit pada aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa tranfer masuk senilai **Rp5.784.522.800,00** dan transfer keluar senilai **(Rp5.784.522.800,00)**.

7.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar **Rp354.811.110.032,09** dan per 31 Desember tahun 2018 senilai **Rp325.004.827.479,09**. Rincian Aset Tetap Lainnya per jenis sebagai berikut:

Tabel 7.37
Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Buku	166.524.038.925,00	138.221.730.372,00
2	Terbitan	293.801.558,00	293.801.558,00
3	Barang-Barang Perpustakaan	865.737.202,00	858.021.202,00
4	Barang Bercorak Kebudayaan	3.756.530.151,00	3.132.916.151,00
5	Alat Olah Raga Lainnya	14.041.000,00	14.041.000,00
6	Hewan	413.980.000,00	700.000,00
7	Tanaman	17.383.824,00	17.383.824,00
8	Aset Tetap Renovasi	182.925.597.372,09	182.472.625.372,09
	JUMLAH	354.811.110.032,09	325.011.219.479,09

Mutasi Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.38
Mutasi Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Per 31 Desember 2018	325.011.219.479,09
	Mutasi Tambah :	29.960.108.453,00
1	Belanja Modal Tahun 2019	28.701.737.453,00
2	Reklasifikasi	1.295.171.000,00
	Mutasi Kurang :	(197.017.900,00)
1	Reklasifikasi	(36.800.000,00)
2	Penghapusan	(160.217.900,00)
	Saldo Per 31 Desember 2019	354.811.110.032,09

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

1. Pembelian

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari pengadaan tahun 2019 senilai **Rp28.701.737.453,00**. Rincian belanja modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.12.

2. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp1.295.171.000,00** dari Beban Pakai Habis senilai **Rp616.549.000,00**, Peralatan dan Mesin senilai **Rp225.650.000,00**, serta Gedung dan Bangunan senilai **Rp452.972.000,00**.

Mutasi tambah senilai **Rp29.960.108.453,00** sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan senilai **Rp28.023.516.453,00**;
2. RSUD Waled senilai **Rp620.914.000,00**;
3. Dinas pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai **Rp452.972.000,00**;
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah senilai **Rp302.696.000,00**;
5. Dinas pertanian senilai **Rp413.280.000,00**;
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah senilai **Rp24.000.000,00**;
7. Sekretariat DPRD senilai **Rp25.505.000,00**;
8. Sekretariat Daerah senilai **Rp18.750.000,00**;
9. Kecamatan Sumber senilai **Rp78.475.000,00**.

Mutasi kurang Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari pengadaan tahun 2019 yang di reklasifikasi senilai (**Rp36.800.000,00**) menjadi aset tetap peralatan dan mesin yang nilai perolehannya dibawah batas kapitalisasi.

2. Penghapusan

Mutasi Aset Tetap Lainnya dari penghapusan tahun 2019 senilai **(Rp160.217.900,00)** berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 786 – BKAD/2019 sebagai berikut:

- Satuan Polisi Pamong Praja senilai **Rp126.360.000,00**;
- Kecamatan Ciledug senilai **Rp33.857.900,00**.

Mutasi antar unit terdiri dari:

Mutasi antar unit pada Aset Tetap Aset Tetap Lainnya berupa tranfer masuk senilai **Rp68.934.400,00** dan transfer keluar senilai **(Rp68.934.400,00)**.

7.1.3.6 Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 senilai **Rp251.362.030.261,36** dan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp161.233.829.916,36**. Konstruksi dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 7.39
Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	251.362.030.261,36	161.233.829.916,36
	JUMLAH	251.362.030.261,36	161.233.829.916,36

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan sebagai berikut:

Tabel 7.40
Mutasi Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	161.233.829.916,36
	Mutasi Tambah :	93.410.627.345,00
1	Reklasifikasi	93.410.627.345,00
	Mutasi Kurang :	(3.282.427.000,00)
1	Reklasifikasi	(1.804.440.000,00)
2	Koreksi	(1.477.987.000,00)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	251.362.030.261,36

Mutasi tambah Konstruksi dalam Pengerjaan terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan dari reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp93.410.627.345,00** dari Beban Pakai Habis senilai **Rp2.083.907.000,00** dan Gedung dan Bangunan senilai **Rp91.326.720.345,00**.

Mutasi kurang Konstruksi dalam Pengerjaan terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai **(Rp1.804.440.000,00)** ke Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tidak Berwujud.

2. Koreksi

Mutasi Konstruksi dalam Pengerjaan dari koreksi tahun 2019 senilai **(Rp1.477.987.000,00)** berupa koreksi nilai pencatatan aset Konstruksi dalam Pengerjaan.

7.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 adalah **(Rp2.060.243.048.297,96)** dan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 adalah senilai **(Rp2.002.436.290.125,53)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Metode Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 7.41
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

NO	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU TAHUN 2019
1	Tanah	501.381.974.209,50	-	501.381.974.209,50
2	Peralatan dan Mesin	914.141.459.232,59	(660.850.976.478,19)	253.290.482.754,40
3	Gedung dan Bangunan	1.713.774.986.704,72	(391.834.758.424,49)	1.321.940.228.280,23
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.253.204.498.585,58	(1.007.557.313.395,28)	1.245.647.185.190,30
5	Aset Tetap Lainnya	354.811.110.032,09	-	354.811.110.032,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	251.362.030.261,36	-	251.362.030.261,36
	JUMLAH	5.988.676.059.025,84	(2.060.243.048.297,96)	3.928.433.010.727,88

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebagai berikut:

Tabel 7.42
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	(599.775.483.931,70)
	Mutasi Tambah :	(87.952.582.703,73)
1	Penyusutan Tahun 2019	(85.756.232.700,05)
2	Koreksi	(1.617.572.941,10)

Tabel 7.42
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
3	Hibah	(578.777.062,58)
	Mutasi Kurang :	26.877.090.157,24
1	Reklasifikasi	2.723.986.157,05
2	Koreksi	8.361.420.334,64
3	Penghapusan	15.791.683.665,55
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	(660.850.976.478,19)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1. Penyusutan Tahun 2019

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari perhitungan beban penyusutan tahun 2019 senilai **(Rp85.756.232.700,05)**.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **(Rp1.617.572.941,10)**.

3. Hibah

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan hibah dari Pemerintah Provinsi untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang pencatatannya melalui PPKD senilai **(Rp578.777.062,58)**.

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai **Rp2.723.986.157,05** akibat reklasifikasi aset.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **Rp8.361.420.334,64**.

3. Penghapusan

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari penghapusan aset tetap peralatan dan mesin senilai **Rp15.791.683.665,55**.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 7.43
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	(364.173.906.364,27)
	Mutasi Tambah :	(37.115.670.475,13)
1	Penyusutan Tahun 2019	(34.381.005.415,49)
2	Koreksi	(2.734.665.059,64)
	Mutasi Kurang :	9.454.818.414,91
1	Reklasifikasi	1.320.514.367,79
2	Koreksi	8.111.943.247,12
3	Penghapusan	22.360.800,00
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	(391.834.758.424,49)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1. Penyusutan Tahun 2019

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari perhitungan beban penyusutan tahun 2019 senilai **(Rp34.381.005.415,49)**.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **(Rp2.734.665.059,64)**.

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai **Rp1.320.514.367,79** akibat reklasifikasi aset.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **Rp8.111.943.247,12**.

3. Penghapusan

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan dari penghapusan aset tetap peralatan dan mesin senilai **Rp22.360.800,00**.

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 7.44
Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	(1.038.486.899.829,57)
	Mutasi Tambah :	(53.002.891.053,25)
1	Penyusutan Tahun 2019	(50.548.081.727,67)
2	Koreksi	(1.821.833.970,58)
3	Hibah	(632.975.355,00)
	Mutasi Kurang :	83.932.477.487,54
1	Koreksi	83.932.477.487,54
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	(1.007.557.313.395,28)

Mutasi tambah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

1. Penyusutan Tahun 2019

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari perhitungan beban penyusutan tahun 2019 senilai **(Rp50.548.081.727,67)**.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **(Rp1.821.833.970,58)**.

3. Hibah

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan merupakan hibah dari Pihak Swasta untuk prasarana, sarana, dan utilitas melalui PPKD senilai **(Rp632.975.355,00)**.

Mutasi kurang Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan terdiri dari:

1. Koreksi

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **Rp83.932.477.487,54**.

7.1.4 Dana Cadangan

Dana Cadangan per 31 Desember 2019 senilai **Rp0,00** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp0,00**.

7.1.5 Aset Lainnya

Aset Lainnya per 31 Desember 2019 senilai **Rp31.978.451.895,40** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp28.835.555.853,71**. Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.45
Aset Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Aset Tidak Berwujud	34.855.300.394,69	29.961.312.044,69
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(23.141.814.158,74)	(19.086.544.246,49)
3	Aset Lain-lain	30.374.787.929,80	41.917.276.483,48
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(10.109.822.270,35)	(23.956.488.427,97)
	JUMLAH	31.978.451.895,40	28.835.555.853,71

Penjelasan mutasi masing-masing Aset Lainnya sebagai berikut:

7.1.5.1 Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 senilai **Rp11.713.486.235,95** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp10.874.767.798,20**. Aset Tidak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 7.46
Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Aset Tidak Berwujud Lainnya	34.855.300.394,69	29.961.312.044,69
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(23.141.814.158,74)	(19.086.544.246,49)
	JUMLAH	11.713.486.235,95	10.874.767.798,20

Mutasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 7.47
Mutasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	29.961.312.044,69
	Mutasi Tambah :	5.528.648.350,00
1	Reklasifikasi	5.528.648.350,00
	Mutasi Kurang :	(634.660.000,00)
1	Koreksi	(634.660.000,00)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	34.855.300.394,69

Mutasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

1. Mutasi tambah Aset Tidak Berwujud merupakan reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp5.528.648.350,00** dari Beban Pakai Habis senilai **Rp2.619.096.100,00**, Peralatan dan Mesin senilai

Rp2.883.405.250,00 dan Konstruksi dalam Pengerjaan senilai **Rp26.147.000,00**.

2. Mutasi kurang Aset Tidak Berwujud merupakan koreksi tahun 2019 senilai **(Rp634.660.000,00)** berupa koreksi nilai pencatatan Aset Tidak Berwujud.

7.1.5.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 senilai **(Rp23.141.814.158,74)** dan per 31 Desember 2018 senilai **(Rp19.086.544.246,49)**.

Metode Amortisasi Aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 7.48
Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	(19.086.544.246,49)
	Mutasi Tambah :	(4.685.735.564,10)
1	Amortisasi Tahun 2019	(4.596.395.564,10)
2	Koreksi	(89.340.000,00)
	Mutasi Kurang :	630.465.651,85
1	Koreksi	630.465.651,85
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	(23.141.814.158,74)

Mutasi tambah Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

1. Amortisasi Tahun 2019

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari perhitungan beban amortisasi tahun 2019 senilai **(Rp4.596.395.564,10)**.

2. Koreksi

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **(Rp89.340.000,00)**.

Mutasi kurang Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud terdiri dari:

1. Koreksi

Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dari koreksi terhadap perhitungan akumulasi penyusutan sampai dengan tahun lalu senilai **Rp630.465.651,85**.

7.1.5.3 Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 senilai **Rp25.897.160.499,47** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp20.529.178.052,28**.

Mutasi Aset Lain-lain sebagai berikut:

Tabel 7.49
Mutasi Aset Lain-lain

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	20.529.178.052,28
	Mutasi Tambah :	7.601.686.579,19
1	Reklasifikasi	7.601.686.579,19
	Mutasi Kurang :	(2.233.704.132,00)
1	Reklasifikasi	(14.923.360,00)
2	Penghapusan	(2.218.780.772,00)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	25.897.160.499,47

Mutasi tambah Aset Lain-lain terdiri dari :

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Lain-lain dari reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp7.601.686.579,19** dari Beban Pakai Habis senilai **Rp227.265.000,00**, Tanah senilai **Rp431.752.493,00**, Peralatan dan Mesin senilai **Rp1.538.961.551,61**, Gedung dan Bangunan senilai **Rp4.549.512.458,58**, Jalan Irigasi dan Jaringan senilai **Rp768.195.076,00** dan Aset Rusak Berat senilai **Rp86.000.000,00**.

Mutasi kurang Aset Lain-lain terdiri dari :

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Lain-lain dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai **Rp14.923.360,00** ke Piutang Tuntutan Ganti Rugi.

2. Penghapusan

Mutasi Aset Lain-lain dari penghapusan tahun 2019 senilai **(Rp2.218.780.772,00)** berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 786 – BKAD/2019.

7.1.5.4 Aset Rusak Berat

Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 senilai **Rp4.477.627.430,33** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp21.388.098.431,20**.

Mutasi Aset Rusak Berat sebagai berikut:

Tabel 7.50
Mutasi Aset Rusak Berat

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Awal Per 31 Desember 2018	21.388.098.431,20
	Mutasi Tambah :	1.239.775.514,01
1	Reklasifikasi	1.239.775.514,01
	Mutasi Kurang :	(18.150.246.514,88)
1	Reklasifikasi	(14.923.360,00)
2	Penghapusan	(2.209.780.772,00)
	Saldo Akhir Per 31 Desember 2019	4.477.627.430,33

Mutasi tambah Aset Rusak Berat terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Rusak Berat dari reklasifikasi masuk tahun 2019 senilai **Rp1.239.775.514,01** dari Peralatan dan Mesin.

Mutasi kurang Aset Lain-lain terdiri dari:

1. Reklasifikasi

Mutasi Aset Lain-lain dari reklasifikasi keluar tahun 2019 senilai **(Rp14.923.360,00)** ke Aset Lain-lain.

2. Penghapusan

Mutasi Aset Lain-lain dari penghapusan tahun 2019 senilai **(Rp2.209.780.772,00)** berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 786 – BKAD/2019.

7.2 Kewajiban

7.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019 senilai **Rp57.124.263.938,59** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp75.157.759.526,12**.

7.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2019 senilai **Rp216.754.177,00** dan saldo per 31 Desember 2018 senilai **Rp0,00**. Utang Pihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

Tabel 7.51
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
	PENERIMAAN PFK	236.403.377.716,75	222.269.537.220,35
	Potongan Gaji	88.718.277.708,00	84.604.751.218,00
1	IWP 10%	-	-

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
2	TAPERUM	1.244.826.000,00	1.281.720,00
3	PPh Pasal 21 (Gaji dan LS)	2.114.454.531,00	1.294.836.083,00
4	ASKES	19.804.093.955,00	19.298.530.011,00
5	IWP 2%	47.289.638,00	38.597.500,00
6	IWP 8%	52.405.626.641,00	51.172.525.385,00
7	IWP 2% BPJS	13.101.986.943,00	12.798.980.519,00
	Pajak SP2D	133.191.665.594,00	125.253.554.488,00
1	PPh 21	64.971.331.222,00	62.453.794.955,00
2	PPh 22	2.067.072.233,00	1.655.208.925,00
3	PPh 23	820.224.970,00	503.129.220,00
4	PPh 4 (2)	9.131.265.451,00	8.481.228.155,00
5	PPN	56.201.771.718,00	52.160.193.233,00
	Pajak UP/TU	14.493.434.414,75	12.411.231.514,35
1	PPh 21	4.712.594.060,00	3.983.316.704,00
2	PPh 22	919.647.603,00	618.557.135,72
3	PPh 23	1.548.341.500,84	1.444.205.106,00
4	PPh 26	105.000,00	-
5	PPh 4 (2)	373.653.123,00	597.877.196,00
6	PPN	6.939.093.127,91	5.767.275.372,63
	PENYETORAN PFK	236.186.623.539,75	222.269.537.220,35
	Potongan Gaji	88.718.277.708,00	84.604.751.218,00
1	IWP 10%	-	-
2	TAPERUM	1.244.826.000,00	1.281.720,00
3	PPh Pasal 21 (Gaji dan LS)	2.114.454.531,00	1.294.836.083,00
4	ASKES	19.804.093.955,00	19.298.530.011,00
5	IWP 2%	47.289.638,00	38.597.500,00
6	IWP 8%	52.405.626.641,00	51.172.525.385,00
7	IWP 2% BPJS	13.101.986.943,00	12.798.980.519,00
	Pajak SP2D	133.191.665.594,00	125.253.554.488,00
1	PPh 21	64.971.331.222,00	62.453.794.955,00
2	PPh 22	2.067.072.233,00	1.655.208.925,00
3	PPh 23	820.224.970,00	503.129.220,00
4	PPh 4 (2)	9.131.265.451,00	8.481.228.155,00
5	PPN	56.201.771.718,00	52.160.193.233,00
	Pajak UP/TU	14.276.680.237,75	12.411.231.514,35
1	PPh 21	4.620.029.430,00	3.983.316.704,00
2	PPh 22	912.478.024,00	618.557.135,72
3	PPh 23	1.529.144.256,84	1.444.205.106,00
4	PPh 26	105.000,00	-
5	PPh 4 (2)	358.212.308,00	597.877.196,00
6	PPN	6.856.711.218,91	5.767.275.372,63
	Hutang Pajak	216.754.177,00	
	Pajak UP/TU	216.754.177,00	-
1	PPh 21	92.564.630,00	-
2	PPh 22	7.169.579,00	-
3	PPh 23	19.197.244,00	-
4	PPh 4 (2)	15.440.815,00	-
5	PPN	82.381.909,00	-

7.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2019 senilai **Rp2.378.629.542,21** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp2.873.536.769,83**. Pendapatan Diterima Dimuka sebagai berikut:

Tabel 7.52
Pendapatan Diterima Dimuka

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
I	RSUD WALED	22.389.500,00	60.771.500,00
	Sewa Sarana	22.389.500,00	60.771.500,00
	ATM BJB	22.389.500,00	60.771.500,00
	ATM Mandiri	-	-
II	RSUD ARJAWINANGUN	80.833.333,34	170.833.333,33
	Sewa Gedung	80.833.333,34	170.833.333,33
	BJB	20.833.333,34	70.833.333,33
	Mini Market	60.000.000,00	100.000.000,00
III	DINAS PERHUBUNGAN	455.032.366,67	462.404.583,33
	Kendaraan Bermotor	455.032.366,67	462.404.583,33
IV	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	455.760.500,00
	Retribusi Menara Telekomunikasi	-	455.760.500,00
V	PPKD	130.156.486,83	264.667.875,00
	Sewa Tanah	130.156.486,83	264.667.875,00
VI	BADAN PENGELOLAAN DAN PENDAPATAN DAERAH	1.690.217.855,37	1.459.098.978,17
	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	1.556.967.647,04	1.439.210.618,24
	Reklame Kain	16.702.500,00	2.178.360,00
	Reklame Berjalan	116.547.708,33	17.709.999,93
	TOTAL	2.378.629.542,21	2.873.536.769,83

7.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 senilai **Rp54.528.880.219,38** dan per 31 Desember 2018 senilai **Rp72.284.222.556,29**. Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

Tabel 7.53
Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Utang Belanja Pegawai	29.462.999.134,60	33.124.570.907,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	26.480.169.799,78	39.972.971.246,29
3	Utang Belanja Modal	217.621.700,00	772.942.662,00
4	Utang Kelebihan Transfer Pusat	340.872.641	340.872.641
5	Jamkesda Dinas Kesehatan	(1.972.783.056,00)	(1.927.134.900,00)
	JUMLAH	54.528.880.219,38	72.284.222.556,29

Saldo Utang Belanja Pegawai merupakan:

1. Utang jasa pelayanan Jamkesda per 31 Desember 2018 kepada RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled pada Dinas Kesehatan;
2. Utang jasa pelayanan Kesehatan pada RSUD.

Rincian Utang Belanja Pegawai per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.13.

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan kewajiban untuk membayar tagihan atas pemakaian listrik, telepon, air dan internet per 31 Desember 2019. Utang Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut:

Tabel 7.54
Utang Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Telepon	29.348.315,00
2	Air	188.855.663,00
3	Listrik	975.777.227,00
4	Kawat/Faksimili/Internet	41.588.320,00
5	Pengolahan Limbah Medis	75.506.010,00
6	Kebersihan	210.000.000,00
7	Penggandaan	3.325.800,00
8	Surat Kabar/Majalah	4.270.000,00
9	Sewa Peralatan Dan Perlengkapan	62.370.000,00
10	Jasa Kesehatan	3.974.572.556,00
11	Makanan dan Minuman Harian Pegawai	8.329.500,00
12	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	512.904.100,00
13	Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.631.500,00
14	Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Non PNS	139.860.000,00
15	Belanja Barang/Persediaan	20.209.830.808,78
	JUMLAH	26.480.169.799,78

Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.13.

Utang Belanja Modal merupakan kewajiban atas pengadaan aset peralatan dan mesin dan aset gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.55
Utang Belanja Modal

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Peralatan dan Mesin	217.621.700,00	275.972.662,00
2	Gedung dan Bangunan	-	496.970.000,00
	JUMLAH	217.621.700,00	772.942.662,00

Rincian Utang Belanja Modal per SKPD terdapat dalam Lampiran 7.13.

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer merupakan pengakuan lebih bayar pendapatan transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam tahun 2018. Pengakuan nilai utang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2017 Tahun 2017 yang terkoreksi oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018 sehingga utang kelebihan transfer pusat senilai **Rp340.872.641**. Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebagai berikut:

Tabel 7.56
Mutasi Utang Kelebihan Transfer Pusat

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Utang Kelebihan Transfer Pusat	
	Saldo 31 Desember 2017	1.887.183.115,00
	Koreksi (PMK No. 103/PMK.07/2018)	340.872.641,00
	Pemotongan Kelebihan bayar Transfer Pusat	-
	Saldo 31 Desember 2018	1.546.310.474,00
	Koreksi	-
	Pemotongan Kelebihan bayar Transfer Pusat	-
	Saldo 31 Desember 2019	1.546.310.474,00

Utang Jamkesda merupakan tagihan dari RSUD atas jasa pelayanan pada Dinas Kesehatan. Pada laporan keuangan konsolidasi tidak disajikan, dengan mengeliminasi Piutang pada RSUD dengan nilai yang sama. Utang Jamkesda sebagai berikut:

Tabel 7.57
Utang Jamkesda

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	Utang Jamkesda	1.927.783.056,00	1.927.134.900,00
	JUMLAH	1.927.783.056,00	1.927.134.900,00

7.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2019 senilai **Rp4.517.366.152.410,53** dan saldo ekuitas per 31 Desember 2018 senilai **Rp3.973.855.987.690,75**.

BAB VIII

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

8.1 Pendapatan

Pada tahun 2019 dan 2018 Pendapatan senilai **Rp3.659.360.043.395,24** dan **Rp3.406.922.115.997,22**. Pendapatan yang diakui sebagai Pendapatan tahun 2019 pada Laporan Operasional sebagai berikut:

Tabel 8.1
Pendapatan Daerah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Asli Daerah- LO	638.560.270.792,81	608.789.451.395,68	29.770.819.397,13	4,89
2	Pendapatan Transfer - LO	2.561.051.165.464,00	2.383.549.396.142,00	177.501.769.322,00	7,45
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah- LO	459.748.607.138,43	414.583.268.459,54	45.165.338.678,89	10,89
	JUMLAH	3.659.360.043.395,24	3.406.922.115.997,22	252.437.927.398,02	7,41

Rincian Pendapatan Daerah per SKPD sebagai berikut:

Tabel 8.2
Rincian Pendapatan Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dinas Pendidikan	-	14.934.903.000,00	(14.934.903.000,00)	(100,00)
2	Dinas Kesehatan	145.763.851.701,00	142.600.182.129,04	3.163.669.571,96	2,22
3	RSUD Waled	115.755.231.099,00	107.277.074.062,00	8.478.157.037,00	7,90
4	RSUD Arjawinangun	112.630.690.942,18	125.743.892.798,60	(13.113.201.856,42)	(10,43)
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	966.837.360,00	920.479.907,42	46.357.452,58	5,04
6	Dinas Pemadam Kebakaran	105.985.000,00	103.630.000,00	2.355.000,00	2,27
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	375.081.600,00	1.945.056.505,00	(1.569.974.905,00)	(80,72)
8	Dinas Lingkungan Hidup	2.197.326.150,00	2.104.962.749,50	92.363.400,50	4,39
9	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.939.700.553,00	4.851.184.480,00	(911.483.927,00)	(18,79)
10	Dinas Perhubungan	2.651.586.716,66	2.655.596.666,67	(4.009.950,01)	(0,15)
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.204.872.250,00	1.686.593.125,00	518.279.125,00	30,73
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	4.071.860.039,00	6.537.649.597,00	(2.465.789.558,00)	(37,72)

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Terpadu Satu Pintu				
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	37.550.000,00	26.102.000,00	11.448.000,00	43,86
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	149.178.500,00	148.527.476,00	651.024,00	0,44
15	Dinas Pertanian	493.622.900,00	476.289.300,00	17.333.600,00	3,64
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2.394.820.800,00	1.973.350.256,00	421.470.544,00	21,36
17	PPKD	3.044.023.749.665,60	2.775.981.926.086,08	268.041.823.579,52	9,66
18	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	221.449.133.579,80	216.374.020.298,91	5.075.113.280,89	2,35
19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	148.964.539,00	580.695.560,00	(431.731.021,00)	(74,35)
	JUMLAH	3.659.360.043.395,24	3.406.922.115.997,22	252.437.927.398,02	7,41

8.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp638.560.270.792,81** dan **Rp608.789.451.395,68**. Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.3
Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Pajak Daerah- LO	221.449.133.579,80	216.374.020.298,91	5.075.113.280,89	2,35
2	Pendapatan Retribusi Daerah- LO	40.949.092.721,66	42.729.884.208,09	(1.780.791.486,43)	(4,17)
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	12.990.615.843,00	7.895.373.711,00	5.095.242.132,00	64,53
4	Lain-lain PAD yang sah- LO	363.171.428.648,35	341.790.173.177,68	21.381.255.470,67	6,26
	JUMLAH	638.560.270.792,81	608.789.451.395,68	29.770.819.397,13	4,89

8.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pajak Daerah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp221.449.133.579,80** dan **Rp216.374.020.298,91**. Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.4
Pendapatan Pajak Daerah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Hotel	7.337.719.958,00	5.493.693.838,00	1.844.026.120,00	33,57
2	Pajak Restoran – LO	18.442.286.185,00	14.884.970.997,00	3.557.315.188,00	23,90
3	Pajak Hiburan – LO	1.601.211.323,00	1.185.983.129,00	415.228.194,00	35,01
4	Pajak Reklame – LO	4.394.821.605,80	4.093.669.538,91	301.152.066,89	7,36
5	Pajak Penerangan Jalan – LO	74.039.490.635,00	70.051.261.883,00	3.988.228.752,00	5,69

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
6	Pajak Parkir – LO	601.826.704,00	899.712.550,00	(297.885.846,00)	(33,11)
7	Pajak Air Tanah – LO	1.161.431.550,00	996.657.049,00	164.774.501,00	16,53
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO	61.221.000,00	63.586.000,00	(2.365.000,00)	(3,72)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	11.372.506.304,00	11.375.308.733,00	(2.802.429,00)	(0,02)
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	55.389.632.757,00	48.927.618.157,00	6.462.014.600,00	13,21
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	47.046.985.558,00	58.401.558.424,00	(11.354.572.866,00)	(19,44)
	JUMLAH	221.449.133.579,80	216.374.020.298,91	5.075.113.280,89	2,35

Pendapatan Pajak Daerah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel

Pajak Hotel tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp7.337.721.977,00** dan **Rp5.493.693.838,00**. Pajak Hotel sebagai berikut:

Tabel 8.5
Pajak Hotel

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hotel – LO	7.077.764.797,00	5.266.865.858,00	1.810.898.939,00	34,38
2	Losmen/Rumah Penginapan- LO	259.955.161,00	226.827.980,00	33.127.181,00	14,60
	JUMLAH	7.337.719.958,00	5.493.693.838,00	1.844.026.120,00	33,57

2. Pajak Restoran

Pajak Restoran tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp18.442.286.185,00** dan **Rp14.884.970.997,00**. Pajak Restoran sebagai berikut:

Tabel 8.6
Pajak Restoran

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Restoran- LO	8.971.481.516,00	6.947.980.100,00	2.023.501.416,00	29,12
2	Rumah Makan- LO	3.766.566.922,00	3.380.862.066,00	385.704.856,00	11,41
3	Café- LO	613.633.655,00	444.377.417,00	169.256.238,00	38,09
4	Kantin- LO	111.181.974,00	114.257.243,00	(3.075.269,00)	(2,69)
5	Jasa Boga/ Katering- LO	4.979.422.118,00	3.997.494.171,00	981.927.947,00	24,56
	JUMLAH	18.442.286.185,00	14.884.970.997,00	3.557.315.188,00	23,90

3. Pajak Hiburan

Pajak Hiburan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp1.601.211.323,00** dan **Rp1.185.983.129,00**. Pajak Hiburan sebagai berikut :

Tabel 8.7
Pajak Hiburan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Tontonan Film/Bioskop - LO	550.378.456,00	-	550.378.456,00	100,00
2	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana- LO	15.927.000,00	9.800.000,00	6.127.000,00	62,52
3	Pameran - LO	12.577.022,00	-	12.577.022,00	100,00
4	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO	413.189.911,00	446.841.186,00	(33.651.275,00)	(7,53)
5	Sirkus/Akrobat/Sulap- LO	4.250.000,00	2.900.000,00	1.350.000,00	46,55
6	Permainan Bilyar, Golf, Bowling- LO	1.925.000,00	2.250.000,00	(325.000,00)	(14,44)
7	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan- LO	555.232.833,00	680.947.870,00	(125.715.037,00)	(18,46)
8	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) – LO	47.731.101,00	43.244.073,00	4.487.028,00	10,38
	JUMLAH	1.601.211.323,00	1.185.983.129,00	415.228.194,00	35,01

4. Pajak Reklame

Pajak Reklame tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp4.394.821.605,80** dan **Rp4.093.669.538,91**. Pajak Reklame sebagai berikut :

Tabel 8.8
Pajak Reklame

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron – LO	3.607.998.719,20	3.423.900.345,58	184.098.373,62	5,38
2	Pajak Reklame Kain – LO	702.005.595,00	615.795.860,00	86.209.735,00	14,00
3	Pajak Reklame Berjalan- LO	84.817.291,60	53.973.333,33	30.843.958,27	57,15
	JUMLAH	4.394.821.605,80	4.093.669.538,91	301.152.066,89	7,36

5. Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp74.039.490.635,00** dan **Rp70.051.261.883,00**. Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

Tabel 8.9
Pajak Penerangan Jalan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri – LO	73.843.621.819,00	69.796.615.704,00	4.047.006.115,00	5,80
2	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain – LO	195.868.816,00	254.646.179,00	(58.777.363,00)	(23,08)
	JUMAH	74.039.490.635,00	70.051.261.883,00	3.988.228.752,00	5,69

6. Pajak Parkir

Pajak Parkir tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp601.826.704,00** dan **Rp899.712.550,00**. Pajak Parkir sebagai berikut:

Tabel 8.10
Pajak Parkir

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Parkir- LO	601.826.704,00	899.712.550,00	(297.885.846,00)	(33,11)
	JUMLAH	601.826.704,00	899.712.550,00	(297.885.846,00)	(33,11)

7. Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp1.161.431.550,00** dan **Rp996.657.049,00**. Pajak Air Tanah sebagai berikut:

Tabel 8.11
Pajak Air Tanah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Air Tanah- LO	1.161.431.550,00	996.657.049,00	164.774.501,00	16,53
	JUMLAH	1.161.431.550,00	996.657.049,00	164.774.501,00	16,53

8. Pajak Sarang Burung Walet

Pajak Sarang Burung Walet tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp61.221.000,00** dan **Rp63.586.000,00**. Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut:

Tabel 8.12
Pajak Sarang Burung Walet

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Sarang Burung Walet- LO	61.221.000,00	63.586.000,00	(2.365.000,00)	(3,72)
	JUMLAH	61.221.000,00	63.586.000,00	(2.365.000,00)	(3,72)

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Bukan Logam dan Batuan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp11.372.506.304,00** dan **Rp11.375.308.733,00**. Pajak Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut :

Tabel 8.13
Pajak Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Batu Kapur- LO	9.300.258.675,00	9.027.842.100,00	272.416.575,00	3,02
2	Granit/Andesit – LO	61.668.000,00	31.902.000,00	29.766.000,00	93,30
3	Pasir dan Kerikil- LO	73.194.943,00	299.099.065,00	(225.904.122,00)	(75,53)
4	Tanah Liat- LO	278.777.050,00	234.569.775,00	44.207.275,00	18,85
5	Tanah Urug- LO	1.658.607.636,00	1.781.895.793,00	(123.288.157,00)	(6,92)
	JUMLAH	11.372.506.304,00	11.375.308.733,00	(2.802.429,00)	(0,02)

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp55.389.632.757,00** dan **Rp48.927.618.157,00**. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan sebagai berikut :

Tabel 8.14
Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	55.389.632.757,00	48.927.618.157,00	6.462.014.600,00	13,21
	JUMLAH	55.389.632.757,00	48.927.618.157,00	6.462.014.600,00	13,21

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp47.046.985.558,00** dan **Rp58.401.558.424,00**. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 8.15
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan- LO	47.046.985.558,00	58.401.558.424,00	(11.354.572.866,00)	(19,44)
	JUMLAH	47.046.985.558,00	58.401.558.424,00	(11.354.572.866,00)	(19,44)

8.1.1.2 Retribusi Daerah

Retribusi Daerah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp40.949.092.721,66** dan **Rp42.729.884.208,09**. Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.16
Retribusi Daerah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	25.543.997.500,00	25.601.643.000,00	(57.645.500,00)	(0,23)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO	2.197.326.150,00	2.104.927.476,00	92.398.674,00	4,39
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	270.744.000,00	308.791.000,00	(38.047.000,00)	(12,32)
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	2.336.865.800,00	1.926.354.656,00	410.511.144,00	21,31
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.225.698.216,66	2.195.443.666,67	30.254.549,99	1,38
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	105.985.000,00	103.630.000,00	2.355.000,00	2,27
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	133.772.000,00	121.600.600,00	12.171.400,00	10,01
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	801.131.266,00	791.331.311,42	9.799.954,58	1,24
9	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	71.258.500,00	41.516.476,00	29.742.024,00	71,64
10	Retribusi Terminal – LO	155.144.500,00	151.362.000,00	3.782.500,00	2,50
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	-	2.252.000,00	(2.252.000,00)	(100,00)
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	213.623.400,00	197.794.300,00	15.829.100,00	8,00
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO	37.550.000,00	23.850.000,00	13.700.000,00	57,44
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	204.182.500,00	203.890.000,00	292.500,00	0,14
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	4.068.220.039,00	6.517.417.177,00	(2.449.197.138,00)	(37,58)
16	Retribusi Izin Trayek - LO	3.640.000,00	19.240.000,00	(15.600.000,00)	(81,08)
17	Retribusi Izin Perikanan - LO	-	992.420,00	(992.420,00)	(100,00)
18	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LO	375.081.600,00	731.255.000,00	(356.173.400,00)	(48,71)
19	Retribusi Menara Telekomunikasi	2.204.872.250,00	1.686.593.125,00	518.279.125,00	30,73
	JUMLAH	40.949.092.721,66	42.729.884.208,09	(1.780.791.486,43)	(4,17)

Rincian Retribusi Daerah per SKPD sebagai berikut:

Tabel 8.17
Rincian Retribusi Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dinas Kesehatan	25.543.997.500,00	25.601.643.000,00	(57.645.500,00)	(0,23)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	801.131.266,00	791.331.311,42	9.799.954,58	1,24
3	Dinas Pemadam Kebakaran	105.985.000,00	103.630.000,00	2.355.000,00	2,27
4	Dinas Tenaga Kerja dan	375.081.600,00	731.255.000,00	(356.173.400,00)	(48,71)

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Transmigrasi				
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.197.326.150,00	2.104.927.476,00	92.398.674,00	4,39
6	Dinas Perhubungan	2.651.586.716,66	2.655.596.666,67	(4.009.950,01)	(0,15)
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.204.872.250,00	1.686.593.125,00	518.279.125,00	30,73
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.071.860.039,00	6.537.649.597,00	(2.465.789.558,00)	(37,72)
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	37.550.000,00	26.102.000,00	11.448.000,00	43,86
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	71.258.500,00	41.516.476,00	29.742.024,00	71,64
11	Dinas Pertanian	493.622.900,00	476.289.300,00	17.333.600,00	3,64
12	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	2.394.820.800,00	1.973.350.256,00	421.470.544,00	21,36
	JUMLAH	40.949.092.721,66	42.729.884.208,09	(1.780.791.486,43)	(4,17)

8.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2019 dan tahun 2018 senilai **Rp12.990.615.843,00** dan **Rp7.895.373.711,00**. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.18
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD – LO	12.990.615.843,00	7.895.373.711,00	5.095.242.132,00	64,53
	JUMLAH	12.990.615.843,00	7.895.373.711,00	5.095.242.132,00	64,53

8.1.1.4 Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp363.171.428.648,35** dan **Rp341.790.173.177,68**. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 8.19
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	-	65.700.000,00	(65.700.000,00)	(100,00)
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	243.626.094,00	207.068.596,00	36.557.498,00	17,65
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	8.792.001.720,00	7.984.870.646,00	807.131.074,00	10,11

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
4	Pendapatan Bunga - LO	21.610.714.869,00	16.384.894.850,00	5.225.820.019,00	31,89
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah – LO	-	77.569.470,00	(77.569.470,00)	(100,00)
6	Pendapatan dari Pengembalian - LO	371.382.742,00	172.326.550,00	199.056.192,00	115,51
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LO	255.992.695,17	727.286.696,08	(471.294.000,91)	(64,80)
8	Pendapatan BLUD - LO	228.385.922.041,18	213.080.438.360,60	15.305.483.680,58	7,18
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas	97.377.918.425,00	98.319.628.204,00	(941.709.779,00)	(0,96)
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	6.133.870.062,00	4.770.389.805,00	1.363.480.257,00	28,58
	JUMLAH	363.171.428.648,35	341.790.173.177,68	21.381.255.470,67	6,26

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2019 sebagai berikut:

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp0,00** dan **Rp65.700.000,00**. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagai berikut:

Tabel 8.20
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin- LO	-	65.700.000,00	(65.700.000,00)	(100,00)
	JUMLAH	-	65.700.000,00	(65.700.000,00)	(100,00)

2. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Hasil Penjualan Aset Lainnya tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp243.626.094,00** dan **Rp207.068.596,00**. Hasil Penjualan Aset Lainnya sebagai berikut:

Tabel 8.21
Hasil Penjualan Aset Lainnya

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya- LO	243.626.094,00	207.068.596,00	36.557.498,00	17,65
	JUMLAH	243.626.094,00	207.068.596,00	36.557.498,00	17,65

3. Penerimaan Hasil Jasa Giro

Penerimaan Hasil Jasa Giro tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp8.792.001.720,00** dan **Rp7.984.870.646,00**. Penerimaan Hasil Jasa Giro sebagai berikut:

Tabel 8.22
Penerimaan Hasil Jasa Giro

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Jasa Giro Kas Daerah-LO	7.624.245.735,00	6.965.055.418,00	659.190.317,00	9,42
2	Jasa Giro Kas Bendahara-LO	1.167.755.985,00	1.019.815.228,00	147.940.757,00	14,51
	Jumlah	8.792.001.720,00	7.984.870.646,00	807.131.074,00	10,11

4. Pendapatan Bunga

Pendapatan Bunga tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp21.610.714.869,00** dan **Rp16.384.894.850,00**. Pendapatan Bunga sebagai berikut:

Tabel 8.23
Pendapatan Bunga Deposito

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bunga Deposito- LO	21.610.714.869,00	16.384.894.850,00	5.225.820.019,00	31,89
	JUMLAH	21.610.714.869,00	16.384.894.850,00	5.225.820.019,00	31,89

5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp0,00** dan **Rp77.569.470,00**. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.24
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Kerugian Barang	-	77.569.470,00	(77.569.470,00)	(100,00)
	JUMLAH	-	77.569.470,00	(77.569.470,00)	(100,00)

6. Pendapatan dari Pengembalian

Pendapatan dari Pengembalian tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp371.382.742,00** dan **Rp172.326.550,00**. Pendapatan dari Pengembalian sebagai berikut:

Tabel 8.25
Pendapatan Dari Pengembalian

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan – LO	371.382.742,00	172.326.550,00	199.056.192,00	115,51
	JUMLAH	371.382.742,00	172.326.550,00	199.056.192,00	115,51

Pendapatan dari Pengembalian merupakan penerimaan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan.

7. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp255.992.695,17** dan **Rp727.286.696,08**. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.26
Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa – LO	255.992.695,17	727.286.696,08	(471.294.000,91)	(64,80)
	JUMLAH	255.992.695,17	727.286.696,08	(471.294.000,91)	(64,80)

8. Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp228.385.922.041,18** dan **Rp213.080.438.360,60**. Pendapatan BLUD sebagai berikut:

Tabel 8.27
Pendapatan BLUD

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan BLUD- LO	228.385.922.041,18	213.080.438.360,60	15.305.483.680,58	7,18
	JUMLAH	228.385.922.041,18	213.080.438.360,60	15.305.483.680,58	7,18

Pendapatan BLUD senilai **Rp228.385.922.041,18** merupakan pendapatan BLUD dari Rumah Sakit Arjawinangun senilai **Rp112.630.690.942,18** dan Rumah Sakit Waled senilai **Rp115.755.231.099,00**.

9. Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas

Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp97.377.918.425,00** dan **Rp98.319.628.204,00**. Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas sebagai berikut:

Tabel 8.28
Dana Kapitasi JKN pada FKTP

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas.	97.377.918.425,00	98.319.628.204,00	(941.709.779,00)	(0,96)
	JUMLAH	97.377.918.425,00	98.319.628.204,00	(941.709.779,00)	(0,96)

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

10. Lain- Lain PAD yang Sah Lainnya

Lain-lain PAD yang Sah Lainnya tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp6.133.870.062,00** dan **Rp4.770.389.805,00**. Lain-lain PAD yang Sah Lainnya sebagai berikut:

Tabel 8.29
Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO.	1.416.076.522,00	1.564.299.338,00	(148.222.816,00)	(9,48)
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Kependudukan	844.575.000,00	942.310.000,00	(97.735.000,00)	(10,37)
3	Pendapatan Pengembalian Kerugian Daerah Atas Pemeriksaan	3.821.827.650,00	2.216.697.783,00	1.605.129.867,00	72,41
4	Pendapatan Jasa Bunga Selain Pemegang Kas	51.390.890,00	47.082.684,00	4.308.206,00	9,15
	JUMLAH	6.133.870.062,00	4.770.389.805,00	1.363.480.257,00	28,58

8.1.2 Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer tahun 2019 dan 2018 adalah senilai **Rp2.561.051.165.464,00** dan **Rp2.383.549.396.142,00**. Pendapatan Transfer sebagai berikut:

Tabel 8.30
Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.238.919.527.892,00	2.069.819.407.452,00	169.100.120.440,00	8,17
2	Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat – Lainnya	24.827.028.000,00	35.750.000.000,00	(10.922.972.000,00)	(30,55)
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	297.304.609.572,00	277.979.988.690,00	19.324.620.882,00	6,95
	JUMLAH	2.561.051.165.464,00	2.383.549.396.142,00	177.501.769.322,00	7,45

Pendapatan Transfer merupakan transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan. Pendapatan Transfer sebagai berikut:

8.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp2.238.919.527.892,00** dan **Rp2.069.819.407.452,00**.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

Tabel 8.31
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil Pajak	58.262.919.351,00	63.182.845.832,00	(4.919.926.481,00)	(7,79)
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	41.725.401.658,00	23.363.770.959,00	18.361.630.699,00	78,59
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.591.291.632.000,00	1.500.538.688.000,00	90.752.944.000,00	6,05
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	547.639.574.883,00	482.734.102.661,00	64.905.472.222,00	13,45
	JUMLAH	2.238.919.527.892,00	2.069.819.407.452,00	169.100.120.440,00	8,17

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagai berikut:

1. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp58.262.919.351,00** dan **Rp63.182.845.832,00**. Bagi Hasil Pajak sebagai berikut:

Tabel 8.32
Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO	1.695.789.213,00	-	1.695.789.213,00	100,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO	207.812.203,00	-	207.812.203,00	100,00
3	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21- LO	37.588.494.706,00	40.287.956.659,00	(2.699.461.953,00)	(6,70)
4	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.159.287.560,00	4.957.147.000,00	(797.859.440,00)	(16,10)
5	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Umum- LO	14.611.535.669,00	17.937.742.173,00	(3.326.206.504,00)	(18,54)
	JUMLAH	58.262.919.351,00	63.182.845.832,00	(4.919.926.481,00)	(7,79)

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam pada tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp41.725.401.658,00** dan

Rp23.363.770.959,00. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam sebagai berikut:

Tabel 8.33
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan- LO	86.395.865,00	76.973.236,00	9.422.629,00	12,24
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan- LO	764.460.992,00	701.234.591,00	63.226.401,00	9,02
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi- LO	7.501.544.108,00	4.944.070.438,00	2.557.473.670,00	51,73
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi- LO	4.832.741.320,00	5.333.871.605,00	(501.130.285,00)	(9,40)
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi- LO	28.117.336.399,00	11.967.106.758,00	16.150.229.641,00	134,96
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum – LO	422.922.974,00	340.514.331,00	82.408.643,00	24,20
	JUMLAH	41.725.401.658,00	23.363.770.959,00	18.361.630.699,00	78,59

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp1.591.291.632.000,00** dan **Rp1.500.538.688.000,00**. Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai berikut:

Tabel 8.34
Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dana Alokasi Umum – LO	1.591.291.632.000,00	1.500.538.688.000,00	90.752.944.000,00	6,05
	JUMLAH	1.591.291.632.000,00	1.500.538.688.000,00	90.752.944.000,00	6,05

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp547.639.574.883,00** dan **Rp482.734.102.661,00**. Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai berikut:

Tabel 8.35
Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	8.646.906.000,00	7.610.420.000,00	1.036.486.000,00	13,62
2	DAK Bidang Kesehatan – LO	64.255.334.169,00	31.032.871.765,00	33.222.462.404,00	107,06
3	DAK Bidang Pendidikan – LO	340.241.469.170,00	362.006.017.186,00	(21.764.548.016,00)	(6,01)
4	Dana Alokasi Khusus	129.956.111.056,00	78.063.207.560,00	51.892.903.496,00	66,48

Tabel 8.35
Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	(DAK)				
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.539.754.488,00	4.021.586.150,00	518.168.338,00	12,88
	JUMLAH	547.639.574.883,00	482.734.102.661,00	64.905.472.222,00	13,45

Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2019 terdiri dari DAK Fisik senilai **Rp129.256.111.056,00** dan DAK Non Fisik senilai **Rp417.683.463.827,00**.

8.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp24.827.028.000,00** dan **Rp35.750.000.000,00**. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya sebagai berikut:

Tabel 8.36
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Dana Penyesuaian, yaitu Dana Insentif Daerah- LO	24.827.028.000,00	35.750.000.000,00	(10.922.972.000,00)	(30,55)
	JUMLAH	24.827.028.000,00	35.750.000.000,00	(10.922.972.000,00)	(30,55)

8.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp297.304.609.572,00** dan **Rp277.979.988.690,00**. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya sebagai berikut:

Tabel 8.37
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LO	297.304.609.572,00	277.979.988.690,00	19.324.620.882,00	6,95
	JUMLAH	297.304.609.572,00	277.979.988.690,00	19.324.620.882,00	7,95

8.1.3 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp 459.748.607.138,43** dan **Rp414.583.268.459,54**. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah sebagai berikut:

Tabel 8.38
Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah – LO	35.331.669.939,00	59.113.852.370,04	(23.782.182.431,04)	(40,23)
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya – LO	359.057.003,43	-	359.057.003,43	100,00
3	Hibah Dana Bos – LO	221.895.600.000,00	214.038.960.000,00	7.856.640.000,00	3,67
4	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri – LO	18.926.764.593,00	15.295.290.700,00	3.631.473.893,00	23,74
5	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat – LO	-	522.400.000,00	(522.400.000,00)	(100,00)
6	Bantuan Keuangan dari Provinsi	183.235.515.603,00	125.612.730.116,00	57.622.785.487,00	45,87
7	Pendapatan Lainnya – LO	-	35.273,50	(35.273,50)	(100,00)
	JUMLAH	459.748.607.138,43	414.583.268.459,54	45.165.338.678,89	10,89

Lain-Lain Pendapatan Yang Sah merupakan Pendapatan Hibah, Bantuan Keuangan Provinsi dan Pendapatan Lainnya.

8.2 Beban

Beban merupakan belanja atau beban yang telah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Beban tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp3.187.144.256.618,16** dan **Rp3.115.968.218.224,59**. Beban sebagai berikut:

Tabel 8.39
Beban

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pegawai	1.772.736.783.276,60	1.500.857.726.705,00	271.879.056.571,60	18,11
2	Beban Persediaan	316.262.236.621,40	284.827.019.610,58	31.435.217.010,82	11,04
3	Beban Jasa	526.704.321.196,75	682.746.439.927,58	(156.042.118.730,83)	(22,86)
4	Beban Pemeliharaan	49.150.951.622,00	49.902.799.434,00	(751.847.812,00)	(1,51)
5	Beban Perjalanan Dinas	60.647.168.973,00	54.070.394.020,00	6.576.774.953,00	12,16
6	Beban Hibah	67.158.496.000,00	109.142.090.814,00	(41.983.594.814,00)	(38,47)
7	Beban Bantuan Sosial	1.389.260.143,00	1.702.688.774,00	(313.428.631,00)	(18,41)
8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	175.281.715.407,31	233.256.392.506,85	(57.974.677.099,54)	(24,85)
9	Beban Penyisihan Piutang	2.320.447.957,10	8.407.137.194,58	(6.086.689.237,48)	(72,40)
10	Beban Transfer	215.492.875.421,00	191.055.529.238,00	24.437.346.183	12,79
	JUMLAH	3.187.144.256.618,16	3.115.968.218.224,59	71.176.038.393,57	2,28

8.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp1.772.736.783.276,60** dan **Rp1.500.857.726.705,00**. Beban Pegawai sebagai berikut:

Tabel 8.40
Beban Pegawai

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Gaji dan Tunjangan	914.291.820.772,00	897.671.463.835,00	16.620.356.937,00	1,85
2	Tambahan Penghasilan PNS	585.037.372.070,00	558.209.671.312,00	26.827.700.758,00	4,81
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.511.200.000,00	9.385.750.000,00	125.450.000,00	1,34
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.747.692.667,00	12.636.852.180,00	(2.889.159.513,00)	(22,86)
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.151.723.399,00	1.081.775.816,00	69.947.583,00	6,47
6	Uang Lembur	10.552.278.349,00	21.872.213.562,00	(11.319.935.213,00)	(51,75)
7	Honorarium PNS	104.203.685.356,60	-	104.203.685.356,60	100,00
8	Honorarium Non PNS	135.894.310.663,00	-	135.894.310.663,00	100,00
9	Beban Pegawai BLUD	2.346.700.000,00	-	2.346.700.000,00	100,00
	JUMLAH	1.772.736.783.276,60	1.500.857.726.705,00	271.879.056.571,60	18,11

8.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp914.291.820.772,00** dan **Rp897.671.463.835,00**. Beban Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

Tabel 8.41
Beban Gaji dan Tunjangan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	704.093.449.447,00	686.091.839.373,00	18.001.610.074,00	2,62
2	Tunjangan Keluarga – LO	63.816.872.131,00	63.088.455.695,00	728.416.436,00	1,15
3	Tunjangan Jabatan – LO	11.786.663.728,00	12.676.366.398,00	(889.702.670,00)	(7,02)
4	Tunjangan Fungsional – LO	54.178.553.750,00	55.692.821.000,00	(1.514.267.250,00)	(2,72)
5	Tunjangan Fungsional Umum – LO	6.430.616.000,00	6.054.155.000,00	376.461.000,00	6,22
6	Tunjangan Beras – LO	30.472.323.011,00	31.809.238.476,00	(1.336.915.465,00)	(4,20)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	2.114.176.243,00	1.293.261.835,00	820.914.408,00	63,48
8	Pembulatan Gaji – LO	8.845.115,00	8.536.817,00	308.298,00	3,61
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	19.809.750.002,00	19.300.359.884,00	509.390.118,00	2,64
10	Uang Paket – LO	94.783.500,00	94.090.500,00	693.000,00	0,74
11	Tunjangan Badan Musyawarah – LO	27.222.300,00	32.459.700,00	(5.237.400,00)	(16,14)
12	Tunjangan Komisi – LO	50.799.950,00	60.382.350,00	(9.582.400,00)	(15,87)
13	Tunjangan Badan Anggaran – LO	27.085.275,00	33.099.150,00	(6.013.875,00)	(18,17)
14	Tunjangan Badan Kehormatan – LO	7.612.500,00	8.526.000,00	(913.500,00)	(10,71)

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya – LO	50.821.050,00	58.144.275,00	(7.323.225,00)	(12,59)
16	Tunjangan Perumahan – LO	7.637.000.000,00	7.563.000.000,00	74.000.000,00	0,98
17	Uang Jasa Pengabdian – LO	419.265.000,00	31.500.000,00	387.765.000,00	1.231,00
18	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD – LO	353.640.000,00	393.120.000,00	(39.480.000,00)	(10,04)
19	Tunjangan Badan Legislatif Daerah – LO	14.844.375,00	16.747.500,00	(1.903.125,00)	(11,36)
20	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – LO	1.440.249.349,00	147.278.838,00	1.292.970.511,00	877,91
21	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM)	4.320.748.046,00	5.473.081.044,00	(1.152.332.998,00)	(21,05)
22	Tunjangan Transportasi – LO	5.695.900.000,00	5.613.500.000,00	82.400.000,00	1,47
23	Tunjangan Reses – LO	1.440.600.000,00	2.131.500.000,00	(690.900.000,00)	(32,41)
	JUMLAH	914.291.820.772,00	897.671.463.835,00	16.620.356.937,00	1,85

8.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp585.037.372.070,00** dan **Rp558.209.671.312,00**. Beban Tambahan Penghasilan PNS sebagai berikut:

Tabel 8.42
Beban Tambahan Penghasilan PNS

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	242.815.348.150,00	221.233.886.062,00	21.581.462.088,00	9,76
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	750.254.400,00	715.643.300,00	34.611.100,00	4,84
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	340.906.269.520,00	335.364.891.950,00	5.541.377.570,00	1,65
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	565.500.000,00	895.250.000,00	(329.750.000,00)	(36,83)
	JUMLAH	585.037.372.070,00	558.209.671.312,00	26.827.700.758,00	4,81

8.2.1.3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp9.511.200.000,00** dan **Rp9.385.750.000,00**. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH sebagai berikut:

Tabel 8.43
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.761.200.000,00	8.704.500.000,00	56.700.000,00	0,65
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	750.000.000,00	681.250.000,00	68.750.000,00	10,09
	JUMLAH	9.511.200.000,00	9.385.750.000,00	125.450.000,00	1,34

8.2.1.4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp9.747.692.667,00** dan **Rp12.636.852.180,00**. Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.44
Insentif Pemungutan Pajak Daerah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	9.747.692.667,00	12.636.852.180,00	(2.889.159.513,00)	(22,86)
	JUMLAH	9.747.692.667,00	12.636.852.180,00	(2.889.159.513,00)	(22,86)

Insentif pemungutan pajak daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

8.2.1.5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp1.151.723.399,00** dan **Rp1.081.775.816,00**. Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Tabel 8.45
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.151.723.399,00	1.081.775.816,00	69.947.583,00	6,47
	JUMLAH	1.151.723.399,00	1.081.775.816,00	69.947.583,00	6,47

Rincian Insentif Pemungutan Retribusi Daerah per SKPD sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan senilai **Rp549.053.576,00**
2. Dinas Lingkungan Hidup senilai **Rp97.650.000,00**
3. Dinas Perhubungan senilai **Rp85.267.181,00**
4. Dinas Komunikasi dan Informatika senilai **Rp71.325.000,00**
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu senilai **Rp252.996.246,00**

6. Dinas Pertanian senilai **Rp17.254.875,00**

7. Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai **Rp78.176.521,00**

8.2.1.6 Uang Lembur

Uang Lembur tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp10.552.278.349,00** dan **Rp21.872.213.562,00**. Uang Lembur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.46
Uang Lembur

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Uang Lembur PNS	6.740.398.850,00	13.252.719.029,00	(6.512.320.179,00)	(49,14)
2	Uang Lembur Non PNS	3.811.879.499,00	8.619.494.533,00	(4.807.615.034,00)	(55,78)
	JUMLAH	10.552.278.349,00	21.872.213.562,00	(11.319.935.213,00)	(51,75)

8.2.1.7 Honorarium PNS

Honorarium PNS tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp104.203.685.356,60** dan **Rp0,00**. Honorarium PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.47
Honorarium PNS

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Honorarium PNS	104.203.685.356,60	-	104.203.685.356,60	100,00
	JUMLAH	104.203.685.356,60	-	104.203.685.356,60	100,00

8.2.1.8 Honorarium Non PNS

Honorarium PNS tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp135.894.310.663,00** dan **Rp0,00**. Honorarium Non PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.48
Honorarium Non PNS

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Honorarium PNS	135.894.310.663,00	-	135.894.310.663,00	100,00
	JUMLAH	135.894.310.663,00	-	135.894.310.663,00	100,00

8.2.1.9 Beban Pegawai BLUD

Beban Pegawai BLUD tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp2.346.700.000,00** dan **Rp0,00**. Beban Pegawai BLUD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.49
Beban Pegawai BLUD

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Honorarium PNS	2.346.700.000,00	-	2.346.700.000,00	100,00
	JUMLAH	2.346.700.000,00	-	2.346.700.000,00	100,00

8.2.2 Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp316.262.236.621,40** dan **Rp284.827.019.610,58**. Beban Persediaan sebagai berikut:

Tabel 8.50
Beban Persediaan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	122.525.707.958,36	83.064.615.774,96	39.461.092.183,40	47,51
2	Beban Persediaan Bahan/Material	158.807.728.561,04	128.007.965.212,62	30.799.763.348,42	24,06
3	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	33.795.724.102,00	68.817.314.223,00	(35.021.590.121,00)	(50,89)
4	Beban Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan	1.133.076.000,00	4.937.124.400,00	(3.804.048.400,00)	(77,05)
	JUMLAH	316.262.236.621,40	284.827.019.610,58	31.435.217.010,82	11,04

Rincian Beban Persediaan terdapat dalam Lampiran 8.1.

8.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp526.704.321.196,75** dan **Rp682.746.439.927,58**. Beban Jasa sebagai berikut:

Tabel 8.51
Beban Jasa

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Jasa Kantor	312.002.854.451,00	238.622.649.867,00	73.380.204.584,00	30,75
2	Beban Premi Asuransi	2.026.000.922,84	1.427.677.778,71	598.323.144,13	41,91
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	22.701.689.808,28	20.440.244.344,58	2.261.445.463,70	11,06
4	Beban Cetak dan Penggandaan	23.102.320.700,02	49.608.774.838,73	(26.506.454.138,71)	(53,43)
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang /Parkir	20.777.079.075,61	18.229.753.627,16	2.547.325.448,45	13,97
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	3.012.446.500,00	2.790.719.753,00	221.726.747,00	7,95
7	Beban Sewa Alat Berat	196.022.700,00	15.878.000,00	180.144.700,00	1.134,56
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	4.934.579.700,00	5.579.894.000,00	(645.314.300,00)	(11,56)

Tabel 8.51
Beban Jasa

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
9	Beban Makanan dan Minuman	76.004.975.385,00	69.286.661.736,00	6.718.313.649,00	9,70
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	2.474.534.750,00	1.877.465.100,00	597.069.650,00	31,80
11	Beban Pakaian Kerja	2.386.414.200,00	2.244.900.600,00	141.513.600,00	6,30
12	Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	4.082.191.740,00	3.296.145.450,00	786.046.290,00	23,85
13	Beban Jasa Konsultasi	14.870.744.400,00	10.786.105.650,00	4.084.638.750,00	37,87
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	456.500.000,00	705.750.000,00	(249.250.000,00)	(35,32)
15	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	6.557.181.985,00	6.463.463.766,00	93.718.219,00	1,45
16	Honorarium PNS	-	98.319.533.606,40	(98.319.533.606,40)	(100,00)
17	Honorarium Non PNS	-	125.289.296.110,00	(125.289.296.110,00)	(100,00)
18	Beban Pegawai BLUD	-	2.239.000.000,00	(2.239.000.000,00)	(100,00)
19	Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/Narasumber	31.118.784.879,00	25.522.525.700,00	5.596.259.179,00	21,93
	JUMLAH	526.704.321.196,75	682.746.439.927,58	(156.042.118.730,83)	(22,86)

Rincian Beban Jasa terdapat dalam Lampiran 8.2.

8.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp49.150.951.622,00** dan **Rp49.902.799.434,00**. Beban Pemeliharaan sebagai berikut:

Tabel 8.52
Beban Pemeliharaan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.778.556.371,00	10.469.076.154,00	3.309.480.217,00	31,61
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	16.566.531.651,00	23.948.789.320,00	(7.382.257.669,00)	(30,83)
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigrasi dan Jaringan	18.805.863.600,00	15.484.933.960,00	3.320.929.640,00	21,45
	JUMLAH	49.150.951.622,00	49.902.799.434,00	(751.847.812,00)	(1,51)

8.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp60.647.168.973,00** dan **Rp54.070.394.020,00**. Beban Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Tabel 8.53
Beban Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	30.611.190.615,00	27.988.599.148,00	2.622.591.467,00	9,37
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	30.035.978.358,00	26.081.794.872,00	3.954.183.486,00	15,16
	JUMLAH	60.647.168.973,00	54.070.394.020,00	6.576.774.953,00	12,16

8.2.6 Beban Hibah

Beban Hibah tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp67.158.496.000,00** dan **Rp109.142.090.814,00**. Beban Hibah sebagai berikut:

Tabel 8.54
Beban Hibah

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah	-	75.088.464.470,00	(75.088.464.470,00)	(100,00)
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	33.900.275.400,00	-	33.900.275.400,00	100,00
3	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	1.797.588.000,00	-	1.797.588.000,00	100,00
4	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	31.223.382.600,00	33.868.376.344,00	(2.644.993.744,00)	(7,81)
5	Beban Hibah Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	237.250.000,00	185.250.000,00	52.000.000,00	28,07
	JUMLAH	67.158.496.000,00	109.142.090.814,00	(41.983.594.814,00)	(38,47)

Rincian Beban Hibah per SKPD sebagai berikut:

Tabel 8.55
Rincian Beban Hibah Per SKPD

NO	URAIAN	2019
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan	32.395.082.000,00
2	Dinas Sosial	36.000.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.000.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	43.500.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000,00
6	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	95.550.000,00
7	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	854.200.000,00
8	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	76.000.000,00
9	Dinas Kelautan dan Perikanan	57.500.000,00
10	Dinas Pertanian	32.288.000,00
11	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	27.000.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian	88.500.000,00
13	PPKD	31.223.382.600,00

Tabel 8.55
Rincian Beban Hibah Per SKPD

NO	URAIAN	2019
14	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.715.443.400,00
15	Sekretariat Daerah	450.400.000,00
16	Kecamatan Suranenggala	24.650.000,00
	JUMLAH	67.158.496.000,00

Beban Hibah kepada Pihak Pemerintah Daerah Lainnya senilai **Rp33.900.275.400,00** merupakan hibah kepada Pemerintah Desa yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah senilai **Rp1.505.193.400,00** dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan senilai **Rp32.395.082.000,00**.

Beban Hibah Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat senilai **Rp237.250.000,00** merupakan hibah dalam bentuk uang pada tahun 2019 yang terdapat pada :

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah senilai **Rp210.250.000,00** berupa pemberian Stimulan Percepatan Penerimaan PBB bagi kolektor desa Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pajak Daerah.
2. Dinas Perdagangan dan Perindustrian senilai **Rp 27.000.000** berupa hadiah dalam rangka Metrologi Legal Award Tahun 2019.

8.2.7 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp1.389.260.143,00** dan **Rp1.702.688.774,00**. Beban Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 8.56
Beban Bantuan Sosial

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu dan atau Keluarga	1.389.260.143,00	1.702.688.774,00	(313.428.631,00)	(18,41)
	Jumlah	1.389.260.143,00	1.702.688.774,00	(313.428.631,00)	(18,41)

8.2.8 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp175.281.715.407,31** dan **Rp233.256.392.506,85**. Beban Penyusutan dan Amortisasi sebagai berikut:

Tabel 8.57
Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	85.756.232.700,05	83.687.382.092,60	2.068.850.607,45	2,47

Tabel 8.57
Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	34.381.005.415,49	32.694.313.663,68	1.686.691.751,81	5,16
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	50.548.081.727,67	112.407.702.417,02	(61.859.620.689,35)	(55,03)
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.596.395.564,10	4.466.994.333,55	129.401.230,55	2,90
	JUMLAH	175.281.715.407,31	233.256.392.506,85	(57.974.677.099,54)	(24,85)

8.2.8.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp85.756.232.700,05** dan **Rp83.687.382.092,60**. Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin dalam Lampiran 8.3.

8.2.8.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp34.381.005.415,49** dan **Rp32.694.313.663,68**. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

Tabel 8.58
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	33.778.679.608,61	32.179.294.029,44	1.599.385.579,17	4,97
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	313.462.938,70	255.324.801,18	58.138.137,52	22,77
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	30.204.724,50	21.490.108,93	8.714.615,57	40,55
4	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	998.000,00	2.800.250,00	(1.802.250,00)	(64,36)
5	Beban Penyusutan Tugu Peringatan	54.905.729,84	53.116.559,07	1.789.170,77	3,37
6	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	31.837.161,60	29.535.911,60	2.301.250,00	7,79
7	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	35.267.829,56	30.116.110,78	5.151.718,78	17,11
8	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	135.649.422,68	122.635.892,68	13.013.530,00	10,61
	JUMLAH	34.381.005.415,49	32.694.313.663,68	1.686.691.751,81	5,16

8.2.8.3 Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp50.548.081.727,67** dan **Rp112.407.702.417,02**. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebagai berikut:

Tabel 8.59
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyusutan Jalan	43.666.975.500,76	104.469.201.464,96	(60.802.225.964,20)	(58,20)
2	Beban Penyusutan Jembatan	228.949.744,38	150.035.873,38	78.913.871,00	52,60
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	4.111.242.632,36	5.974.587.217,30	(1.863.344.584,94)	(31,19)
4	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	913.700,00	-	913.700,00	100,00
5	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	614.493.581,77	365.562.851,52	248.930.730,25	68,10
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	12.095.263,88	5.733.657,52	6.361.606,36	110,95
7	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	12.331.228,48	7.410.299,86	4.920.928,62	66,41
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	59.192.675,00	17.736.392,50	41.456.282,50	233,74
9	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	158.595.209,61	147.700.042,91	10.895.166,70	7,38
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	180.900.770,97	168.871.094,31	12.029.676,66	7,12
11	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	76.014.700,00	76.014.700,00	-	100,00
12	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	21.042.610,30	21.156.399,05	(113.788,75)	(0,54)
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	45.703.064,32	40.968.025,60	4.735.038,72	11,56
15	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	370.020.768,07	306.398.075,58	63.622.692,49	20,76
16	Beban Penyusutan Instalasi Gas	28.174.804,01	26.859.966,67	1.314.837,34	4,90
17	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	9.900.000,00	9.900.000,00	-	-
18	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	699.396,40	699.396,40	-	-
19	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	908.142.641,93	579.484.380,60	328.658.261,33	56,72
20	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	42.693.435,43	39.382.578,86	3.310.856,57	8,41
	JUMLAH	50.548.081.727,67	112.407.702.417,02	(61.859.620.689,35)	(55,03)

8.2.8.4 Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp4.596.395.564,10** dan **Rp4.466.994.333,55**. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebagai berikut:

Tabel 8.60
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise	44.225.714,20	28.005.714,20	16.220.000,00	57,92
2	Beban Amortisasi Hak Cipta	24.573.000,00	24.573.000,00	-	-
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.527.596.849,90	4.414.415.619,35	113.181.230,55	2,56
	JUMLAH	4.596.395.564,10	4.466.994.333,55	129.401.230,55	2,90

Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Per SKPD terdapat dalam Lampiran 8.4.

8.2.9 Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2019 dan 2018 senilai **Rp2.320.447.957,10** dan **Rp8.407.137.194,58**. Beban Penyisihan Piutang sebagai berikut:

Tabel 8.61
Beban Penyisihan Piutang

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	4.018.462,39	7.299.273.353,71	(7.295.254.891,32)	(99,94)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	242.880.525,00	27.118.530,00	215.761.995,00	795,63
3	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	79.359.495,96	(79.359.495,96)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	204.329.869,04	-	204.329.869,04	100,00
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	74.006.299,70	60.445.555,79	13.560.743,91	22,43
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	1.795.212.800,97	940.940.259,12	854.272.541,85	90,79
	JUMLAH	2.320.447.957,10	8.407.137.194,58	(6.086.689.237,48)	(72,40)

8.2.10 Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2019 dan 2018 adalah masing-masing senilai **Rp215.492.875.421,00** dan **Rp191.055.529.238,00**. Beban Transfer sebagai berikut:

Tabel 8.62
Beban Transfer

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	17.562.112.671,00	15.723.897.591,00	1.838.215.080,00	11,69
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	2.871.420.000,00	3.388.500.000,00	(517.080.000,00)	(15,26)

Tabel 8.62
Beban Transfer

NO	URAIAN	2019	2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
3	Beban Transfer Bagi Bantuan Keuangan Ke Desa	194.062.590.750,00	170.448.004.520,00	23.614.586.230,00	13,85
4	Beban Transfer Bagi Bantuan Keuangan Lainnya	996.752.000,00	1.495.127.127,00	(498.375.127,00)	(33,33)
	Jumlah	215.492.875.421,00	191.055.529.238,00	24.437.346.183	12,79

8.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai **(Rp2.264.041.488,82)** terdiri Surplus/Defisit Penjualan Aset Non lancar senilai **(Rp2.116.513.404,39)** serta Surplus/Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya senilai **(Rp147.528.084,43)**. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tersebut diperoleh dari Penjualan Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

8.4 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa tahun 2019 senilai **Rp0,00**.

8.5 Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO tahun 2019 senilai **Rp469.951.745.288,26** merupakan selisih nilai Pendapatan dan Beban. Pendapatan Operasional tahun 2019 senilai **Rp3.659.360.043.395,24**; Beban Operasional senilai **Rp3.187.144.256.618,16** sehingga diperoleh Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp472.215.786.777,08**. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai **(Rp2.264.041.488,82)** dan Beban Luar Biasa senilai **Rp0,00** sehingga Surplus/Defisit LO tahun 2019 senilai **Rp469.951.745.288,26**.

BAB IX

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN ARUS KAS

9.1 Penjelasan Laporan Arus Kas

9.1.1 Definisi Aktivitas Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu.

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi antara lain berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga dan transfer keluar.

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan antara lain bersumber dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan antara lain penggunaan kas untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya.

Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan antara lain pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dari pinjaman, penjualan surat utang, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan antara lain pembentukan dana cadangan, pembayaran penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman dan pemberian pinjaman jangka panjang. Aktivitas Non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non

anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran dengan jumlah yang sama dari perhitungan pihak ketiga dan/atau kiriman uang masuk dan kiriman uang keluar.

9.1.2 Posisi Kas

Posisi Kas per 31 Desember 2019 senilai **Rp289.051.192.533,06** sebagai berikut:

Tabel 9.1
Posisi Kas

NO	URAIAN	2019	2018
1	Kas di Kas Daerah	215.722.795.407,00	255.823.706.505,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	-	1.508.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	240.283.177,00	612,00
4	Kas di Bendahara BLUD	21.514.650.258,06	7.616.393.726,73
5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP	41.140.564.248,00	33.997.037.726,00
6	Saldo Akhir Kas di BOS	10.432.899.443,00	2.681.796.932,00
	JUMLAH	289.051.192.533,06	300.120.443.501,73

Posisi kas per 31 Desember 2019 senilai **Rp289.051.192.533,06** mengalami penurunan senilai **Rp11.069.250.968,67** atau **3,69%** jika dibandingkan dengan posisi kas per 31 Desember 2018 senilai **Rp300.120.443.501,73**. Penurunan tersebut disebabkan oleh:

Tabel 9.2
Aktivitas Kas

NO	URAIAN	2019
1	Aktivitas Operasi	576.137.293.766,33
2	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(587.423.298.912,00)
3	Aktivitas Pembiayaan	-
4	Aktivitas Non anggaran	216.754.177,00
	Penurunan Kas	(11.069.250.968,67)

9.1.2.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 senilai **Rp576.137.293.766,33** mengalami kenaikan senilai **Rp64.549.603.398,11** atau **12,62%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp511.587.690.368,22**. Arus Kas Bersih merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

Tabel 9.3
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2019	2018
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi	4.014.059.450.475,19	3.682.128.807.304,60
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi	3.437.922.156.708,86	3.170.541.116.936,38
	ARUS KAS BERSIH	576.137.293.766,33	511.587.690.368,22

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 senilai **Rp4.014.059.450.475,19** mengalami kenaikan senilai **Rp331.930.643.170,59** atau **9,01%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp3.682.128.807.304,60**. Arus Masuk Kas sebagai berikut:

Tabel 9.4
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2019	2018
1	Pendapatan Pajak Daerah	213.572.238.616,00	207.896.011.946,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	42.841.103.005,00	42.630.642.182,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.990.615.843,00	7.895.373.711,00
4	Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	370.026.903.653,19	325.449.356.307,60
5	Dana Bagi Hasil Pajak	50.507.005.280,00	63.182.845.832,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	24.351.064.800,00	23.972.292.072,00
7	Dana Alokasi Umum	1.591.291.632.000,00	1.500.538.688.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	547.639.574.883,00	482.734.102.661,00
9	Dana Penyesuaian	461.115.736.000,00	405.992.221.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	294.592.460.792,00	282.185.583.477,00
11	Pendapatan Hibah	221.895.600.000,00	214.038.960.000,00
12	Pendapatan Lainnya	183.235.515.603,00	125.612.730.116,00
	JUMLAH	4.014.059.450.475,19	3.682.128.807.304,60

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2019 senilai **Rp3.437.922.156.708,86** mengalami kenaikan senilai **Rp267.381.039.772,48** atau **8,43%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp3.170.541.116.936,38**. Arus Keluar Kas sebagai berikut:

Tabel 9.5
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi

NO	URAIAN	2019	2018
1	Belanja Pegawai	1.776.844.553.989,00	1.717.527.604.248,00
2	Belanja Barang dan Jasa	976.683.376.555,86	829.887.402.162,38
3	Belanja Hibah	31.223.382.600,00	57.515.561.814,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.389.260.143,00	1.702.688.774,00
5	Belanja Tidak Terduga	-	2.610.109.700,00
6	Bagi Hasil Pajak	17.562.112.671,00	15.723.897.591,00
7	Bagi Hasil Retribusi	2.871.420.000,00	3.388.500.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	630.351.298.750,00	540.690.225.520,00
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	996.752.000,00	1.495.127.127,00
	JUMLAH	3.437.922.156.708,86	3.170.541.116.936,38

9.1.2.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan per 31 Desember 2019 senilai **Rp(587.423.298.912,00)** mengalami penurunan senilai **Rp(77.438.817.785,00)** atau **15,18%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp(509.984.481.127,00)**. Arus Kas Bersih merupakan selisih antara Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas.

Tabel 9.6
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO	URAIAN	2019	2018
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan	410.480.241,00	939.459.335,00
2	Arus keluar Kas dari Aktivitas Aset Non Keuangan	587.833.779.153,00	510.923.940.462,00
	ARUS KAS BERSIH	(587.423.298.912,00)	(509.984.481.127,00)

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Keuangan sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan per 31 Desember 2019 senilai **Rp410.480.241,00** mengalami penurunan senilai **Rp528.979.094,00** atau **56,31%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp939.459.335,00**. Arus Masuk Kas sebagai berikut:

Tabel 9.7
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO	URAIAN	2019	2018
1	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	45.372.840,00	508.395.497,00
2	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	365.107.401,00	431.063.838,00
	JUMLAH	410.480.241,00	939.459.335,00

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan per 31 Desember 2019 senilai **Rp587.833.779.153,00** mengalami kenaikan senilai **Rp76.909.838.691,00** atau **15,05%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp510.923.940.462,00**. Arus Keluar Kas sebagai berikut:

Tabel 9.8
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Non Keuangan

NO	URAIAN	2019	2018
1	Belanja Tanah	7.355.693.793,00	8.435.062.000,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	123.053.357.908,00	88.822.429.289,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	193.588.871.113,00	130.132.103.447,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	235.134.118.886,00	252.384.857.989,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	28.701.737.453,00	25.918.284.042,00
6	Belanja Modal BLUD	-	5.231.203.695,00
	JUMLAH ARUS KELUAR KAS	587.833.779.153,00	510.923.940.462,00

9.1.2.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2019 senilai **Rp0,00** mengalami kenaikan senilai **Rp5.542.141.626,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp(5.542.141.626,00)**. Arus Kas Bersih merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

Tabel 9.9
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan

NO	URAIAN	2019	2018
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	21.500.000.000,00	19.856.169.293,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	21.500.000.000,00	25.398.310.919,00
	ARUS KAS BERSIH	-	(5.542.141.626,00)

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2019 senilai **Rp21.500.000.000,00** mengalami kenaikan senilai **Rp1.643.830.707,00** atau **8,28%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp19.856.169.293,00**. Arus Masuk Kas sebagai berikut:

Tabel 9.10
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

NO	URAIAN	2019	2018
1	Pencairan Dana Cadangan	-	56.169.293,00
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	21.500.000.000,00	19.800.000.000,00
	JUMLAH	21.500.000.000,00	19.856.169.293,00

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2019 senilai **Rp21.500.000.000,00** mengalami penurunan senilai **Rp3.898.310.919,00** atau **15,35%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp25.398.310.919,00**. Arus Keluar Kas sebagai berikut:

Tabel 9.11
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

NO	URAIAN	2019	2018
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	-	4.772.881.700,00
2	Pembayaran Pokok Utang	21.500.000.000,00	20.625.429.219,00
	JUMLAH	21.500.000.000,00	25.398.310.919,00

9.1.2.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2019 senilai **Rp239.908.308,00** mengalami kenaikan senilai **Rp240.749.408,00** atau **28.623,16%** jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih per 31 Desember 2018 senilai **Rp(841.100,00)**. Arus Kas Bersih merupakan selisih antara Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar.

Tabel 9.12
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran

NO	URAIAN	2019	2018
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Keuangan	236.395.000.764,75	223.549.975.500,35
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Keuangan	236.155.092.456,75	223.550.816.600,35
	ARUS KAS BERSIH	239.908.308,00	(841.100,00)

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran sebagai berikut :

1. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2019 senilai **Rp236.403.377.716,75** mengalami peningkatan senilai **Rp12.853.402.216,40** atau **5,75%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp223.549.975.500,35**. Arus Masuk Kas sebagai berikut:

Tabel 9.13
Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

NO	URAIAN	2019	2018
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	65.554.903.222,00	64.010.103.404,00
2	Tabungan Perumahan Pegawai	1.244.826.000,00	1.281.720.000
3	PPH Pasal 21 (Gaji+Tunjangan+Honorarium)	2.114.454.531,00	1.294.836.083
4	Askes	19.804.093.955,00	19.298.530.011
5	PPN Fihak Ketiga	63.140.864.745,91	57.927.468.605,63
6	PPH Fihak Ketiga	84.544.235.162,84	79.737.317.396,72
	JUMLAH	236.403.377.716,75	223.549.975.500,35

2. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2019 senilai **Rp236.186.623.539,75** mengalami peningkatan senilai **Rp12.635.806.939,40** atau **5,65%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2018 senilai **Rp223.550.816.600,35**. Arus Keluar Kas sebagai berikut:

Tabel 9.14
Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

NO	URAIAN	2019	2018
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	65.554.903.222,00	64.010.103.404,00
2	Tabungan Perumahan Pegawai	1.244.826.000,00	1.281.720.000
3	PPH Pasal 21 (Gaji+Tunjangan+Honorarium)	2.114.454.531,00	1.294.836.083
4	Askes	19.804.093.955,00	19.298.530.011
5	PPN Fihak Ketiga	63.058.482.936,91	57.927.468.605,63
6	PPH Fihak Ketiga	84.409.862.894,84	79.738.158.496,72
	JUMLAH	236.186.623.539,75	223.550.816.600,35

9.2 Penjelasan Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2019 sebesar **Rp289.051.192.533,06** berasal dari saldo akhir :

- Kas di Kas Daerah	Rp	215.722.795.407,00
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	240.283.177,00
- Kas di BLUD	Rp	21.514.650.258,06
- Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP	Rp	41.140.564.248,00
- Kas di Bendahara BOS	Rp	10.432.899.443,00

Dengan rincian sebagai berikut :

- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp	576.137.293.766,33
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp	(587.423.298.912,00)
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp	-
- Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp	216.754.177,00
- Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Selama TA 2019	Rp	(11.046.096.837,67)
- Saldo Awal Kas dan Setara Kas per 1 Januari 2019	Rp	300.120.443.501,73
- Saldo Awal Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2019	Rp	289.051.192.533,06

BAB X

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

10.1 Ekuitas Awal

Saldo Ekuitas Awal senilai **Rp3.973.855.987.690,75** merupakan nilai ekuitas akhir tahun 2018.

10.2 Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2019 senilai **Rp469.951.745.288,26** merupakan surplus/defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp472.215.786.777,08** ditambah surplus/defisit dari kegiatan non operasional senilai **Rp(2.264.041.488,82)** dikurangi pos luar biasa senilai **Rp0,00**. Surplus dari kegiatan operasional merupakan selisih lebih antara Pendapatan-LO senilai **Rp3.659.360.043.395,24** dan Beban-LO senilai **Rp3.187.144.256.618,16**.

10.3 RK PPKD

Saldo RK PPKD per 31 Desember 2019 senilai **Rp0,00**.

10.4 RA PPKD

Saldo RA PPKD per 31 Desember 2019 senilai **Rp0,00**.

10.5 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2019 senilai **Rp73.558.419.431,52**. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi atas nilai aset dan ekuitas pada laporan keuangan tahun 2019. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut:

Tabel 10.1
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Koreksi Aset Lancar	(5.184.315.655,09)
2	Koreksi Aset Tetap	(162.660.332,00)
3	Koreksi Penyusutan	94.772.894.749,83
4	Koreksi Kewajiban	100.191.095,00
5	Pembiayaan dan Investasi	(15.967.690.426,22)
	JUMLAH	73.558.419.431,52

Rincian dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tiap SKPD terdapat dalam Lampiran 10.1.

10.6 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2019 senilai **Rp4.517.366.152.410,53.**

BAB XI

PENUTUP

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagian dilimpahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintah daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari pemerintah daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Dalam hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Daerah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon Nomor: 700/LHP.292/IRBAN.WIL.I Tanggal 19 Pebruari 2020 tentang Laporan Pemeriksaan Khusus Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan penyajian atas Belanja Modal Tanah dan Belanja Barang untuk Diserahkan sebagai Aset Lain-lain senilai **Rp659.017.493,00**.

Sebagai salah satu tindak lanjut dari LHP tersebut, telah diterima padarekening kas daerah pengembalian senilai **Rp659.017.493,00** dengan STS No. 900/004-STSDPKPP/2020 senilai **Rp504.881.493,00** Tanggal 19 Februari 2020 dan STS No. 900/005-STSDPKPP/2020 senilai **Rp154.136.000,00** Tanggal 21 Februari 2020.

2. Berdasarkan hasil rekonsiliasi Laporan Keuangan akhir tahun pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilakukan penyajian kelebihan bayar atas Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Penyeberangan di Atas Air sebagai Aset Lain-lain senilai **Rp768.185.076,00**.

Sebagai tindak lanjut dari kejadian tersebut, telah diterima pada rekening kas daerah pengembalian senilai **Rp768.185.076,00** dengan STS No. 900/33-PUPR Tanggal 3 Januari 2020 senilai **Rp293.614.682,00**; STS No. 900/34-PUPR Tanggal 3 Januari 2020 senilai **Rp390.777.295,00**; STS No. 900/785a-PUPR Tanggal 7 Februari 2020 senilai **Rp35.952.818,00**; STS No. 900/790a-PUPR Tanggal 10 Februari 2020 senilai **Rp47.850.281,00**.

3. Terdapat hibah dari Pemerintah Pusat berupa blanko KTP Elektronik sebanyak 133.500,00 keping dan 2019 telah dikeluarkan sebanyak 133.500,00 keping sehingga saldo per 31 Desember sebanyak nihil. Saldo persediaan blanko KTP Elektronik tersebut tidak disajikan dalam neraca (ekstrakomtabel) karena dalam Berita Acara Serah Terima Hibah tidak mencantumkan nilai rupiah.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2019 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.

Sumber, 1 September 2020
BUPATI CIREBON,

IMRON